



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01/PHPU.PRES/XII/2014**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014**

**ACARA
PEMBUKTIAN
(V)**

J A K A R T A

RABU, 13 AGUSTUS 2014



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 01/PHPU.PRES/XII/2014**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

PEMOHON

1. Prabowo Subianto
2. M. Hatta Rajasa

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

ACARA

Pembuktian (V)

**Rabu, 13 Agustus 2014, Pukul 10.05 – 21.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 7) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Aswanto | (Anggota) |

Yunita R., Rizki A., Sunardi, Mardian W., Luthfi W., Wiwik B.W., Cholidin N.,

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Zainuddin Paru | 6. Nicholay |
| 2. Firman Wijaya | 7. Ade Irfan Pulungan |
| 3. Maqdir Ismail | 8. Dorel Almir |
| 4. Habiburokhman | 9. Tina Harianingsih |
| 5. Elza Syarief | |

B. Termohon:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Ida Budhiati | 4. Arief Budiman |
| 2. Ferry Kurnia Rizkiyansyah | 5. Juri Ardiantoro |
| 3. Hadar Nafis Gumay | |

C. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Guntoro | 5. Abdul Qodir |
| 2. Ali Nurdin | 6. Absar Kartabrata |
| 3. Arif Effendi | 7. Berna S. Ermaya |
| 4. Rasyid Alam Perkasa Nasution | 8. Ibnu Shina Zaenudin |

D. Ahli dari Termohon:

1. Hasjim Sangadji

E. Saksi dari Termohon:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Beatrix Wanane | (Papua) |
| 2. Didimus Dogomo | (Papua) |
| 3. Iman H. Keliwar | (Papua) |
| 4. Yermias Numberi | (Papua) |
| 5. Immawan Margono | (Papua) |
| 6. Ham Nawipa | (Papua) |
| 7. Yanes Alitnoe | (Papua) |
| 8. Adam Arisoy | (Papua) |
| 9. Filep Wamafma | (Papua Barat) |
| 10. Evi Novida Ginting Manik | (Sumatera Utara) |
| 11. Sumangeli Mendrofa | (Sumatera Utara) |
| 12. Buchari Mahmud | (Maluku Utara) |
| 13. La Ode Abd. Natsir | (Sulawesi Tenggara) |
| 14. Agus Supriyatna | (Banten) |
| 15. Badrusalam | (Banten) |
| 16. Ramelan | (Banten) |
| 17. Samahu Muharram | (Kalimantan Selatan) |
| 18. Daan Rismon | (Kalimantan Tengah) |

19. Awaluddin
20. Misnah M. Attas
21. Nuzul Fitri

(Kalimantan Tengah)
(Sulawesi Selatan)
(Sulawesi Selatan)

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Andi M. Asrun
2. Dwi Ria Latifah
3. Alexander Lay
4. Teguh Samudera
5. Junimart Girsang
6. Sirra Prayuna
7. Taufik Basari

8. Badrul Munir
9. Sugeng Teguh Santoso
10. Soesilo Ariwibowo
11. Dedy mawardi
12. Sutra Dewi
13. Timotius Tumbur Simbolon
14. Benny Tabarat

G. Bawaslu:

1. Nasrullah

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES/XII/2014, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon hadir ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Termohon?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Pihak Terkait?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Bawaslu? Hadir, baik. Hari ini kita melanjutkan sidang untuk mendengarkan keterangan saksi dari Termohon. Sudah ada saksinya, Termohon?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Yang Mulia?

9. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION

Sudah, Yang Mulia.

10. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah ada ya, baik.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Apa boleh kami menyampaikan sesuatu sebelum pemeriksaan terhadap saksi ini dilanjutkan?

12. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Baik, terima kasih. Ini ada dua hal, Yang Mulia, yang hendak kami sampaikan. Yang pertama, berkenaan dengan sampai hari ini kan kita belum mendapatkan penjelasan yang utuh dari pihak Bawaslu mengenai apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Oleh karena itu kami meminta juga kepada Bawaslu untuk memberikan penjelasan kepada kita berkenaan dengan surat suara, khususnya mulai dari proses pengadaan sampai dengan distribusi surat suara, sebab sebagaimana kita dengar dalam persidangan yang lalu distribusi surat suara ini tidak sampai. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, berkenaan dengan pengetahuan Bawaslu mengenai sekuriti dari surat suara yang ada ini.

Kemudian yang ketiga, Yang Mulia, kami juga ingin mendapat penjelasan dari Bawaslu mengenai bentuk atau model dari surat panggilan khusus seperti yang kita dengar kemarin, ini terkait dengan model A-5 di mana salah seorang saksi kita, Prianda Anatta, Komisioner KPU Jakarta Utara mengatakan bahwa ada dua model. Sementara yang kami ketahui dari bukti-bukti yang ada ini ada yang benar ada yang tidak benar. Itu yang ketiga.

Kemudian yang keempat, Yang Mulia, kami juga ingin mendapatkan penjelasan dari Bawaslu mengenai fungsi dari lembaga-lembaga pengawas atau lembaga-lembaga seperti NDI-IFES Partnership dalam penyelenggaraan pilpres, sebab sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan KPU dan KPU termasuk yang diawasi oleh Bawaslu. Mengenai hal ini kami perlu mendapatkan penjelasan.

Yang kelima, khusus untuk kegiatan NDI, apakah Bawaslu juga mendapat laporan dan melakukan pengawasan berkenaan dengan kegiatan lembaga ini membantu partnership Perludem dalam pemantauan pilpres?

Lima hal ini kami mohon dengan hormat untuk mendapatkan penjelasan dari pihak Bawaslu.

Itu yang pertama, Yang Mulia. Kemudian yang kedua, ini kami hendak menyampaikan suatu surat berkenaan dengan kemarin sesudah persidangan ini dilakukan mulai tadi malam cukup banyak telepon-telepon yang tidak jelas yang menghubungi saksi-saksi kami yang datang dari Papua kemarin (...)

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Yang Mulia?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Untuk itu (...)

16. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, sebentar, dengarkan dulu.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Untuk itu kami akan menyampaikan suatu surat dan saya minta salah seorang kolega saya akan membacakan surat itu terlebih dulu di persidangan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Surat mengenai apa? Intinya saja apa?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Memang surat ini kami (...)

20. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau surat sendiri, dibaca sendiri, tapi intinya saja.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Ya, Yang Mulia. Kami sampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi beserta Majelis Mahkamah Konstitusi tentang mohon jaminan perlindungan keamanan bagi para saksi, Yang Mulia.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Yang Mulia?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Izinkan kami, punya hak kami, kesempatan kami untuk menyampaikan apa yang kami sampaikan pada Ketua Majelis. Poin-poinnya sederhana, Yang Mulia. Bahwa kami berharap tentu seluruh saksi dalam perkara ini (...)

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Izin, Yang Mulia?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Dapat memberikan keterangan (...)

26. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, sebentar!

27. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Dan keadaan yang kondusif tanpa ada tekanan apapun, dari siapapun juga. Karena ada berbagai macam bentuk intimidasi dan keamaan yang sifatnya serius, maka kami berharap melalui Majelis Mahkamah Konstitusi ini, tentunya proses pemeriksaan ini ada jaminan perlindungan hukum karena bagaimanapun, whistleblowing system harus sudah bisa dijalankan di dalam perlindungan terhadap saksi-saksi yang akan memberikan keterangan. Karena kami berharap pemeriksaan ini berlaku fair.

Itu saja permohonan kami sampaikan kepada Yang Mulia, dan surat ini kami melalui persidangan ini kami sampaikan kepada Yang Mulia dan Majelis. Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Petugas, ambil suratnya!

Ya, jadi begini. Yang pertama, Bawaslu catat semua itu, sudah dicatat? Dan akan ... Majelis akan melihat kesempatan kepada Bawaslu untuk menjelaskan seluruh ... ya ... seluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Bawaslu, tugas-tugas pengawasannya dan juga terhadap hal-hal yang terungkap dalam persidangan ini yang berkaitan dengan tugas pengawasannya pada hari Jumat, ya.

Nanti penjelasan sekaligus pada hari Jumat yang akan datang, bersamaan dengan keterangan Ahli, bagi para pihak yang akan mengajukan Ahli.

Kemudian, yang kedua, untuk perlindungan kepada Saksi, pertama, Mahkamah perlu menyampaikan bahwa yang bisa dilindungi secara langsung oleh Mahkamah adalah Saksi yang sedang memberikan keterangannya dalam sidang ini, dan tentu dalam pengamanan di Mahkamah.

Untuk di luar, ya, lingkungan Mahkamah, silakan laporkan kepada pihak kepolisian, dan kami pun akan menyambungkan surat ini kepada pihak kepolisian, ya. K

epada semua pihak juga perlu kita menyadari bersama bahwa perlu kita memberikan kebebasan tanpa tekanan apapun kepada Saksi dari pihak manapun yang memberikan kesaksian dalam sidang Mahkamah ini. Karena dengan itulah kita akan bisa mengungkap kebenaran yang sebenarnya.

Jadi, ruang sidang ini adalah ruang sidang yang bebas dari tekanan apapun dan oleh siapapun, dan Mahkamah akan memberikan kebebasan itu kepada para Saksi untuk mengungkapkan keterangan-keterangan dan kesaksiannya dalam sidang ini, itu, ya.

Kita lanjut. Saya persilakan kepada para Saksi Termohon, ya, untuk maju ke depan, saya panggil namanya satu-satu.

29. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Mohon izin, Saudara Ketua.

30. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih ada, ya ... silakan.

31. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Saya ingin mohon menghadap dengan didampingi oleh Pihak Pemohon maupun dari Terkait, terima kasih.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Yang Mulia, (suara tidak terdengar jelas) apa yang hendak kita bicarakan (...)

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Maaf, mengenai apa dulu? Tolong disampaikan dulu di ... ya.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Supaya yang di dengar oleh mereka (...)

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, bisa disampaikan secara terbuka di sana, kecuali tidak mau didengar oleh ... di luar secara publik, tapi kalau yang bisa didengar oleh secara publik, saya persilakan di (...)

36. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Karena ini masalahnya private, saya kira lebih baik saya sampaikan Mahkamah dulu, didengar oleh mereka. Tapi kalau ... bisa dibuka, boleh juga, enggak masalah saya.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau memang rahasia, saya persilakan di sini untuk maju ke depan.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Bukan rahasia, tapi suatu hal yang urgent.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah tidak boleh didengar oleh publik?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Boleh.

41. KUASA HUKUM PEMOHON:

Kami keberatan, Yang Mulia.

42. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan ... silakan sampaikan di sana.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Yang Mulia, kami pikir sesuai dengan acara saja, jadi tetap di posisi masing-masing, Yang Mulia, kami menghormati hukum acara Majelis Mahkamah Konstitusi.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Saudara Ketua, Majelis yang saya muliakan, para kolega, baik dari Pihak Pemohon, Terkait. Saya baru datang terlambat karena menghadiri untuk melayat seorang tokoh guru besar hukum pada ... hukum perda hukum tata negara, meninggal dunia, Prof. Dr. Harun Rasyid, saya kira kalian semua muridnya, paling tidak, tahu beliau itu. Maka saya mohon kepada Majelis, mengheningkan cipta sebentar, bagi yang agama Islam membacakan ... membaca Al-Fatihah, bagi yang lainnya sesuai agamanya masing-masing, kalau tidak sekarang, nanti habis sidang. Terserah Majelis, terima kasih.

45. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, sekarang saja, ya. Karena Prof. Harun Rasyid ini adalah Profesor dan guru besar yang kita hormati bersama, ya. Guru besar hukum tata negara dari Indonesia yang tadi malam telah meninggalkan kita semua, dan mari kita berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya persilakan berdoa. Terima kasih.

Baik (...)

46. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION

Majelis, mohon izin, Majelis. Sehubungan dengan permohonan kami yang kemarin, apabila diperbolehkan, kami menghadirkan Ahli hari ini, Majelis karena pertimbangan yang kemarin kami sampaikan.

47. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Satu saja, ya, yang akan pergi (...)

48. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION

Ya, ya, betul.

49. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Satu saja, saya izinkan ... diizinkan, ya.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION

Ya, terima kasih, Majelis.

51. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Karena ada alasan yang bisa di ... yang bisa dipahami, ya.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION

Terima kasih, Majelis.

53. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nanti terakhir, ya. Baik, saya panggil nama para Saksi, untuk maju ke depan, untuk diambil sumpah. Yang Saksi ini, yang tertanggal 13, ya? Ada 2? Yang baru, ya? Baik. Beatrix Wanane, ya maju ke depan. Didimus Dogomo, maju ke depan. Iman H. Keliwar, ya. Bilang hadir kalau ada, ya. Yermias Numberi, hadir. Immawan Margono, hadir. Ham Nawipa, hadir. Yanes Alitnoe, hadir, ya. Adam Arisoy. Fieip Wamafma, ya, ke depan. Evi Novida Ginting. Ya, maju ke depan! Sumangeli Hendrofa ... Mendrofa, maaf, Mendrofa, ke depan. Ir. Buchari Mahmud, ya maju ke depan. La Ode Abdul Natsir, hadir. Agus Supriyatna, S.H.,M.Si., hadir. Badrusalam, hadir. Ramelan S.H. Samahu Muharram, Daan Rismon, Awaluddin, Misnah M. Attas, Nuzul Fitri. 21 orang, ya. Ini Kristen dan Katolik, ya, eh Kristen saja.

54. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Mohon ambil sikap. Mohon ikuti saya.

"Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

55. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA KRISTEN:

Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

56. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pak Alim, silakan.

57. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan. Dimulai.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya." Terima kasih.

58. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

59. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Terima kasih. Kembali ke tempat duduk masing-masing.
Ya, kembali saya mengingatkan kepada para saksi tadi baru saja diambil sumpah untuk memberikan keterangan yang bena dan tidak lain dari yang sebenarnya. Jadi, sekali lagi saya ingatkan untuk memberikan keterangan yang benar, ya. Ya, silakan Yang Mulia Pak Fadlil.

60. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Saksi Beatrix Wanane, silakan berdiri agak maju supaya kelihatan semua pihak. Saya cek tempat tinggal Saudara, BTN Puskopad Atas, Blok P-19, Kamkey. Saudara beragama Kristen, anggota KPU Provinsi Papua.

61. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap!

62. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Termohon meminta Saudara menjelaskan 3 hal. Pertama, soal proses pemilihan, yang kedua soal proses rekapitulasi, dan yang ketiga soal tidak adanya perbedaan jumlah dalam rekapitulasi. Silakan dimulai dari yang pertama, soal proses pemilihan. Apa yang ingin Saudara terangkan?

63. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap, Yang Mulia. Yang ingin saya jelaskan di sini tentang proses. Proses pemilihan, proses distribusi logistik dilakukan oleh KPU Provinsi Papua dan itu sampai ke kabupaten masing-masing. Untuk kabupaten di daerah Dogiyai, Paniai, Deiyai, Nabire pada tanggal 4 saya mendapat mandat dari KPU Provinsi Papua untuk ke Kabupaten Nabire menyelesaikan atau melakukan supervisi terhadap hasil putusan Mahkamah untuk putusan legislatif yang dimenangkan oleh Partai PAN di Paniai, eh di Nabire. Kemudian (...)

64. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebentar, di sini soal presiden, pemilihan presiden?

65. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Ya, ya, nanti berkaitan (...)

66. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, berkaitan. Silakan, kaitannya apa?

67. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kaitannya adalah bahwa ketika saya ada di sana dan saya memantau tentang perkembangan persiapan logistik. Untuk Kabupaten Dogiyai pusat logistiknya ada di KPU Kabupaten Nabire, saya melihat sementara dikerjakan, juga Kabupaten Nabire pekerja semua mengerjakan dan di sana dikawal proses persiapan logistik.

Saya juga melihat Kabupaten Deiyai itu di Staf Kesekretariatan Kabupaten Deiyai kompleks ... eh di rumahnya saya diantar untuk dilihat ada proses logistik. Dan saya tanya, "Ini yang sudah disiapkan apakah hendak akan diantar?"

"Siap, Ibu."

"Kapan diantar?"

"Tanggal 6 akan kami meng ... pergerakan logistik."

"Harap dikomunikasikan dengan semua pihak dan segera dikeluarkan." Kemudian, saya juga ke Paniai yang tempat pergerakan logistik dari Paniai dan juga di sana teman-teman komisioner menyatakan bahwa kami siap untuk pergerakan logistik.

Jadi, dalam hal proses untuk (suara tidak terdengar jelas) logistik dalam pantauan saya di Kabupaten Nabire menjadi fokus penyebaran logistik untuk Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Paniai itu berjalan.

68. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

69. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Sehingga saya dapat menyatakan bahwa pergerakan (...)

70. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Soal (...)

71. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Logistik berjalan.

72. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Logistik?

73. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Berjalan.

74. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Beres, gitu ya?

75. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Beres. Kemudian di (...)

76. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sekarang?

77. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kabupaten Wamena.

78. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Wamena.

79. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Pada tanggal 6 ... 7, setelah saya pulang dari Jayawijaya ... minta maaf. Ya, Jayawijaya. Siap, Bapak.

80. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

81. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya pulang. Kemudian karena saya korwil di dapil pegunungan (...)

82. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

83. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya juga diperintahkan untuk ... oleh KPU provinsi dalam rapat Pleno, "Anda adalah korwil. Pantau perkembangan logistik di daerah pegunungan, di wilayah!"
Lalu saya (...)

84. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebentar, sebentar! Anda diperintahkan memantau. Anda berada di kantor memantaunya atau Anda di lapangan?

85. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya berangkat.

86. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Di?

87. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Ke Wamena, Jayawijaya.

88. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ke Wamena, ya?

89. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

90. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, Anda berada di sana?

91. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

92. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

93. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya (...)

94. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan, teruskan!

95. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Sampai di Jayawijaya, saya melihat proses logistik di ... dari Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya dilimpat ... dilipat di tempat yang sudah ditentukan. Saya memanggil komisionernya untuk melihat. Mereka menemani saya. Yalimo juga dilipat di tempat yang sudah ditentukan oleh mereka.

96. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

97. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kemudian Tolikara juga mereka lakukan pelipatan yang saya lihat dengan mata, kepala sendiri bahwa proses logistik sementara dikerjakan oleh kawan-kawan untuk dilakukan pergerakan menuju ke pusat-pusat kabupaten dan seterusnya akan ditindaklanjuti.

98. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

99. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Demikian.

100. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sekarang, pelaksanaan pencoblosan tanggal berapa?

101. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Pence ... pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 9.

102. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apakah serentak di seluruh Provinsi Papua?

103. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Serentak di seluruh Provinsi Papua. Kebetulan saya memilih di Kota Jayapura.

104. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

105. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Di TPS saya di Kelurahan Abio, saya setelah mencoblos (...)

106. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

107. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Lalu saya pantau Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura, tempat di mana saya berdomisili.

108. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

109. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Dan juga Kabupaten Jayapura. Karena dua tempat itu hanya ... dua kabupaten itu dan Kota Jayapura hanya dilalui dengan mobil.

110. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik.

111. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Jadi saya memantau dan proses itu berjalan.

112. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, soal proses sudah cukup.

113. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

114. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Mau ada tambahan yang lain?

115. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Tidak.

116. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak ada. Oke, sekarang soal proses rekap. Dimulai dari kapan, siapa yang hadir, dan seterusnya. Silakan!

117. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kami mengeluarkan berdasarkan jadwal yang rekap di tingkat provinsi. Saya dengan teman-teman, kami misi ... menyurati kepada KPU di kabupaten untuk sesuai tahapan segera melakukan rekap dan menuju ke Jayapura. Selambat-lambatnya tanggal 7 harus berada di Jayapura.

Kami membuat posko monitoring pergerakan logis ... pergerakan untuk ... minta maaf, Bapak, saya (...)

118. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini tujukan (...)

119. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Tanggal 17.

120. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini soal logistik?

121. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Tanggal 17, Bapak. Saya klarifikasi.

122. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, ya.

123. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap, Bapak.

124. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, di tingkat provinsi dimulai tanggal 17?

125. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Tanggal 17, kami melakukan monitoring pergerakan logis ...
teman-teman untuk melakukan rekap di tingkat provinsi.

126. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

127. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Itu kami buat posko di Hotel Marbau Sentani. Lalu teman-teman yang datang dari daerah harus melapor bahwa kesiapan mereka sudah ada di ibukota provinsi, yaitu mereka ada di Kabupaten Jayapura. Lalu (...)

128. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, tanggal 17 masih persiapan?

129. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Itu dari kabupaten untuk bergerak ke provinsi.

130. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ke provinsi. Lalu, di provinsi sidang dimulai untuk (...)

131. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Tanggal 18 dan tanggal 19.

132. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tanggal 18 dan tanggal 19, oke. Selesai dua hari itu?

133. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Selesai.

134. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Cukup tentang proses rekap. Apakah ada protes-protes, keberatan-keberatan, dan seterusnya ketika itu?

135. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Ada ... ada protes, ada keberatan-keberatan, tetapi diselesaikan juga saat itu.

136. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa keberatannya, protesnya?

137. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Pada masa rekap di provinsi, kami mengundang kedua pasangan ... saksi kedua pasangan calon, yaitu Saksi Pasangan Calon untuk Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Saudara Dadi Mulyono dan Yamin Muhammad.

138. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

139. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Itu Pasangan Nomor Urut 1. Dan Pasangan Nomor Urut 2, Bahar dan Ibu Beatrix Moni.

140. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Untuk apa mereka dipanggil?

141. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Mereka sebagai saksi pasangan calon.

142. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ndak, tadi kan kaitannya dengan protes tadi. Protes apa?

143. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Mereka hadir, kemudian pada dalam masa proses rekap itu berjalan, Ketua KPU Provinsi Papua membuka rapat Pleno terbuka dan dimulai dengan penjadwalan yang kita sudah memulai untuk kabupaten yang duluan melaporkan diri untuk membacakan hasilnya.

144. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Soal (...)

145. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Di dalam (...)

146. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Soal protes tadi, ada ... ada protes? Anda bilang tadi ada, katanya?

147. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Ya, ada. Ada protes (...)

148. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Protesnya mengenai apa, siapa yang melakukan?

149. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Pasangan Nomor Urut 1 melakukan protest ... protes terhadap (...)

150. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Soal apa?

151. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Soal ... mereka melakukan protes terhadap hasil.

152. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terhadap hasil di tingkat apa?

153. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Hasil yang mereka protes, pertama adalah di Kabupaten Dogiyai.

154. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dogiyai. Ada lagi, apa hanya Dogiyai?

155. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Mereka juga melakukan protes untuk Kota Jayapura.

156. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jayapura.

157. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Mereka juga melakukan protes untuk Yahukimo.

158. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yahukimo.

159. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Yang seingat saya, itu yang dilakukan (...)

160. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tiga itu yang Saudara ingat.

161. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

162. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bagaimana penyelesaiannya? Katanya selesai di tempat itu?

163. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Diselesaikan di tempat itu. Untuk ... saya memulai dengan Yahukimo.

164. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yahukimo.

165. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Ketika pembacaan oleh KPU Yahukimo dan didapatkan oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 1 ada selisih angka lalu kami memberikan kesempatan kepada Bawaslu, lalu Bawaslu memberikan tanggapan untuk skors, lalu kami lakukan pencocokkan data antara Pasangan Nomor Urut 1 dan KPU.

166. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

167. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Terjadi ada selisih dan diperbaiki saat itu juga di tempat.

168. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dan saksi-saksi menerima?

169. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Dan saksi menerima tidak menolak.

170. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, Yahukimo. Yang lain ada penjelasan?

171. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Yang Kota Jayapura diselesaikan saat itu.

172. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Soal yang sama juga?

173. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Soal yang sama juga.

174. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Yang lain lagi?

175. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Di Dogiyai tentang dua distrik (...)

176. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Soal apa itu?

177. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Tentang dua distrik tentang suara atau hasil yang didapatkan di Kabupaten Dogiyai dari dua distrik, yaitu Mapia Tengah dan Barat, dan sudah ada di level provinsi kami minta kepada KPU Dogiyai untuk mempertanggungjawabkan dalam forum di saat itu juga yang diminta untuk pengawasan langsung dari Bawaslu dan panwas untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

178. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dan selesai? Selesai apa tidak?

179. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kami memberikan waktu. Proses itu kami memberikan waktu karena sedikit gaduh, kami memberikan waktu untuk menskors lalu masing-masing pihak berkordinasi kepada tingkat di atasnya. Jadi kami KPU Provinsi Papua saya berkordinasi langsung dengan Pak Arif untuk situasi yang terdapat di Kabupaten Dogiyai pada saat Pleno, dan Bawaslu Provinsi Papua berkordinasi dengan Pak Muhammad untuk berkordinasi ... untuk mendapat petunjuk untuk menyelesaikan situasi yang dihadapi ketika itu juga.

180. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

181. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Dan ketika hasil yang saya kordinasikan dengan Pak Arif, Pak Arif menyatakan kepada kami bahwa kalian menunggu apa putusan Bawaslu.

182. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

183. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Dan setelah itu putusan Bawaslu kami skors 30 menit lalu ketua Bawaslu bilang "Panggil sama saya, saya ... " minta maaf, Yang Mulia, saya biasa dipanggil Mabet. "Mabet sini, saya sudah dapat solusi dari atasan saya di Jakarta." Lalu saya tanya, "Solusinya apa?", "Solusinya kita dis dua ini."

184. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Di-dis?

185. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Diminta untuk di-dis dua distrik. Hasilnya dari noken itu.

186. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, silakan.

187. BAWASLU: NASRULLAH

Jadi diluruskan. Perolehan kedua kandidat di Mapia Barat dan Mapia Tengah itu posisinya dinolkan.

188. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, dinolkan.

189. BAWASLU: NASRULLAH

Khusus untuk di distrik itu.

190. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, di distrik itu. Masing-masing nol, gitu? Jadi tidak dihitung kalau begitu? Oke.

191. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Begini, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu penyelesaiannya, ya?

193. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap, Yang Mulia.

194. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bagaimana sikap saksi?

195. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Sikap saksi (...)

196. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terutama yang mengajukan keberatan?

197. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Terhadap Saudara Yamin Muhammad dia berkata, "Mau dikatakan apa kalau memang itu caranya, kalau memang rakyat sudah bikin begitu, ya, begitu."

198. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

199. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Itu saksinya berkata.

200. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Seperti itu juga ya gayanya?

201. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Ya, tangannya begitu duduk lagi santai begini.

202. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

203. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Begitu. Lalu kita tanya si Yamin. Pak Dedi kami tanya, "Bagaimana? Saya yang bertanya.", "Kawan, bagaimana hasil ini?" Karena saya mendekati dia.

204. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

205. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kau setuju atau tidak. Dia bilang, "Ibu Beti, ya, sudah begitu saya tidak bisa bilang apa-apa, sudah dikasih begitu.", "Oh, ya, kalau sudah begitu ya kau bilang toh, kau yang bilang bukan saya yang bilang." Saya hanya tanya situasinya, ini bagaimana kalau sudah dikasih dis, begitu.

206. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

207. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Terima kasih, Yang Mulia.

208. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Masih ada.

209. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Oh.

210. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang terakhir adalah soal perbedaan jumlah dalam rekap, ini apa sudah termasuk yang saya tanyakan ini apa ada hal lain yang ingin Saudara terangkan?

211. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Sudah termasuk dua distrik.

212. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sudah termasuk tadi dua distrik. Dengan demikian keterangan Anda selesai, masih ada tambahan?

213. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap, Yang Mulia. Saya mau menambahkan.

214. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa itu?

215. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya mau menambahkan bahwa pada waktu masa rekap di provinsi kami KPU provinsi dalam memimpin Pleno kami tidak arogansi, kami memberikan banyak peluang, kesempatan. Jadi setiap kabupaten naik kami memberikan pertanyaan kepada saksi, Pasangan Nomor Urut 1

bagaimana tanggapan Saudara? Pasangan Nomor Urut 2 terhadap hasil rekap bagaimana tanggapan Saudara? Masing-masing memberikan tanggapan terkecuali 3 distrik tadi, eh, 3 kabupaten tadi.

Kemudian yang berikut adalah ketika kami tanya bagaimana ini hasil? Lalu Saudara Yamin mengatakan begini, "Ya, kami dari pasangan ..." Ini Saudara Yamin ini saksi dari Partai Gerindra.

216. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

217. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Dia mengatakan begini, "Ya, kami atas nama saksi apa kasus-kasus dan keadaan di sini nanti kami lapor dulu ke atasan kami di tingkat nasional."

218. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

219. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

"Kemudian setelah kami nanti lapor baru petunjuk selanjutnya bagaimana? Yang kedua kami memberikan penghargaan terhadap orang Papua yang sudah juga memberikan suara kepada pasangan calon kami walaupun sedikit, tapi kami menghargai daulatnya rakyat." Itu perkataannya Pak Yamin.

Saya tanya pada waktu menandatangani, "Mas, kau tanda tangan kah (suara tidak terdengar jelas)?" Mas ini, maksudnya Mas Mulyadi tadi yang kemarin bersaksi di sini.

220. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

221. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Dia bilang, "Ibu Beti, saya enggak tanda tangan. Saya pusing, saya ... entar ... nanti." Gitu.

"Oh, ya, Mas. Saya tidak memaksa," tapi saya tanya, "Apakah Saudara bersedia mau tanda tangan? Kalau tidak ya, tidak apa-apa, kami juga tidak bisa memaksa."

222. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Sekarang, apakah tidak tanda tangan sampai akhirnya dikirim ke tingkat pusat?

223. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Tidak ditandatangani sampai dikirim ke tingkat pusat, hanya ditandatangani oleh Pasangan Nomor Urut 2.

224. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apakah mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis?

225. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Ada, mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis.

226. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Isi keberatannya tentang tiga atau dua distrik tadi, atau ada yang lain?

227. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Isi keberatan dan dokumennya nanti dibacakan atau disaksikan oleh Bapak Ketua KPU Provinsi Papua karena (...)

228. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik, baik. Nanti saya tanya sendiri.

229. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kami sudah bagi tugas, Pak.

230. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, terima kasih atas keterangan Anda. Ya, silakan.

231. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saudara Saksi.

232. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap, Yang Mulia.

233. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ini berkaitan dengan permohonan Pemohon ya, kita ingin konfirmasi. Saudara sebagai penyelenggara di tingkat provinsi, kami ingin mengetahui apakah ada laporan dari penyelenggara di tingkat jajaran Saudara atau temuan-temuan dari Bawaslu atau panwas, maupun juga keberatan-keberatan dari para saksi bahwa apakah ada di wilayah Papua, di mana pun tempatnya yang tidak dilaksanakan pemilihan umum presiden ini. Silakan.

234. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Baik, Yang Mulia. Dari jajaran komisioner di tingkat kabupaten, bahkan PPD, PPS, tidak ada laporan yang ada keberatan atau tidak ada penyelenggara pemilu. Ketika kami berkoordinasi karena di KPU Provinsi Papua kami buat tim monitoring, pergerakan situasi coblos, dan hasil rekap, dan kami pantau tidak ada sama sekali keberatan dari kabupaten di ... tentang pencoblosan di 29 kabupaten di Provinsi Papua.

235. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Sebagai salah satu contoh saja misalnya, kami juga tidak tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya, ya.

236. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

237. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Kemarin, salah satu saksi namanya Novela.

238. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

239. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Yang lagi top sekarang ini.

240. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Terima kasih untuk topnya.

241. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Itu di persidangan ini mengatakan, di kampung dia itu tidak dilaksanakan pemilihan umum, itu salah satu. Kami minta konfirmasi dari Saudara bagaimana.

242. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Baik, Yang Mulia. Itu perkataannya sebagai orang di dalam partai. Tetapi sebagai penyelenggara saya di tingkat provinsi, yang saya monitoring dan mendapatkan data, itu dilaksanakan.

Jadi, kalau versi dia begitu, itu versi dia. Tapi saya menyatakan bahwa versi dia adalah versi yang salah atau tidak benar karena saya punya data dari penyelenggara, dilaksanakan.

243. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi di Kampung Awebutu itu dilaksanakan?

244. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Dilaksanakan menurut dari Ketua KPU Paniai dan nanti beliau yang menjelaskan, ada di di belakang, Bapak.

245. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

246. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

247. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Berarti dokumen perolehan suaranya ada?

248. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap, Bapak. Laporan dari Ketua KPU Paniai ada, Bapak.

249. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Berdasarkan pengetahuan Saudara, itu dilakukan dengan sistem adat atau secara langsung luber dan jurdil?

250. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kabupaten Paniai juga memilih adalah terdaf ... berada dalam 16 kabupaten di Provinsi Papua dari 29 Kabupaten yang menggunakan noken adalah 16 dan Paniai ada di dalamnya.

251. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, kalau (...)

252. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Dari kampung, dari atau kabupaten dari Nona atau Ibu Novela kemarin.

253. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, jadi kalau demikian itu diselenggarakan dengan sistem noken?

254. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap, Yang Mulia.

255. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Atau sistem adat lah, ya.

256. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

257. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, di persidangan ini ada dua hal yang berbeda antara satu saksi dengan penyelenggara. Enggak apa-apa, ini kami catat, nanti kami akan pelajari, terima kasih.

258. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Terima kasih.

259. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya tambahkan sedikit, jadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Patrialis. Tapi sebelumnya, Ibu Beatrix ini kenal Novela, enggak?

260. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Bapak, saya baru lihat dia muka baru kemarin di sini.

261. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, enggak kenal ya.

262. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Lalu dia berdialek seperti perempuan Jawa, padahal itu orang Papua Utara bicara seperti yang dia bicara.

263. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, gitu.

264. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kalau begitu ya, saya tidak tahu dia. Saya baru kenal kemarin.

265. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak kenal, ya berarti, ya?

266. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Tidak kenal, Bapak.

267. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya malah kenal itu.

268. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Oh, ya. Karena dia sudah berdialog dengan Bapak kemarin.

269. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Baik. Jangan serius-serius, Bu.

270. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap, Bapak.

271. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya mau tanya, apakah Saksi tahu semua saksi mandat dari Pasangan Nomor 1, semuanya ada di ... baik tingkat provinsi sampai ke tingkat TPS, ada enggak?

272. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Pertama-tama, Yang Mulia. Saya mau katakan, saya penyelenggara. Jadi ... di tingkat provinsi, jadi saya tidak berinterupsi atau interaksi langsung dengan para saksi di tingkat kabupaten sampai di tingkat bawah, itu dulu.

Yang kedua, untuk menjelaskan apakah ada saksi di tingkat Kabupaten Paniai yang seperti dikatakan, biarkan nanti ketua KPU (...)

273. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, kalau di tingkat provinsi ada, jelas, ya.

274. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Ada.

275. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian yang kedua. Apa Saksi tahu bahwa kemarin ada hal yang sangat menarik. Ada beberapa TPS atau banyak TPS yang perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 memperoleh 100%, ada?

276. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Untuk itu, Yang Mulia, saya membantah dan menolak. Karena tidak semua di kabupaten ... 29 kabupaten di provinsi (...)

277. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi ada yang 100%?

278. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Hanya Dogiyai, Bapak.

279. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hanya Dogiyai. Terus kemudian, apakah Pasangan Calon Nomor 1 juga ada yang memperoleh 100%?

280. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Diklarifikasi balik, Pak.

281. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

282. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Begini, Pasangan Nomor Urut 1 di satu kabupaten yang namanya Dogiyai, itu mendapat nol (...)

283. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nol.

284. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Atau kosong.

285. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

286. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Sedangkan 28 kabupaten lainnya di Provinsi Papua, nilainya sama atau berimbang.

287. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berimbang.

288. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Misalkan Yahukimo, ada sembilan distrik di Yahukimo, di sana yang Pasangan Nomor Urut 2 dapat nilai nol.

289. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ada juga (...)

290. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Ada.

291. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pasangan Nomor 2 (...)

292. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Pasangan Nomor Urut 2 mendapat nol.

293. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Juga nilai nol, juga ada, ya?

294. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Juga ada.

295. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih.

296. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kemudian, di Toli ... di (...)

297. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Masih ada daerah lain?

298. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Masih, masih ada.

299. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lanny Jaya?

300. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Di Lanny Jaya ada dua distrik yang juga Pasangan Nomor Urut 2=0. Sedangkan di 29 kabupaten di Papua, ada dua kabupaten yang Pasangan Nomor Urut 1 unggul.

301. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nol? Unggul malah?

302. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Ya.

303. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik. Terima kasih.

304. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Saksi, jumlah DPT untuk Provinsi Papua itu berapa?

305. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap, Yang Mulia. Kami sudah bagi tugas, nanti Ketua KPU Provinsi yang menjelaskan.

306. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Oh, begitu. Jadi, tidak hafal, ya?

307. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap. Jadi, saya tidak menjawab itu. Kalaupun ada di tangan saya, tapi kami sudah bagi tugas.

308. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Oh, begitu?

309. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap, Bapak.

310. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Wah, luar biasa. Baik. Honorinya lain ini kata Pak Fadlil. Kemudian, tadi dijelaskan bahwa yang bermasalah untuk Papua itu sekitar tiga kabupaten, ya? Tapi menurut dalil permohonan Pemohon, ini ada 14 kabupaten yang bermasalah di Papua.

311. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

14 (...)

312. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

14 kabupaten. Saksi tidak tahu, ya?

313. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Bermasalah apa, Pak?

314. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, pokoknya ada masalahlah, gitu. Nanti ada ... ada rincian di surat permohonannya. Saksi tahu, apa tidak? Gitu saja jawabannya.

315. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya tidak tahu, saya hanya tahu tiga, Pak.

316. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Cukup. Terima kasih.

317. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada tambahan lagi dari Prof. Aswanto.

318. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, sebagai komisioner KPU provinsi, ya?

319. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

320. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ibu di divisi mana?

321. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Divisi Teknik Penyelenggara Pemilu.

322. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Teknik Penyelenggara Pemilu. Saya tidak tahu, apakah ini juga bagiannya ketua atau bagian Saudara. Saya khawatir kalau saya tidak tanya, nanti ketua ... pada gilirannya ketua, ketua mengatakan, "Bagiannya Ibu Beatrix," ya. Saya ingin klarifikasi saja.

Tadi, menurut keterangan Ibu bahwa di Kabupaten Dogiyai itu karena ada masalah ketika ... ketika dilakukan rekap, terutama di Mapia Barat dan Mapia Tengah, akhirnya KPU berkonsultasi dengan atasannya, Bawaslu juga berkonsultasi dengan atasannya, lalu kemudian, berdasarkan hasil konsultasi itu, maka suara di Mapia Barat dan Mapia Tengah itu didiskualifikasi.

Artinya, tadi tidak dinilai, gitu? Pertanyaan saya, apakah menurut Saudara sebagai komisioner KPU, KPU punya kewenangan untuk mendiskualifikasi suara rakyat? Silakan.

323. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap, Yang Mulia.

324. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya.

325. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

KPU tidak punya kewenangan untuk mendiskualifikasi, yang menyatakan diskualifikasi adalah Bawaslu, bukan kami ... bukan kami.

326. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, sebentar, saya lanjutkan. Untuk dua distrik tadi, Mapia Tengah dan Mapia Barat (...)

327. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap, Yang Mulia.

328. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Atau nanti ke Pak Didimus Dogomo ini (...)

329. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

330. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ketua KPU Dogiyai. Tahu enggak, DPT untuk distrik itu, yang diskualifikasi itu berapa (...)

331. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap, Yang Mulia, nanti dikembalikan kepada Ketua KPU Dogiyai.

332. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jumlah suaranya, ya? Nanti tolong diingatkan nanti. Baik. Terima kasih.

333. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup. Ada yang satu, Prof. Maria.

334. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, tambahan. Untuk Distrik Mapia Tengah dan Barat, setelah ada Bawaslu, apakah Bawaslu tidak memberikan rekomendasi untuk PSU atau apakah tidak ada permohonan dari Pihak Pemohon untuk melakukan PSU di dua distrik itu?

335. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Informasi yang kami dapatkan dari KPU Kabupaten Dogiyai, nanti dijelaskan juga, ada surat dari panwas. Tetapi yang tadi saya sampaikan itu di level provinsi. Jadi, kalau dari ... dari panwas (...)

336. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Panwas.

337. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Nanti biarkan mereka yang menjelaskan. Tapi hasil konfirmasi kami dengan Kabupaten Dogiyai menyatakan ada.

338. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ada?

339. AKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

340. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Jadi, sampai tingkat provinsi itu tetap diskualifikasi atau sudah ada, sudah di (...)

341. AKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Diantar ke provinsi (...)

342. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Diantarnya ke provinsi?

343. AKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Ya. Karena (...)

344. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Sampai provinsi tetap didiskualifikasi?

345. AKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Di tingkat provinsi.

346. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Dinolkan, ya?

347. AKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Memang nol, memang hasilnya nol. Tapi, apakah nol itu di angka dari jumlah DPT di Mapia Tengah dan Mapia Barat itu di tambahkan karena di sana ada 10 distrik, apakah jumlah DPT di ... jumlah di Dogiyai, Mapia Timur, Mapia Tengah, dan Mapia Barat itu digabungkan pada waktu kami Pleno, kami Pleno menyatakan 29 kabupaten minus ... minus 2 distrik di ... distrik di Mapia Timur dan Mapia ... eh, Mapia Tengah dan Mapia Barat itu kami nyatakan minus.

Lalu kemudian, kami bawa ke tingkat nasional dan ketika kami rekap di tingkat nasional, lalu kami angkat ini kasus ini di tingkat nasional, lalu di tingkat nasionalah Ketua Bawaslu Republik Indonesia yang menyatakan diskualifikasi untuk 2 distrik itu (...)

348. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Diskualifikasi, oke.

349. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Jadi, kami di KPU Provinsi Papua tidak (...)

350. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Tidak.

351. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Mengintervensi atau menyatakan dis.

352. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, jadi sampai tingkat nasional tetap diskualifikasi, ya?

353. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

354. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

355. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang Mulia, Pak Alim.

356. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Saya lagi Saudara Saksi, sebelum saya teruskan saya pernah tugas menjadi ketua pengadilan di Serui 4 tahun, dan di Wamena 2 tahun.

357. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Terima kasih, Bapak, pengabdiannya.

358. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ya. Jadi begini, sebagai orang yang di ... apa ... penyelenggara di provinsi, adakah laporan yang Anda terima karena itu kan 2 macam, kalau laporan bersifat administrasi diselesaikan di KPU, kalau bersifat pidana itu diselesaikan di Gakkumdu, kan begitu dan seterusnya. Adakah laporan yang Saudara terima ... eh, yang diterima oleh KPU provinsi mengenai penyelenggaraan dari seluruh ... apa ... seluruh wilayah Provinsi Papua itu?

359. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap, Pak. Untuk kegiatan yang apa? Pileg atau Pilpres?

360. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pilpres. Kan, kita sekarang pilpres.

361. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Oh, kami tidak dapat laporan apa-apa.

362. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Oh, tidak ada. Oke.

363. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

364. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Oke. Dengan demikian, berarti ... saya sambung per ... jawabannya, berarti tidak ada yang diajukan sebagai tindak pidana di sana, di wilayah sana dalam pilpres ini?

365. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap, tidak ada.

366. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Tidak ada.

367. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Dan kami tidak punya informasi, Pak, untuk ini (...)

368. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Enggak, kan saya tanya saja, jangan katakan yang tidak diketahui.

369. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Yang tidak tahu.

370. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Kan yang tidak ... yang diketahui saja. Tidak ada, kan begitu.

371. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Hormat, terima kasih, Bapak.

372. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

373. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pak Fadlil, ada tambahan sedikit, Pak Fadlil. Saudara Saksi, kita ingin konfirmasi lagi, kemarin dari saksi Pemohon itu antara lain menyatakan di beberapa di kabupaten/kota yang memang dilaksanakan

pemilunya, tetapi rekapitulasinya itu dilakukan di tingkat kabupaten. Apa Saudara pernah dapat informasi itu?

374. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya mendapat informasi untuk Keerom (...)

375. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Keerom?

376. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Yang direkapnya di tingkat kabupaten. Nanti untuk menjelaskan alasan mengapa direkap di tingkat kabupaten, ada saksi dari Kabupaten Keerom.

377. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Selain di Keerom, masih ada yang lain? Yang Saudara ketahui? Ingat-ingat, pelan-pelan.

378. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Dengar-dengar, pelan-pelan hanya Keerom, Bapak. Yang kuat-kuat tidak ada, Bapak.

379. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tidak ada, ya? Baik, baik, terima kasih, terima kasih.

380. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Anda sudah boleh duduk, terima kasih keterangan Anda.

381. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Terima kasih untuk Majelis, seluruh Majelis Hakim Yang Mulia, terima kasih, saya undur diri dari depan.

382. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang berikutnya, Saudara Didimus Dogomo, silakan. Saudara Didimus Dogomo, tempat tanggal lahir Saudara di Kimupugi, 30 bulan 6 tahun 1978, benar?

383. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Benar.

384. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Beragama Kristen, tinggal di Kimupugi sebagai ketua KPU Kabupaten Dogiyai?

385. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Benar, Yang Mulia.

386. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara oleh Termohon diminta menjelaskan 2 hal: pertama, soal pelaksanaan rekap, dan yang kedua, soal logistik. Silakan, dimulai dari soal rekap di Kabupaten Dogiyai.

387. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Mengenai soal rekap.

388. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

389. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Dilaksanakan di tingkatan (...)

390. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kabupaten?

391. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Kabupaten.

392. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

393. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Itu dilaksanakan secara terbuka.

394. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tanggal berapa?

395. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Tanggal 17, pukul 15.00 sampai pukul 18.30 WIT.

396. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pukul 15.00 sampai pukul 18.30, ya?

397. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Sebelum rekap.

398. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

399. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Saya memberikan kesempatan kepada pihak pejabat setempat, Asisten I Pak Bupati untuk memberikan pemahaman mengenai politik, sebab bupati sebagai pembina politik saya memberikan kesempatan sejak pukul 11.00 sampai pukul 12.00 WIT.

Ternyata di dalam pemberian itu, sela ... bupati memaksa agar supaya kepada rakyat Dogiyai di aula pemerintah agar supaya suara ... apabila suara dikasih kepada Prabowo, ada uang. Kalau saya hanya menjelaskan Vincent punya omongan kemarin.

Jadi, kalau suara tidak dikasih kepada Prabowo, tidak ada uang. Akhirnya masyarakat marah, masyarakat marah karena di dalam itu perkataan bupati ada muatan dan masyarakat marah bahwa jejak-jejak kaki masih melekat. Seperti itu, Pak, sehingga bupati marah (...)

400. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebentar, sebentar. Saya mau tanya, Saudara memberi kesempatan kepada bupati dan Asisten I memberikan sambutan. Memang itu ada acaranya yang lazim begitu untuk rapat rekapitulasi?

401. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Itu atas permintaan bupati.

402. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara kan, kalau itu tidak ada acara yang seperti itu, bisa menolak? Kenapa Saudara tidak menolak?

403. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Karena alasannya itu bupati meminta saya waktu untuk memberikan sambutan-sambutan dalam hal sebelum Pleno dan memberikan pemahaman politik katanya, dari Jayapura telepon saya. Dan (...)

404. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi ... sebentar, saya ingin jelas di sini. Sebelum Pleno, itu artinya sebelum acara sidang rekap itu secara resmi dimulai, maksudnya?

405. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Sebelum, Pak.

406. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Jadi, ini di luar rapat rekapitulasi?

407. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Di luar dari itu, Pak.

408. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Sekarang yang kedua, pertanyaan kedua.
Bupati tadi mengatakan yang istilahnya Saudara mengarahkan tadi, *kalau memilih Prabowo uang, kalau tidak, ndak ada uang*, lalu rakyat marah. Rakyat yang ada di sidang Pleno, apa rakyat yang di luar sidang Pleno?

409. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Di dalam sidang Pleno ruangan, termasuk di luar, mengamuk.

410. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, mengamuk. Mengamuknya bagaimana?

411. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Mengamuknya berontak kiri-kanan. Ini suara rakyat Dogiyai. Kami sudah kasih, kami tidak membutuhkan uang.

412. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, begitu. Oke. Lalu, rapat bisa dimulai setelah bupati pidato, rakyat marah dan marahnya selesai tentunya, ya?

413. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Marah selesai. Pada saat marah itu, bupati dan Asisten II meninggalkan tempat, entah ke mana, tidak tahu. Rakyat marah ke luar dan tidak mau kasih rekapan. Pada pukul 15.00 sore (...)

414. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebentar, sebentar. Kok tidak mau kasih rekapan? Bukannya yang kasih rekapan itu PPD di bawah Saudara?

415. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Yang jelas ... PPD di bawah rekapan pada saat itu, yang jelas hanya satu persoalan. Ongkos pengangkutan logistik belum dibayar, sehingga masih ditahan di tangan TPS-TPS.

416. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em. Jadi, Saudara ingin mengatakan tanggal 17 pukul 15.00 itu yang direkap mana saja?

417. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Pada jam ... hampir 10 distrik.

418. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

10 distrik. 10 distrik sudah bisa direkap mulai tanggal 15 ... pukul 15.00?

419. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Pukul 15.00.

420. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, saya mau tanya. Seluruh Dogiyai ada berapa distrik?

421. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

10.

422. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

10. 10 sudah direkap? Kalau begitu sudah seluruhnya, dong?

423. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Seluruhnya sudah direkap.

424. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Katanya enggak mau tadi? Penjelasannya bagaimana?

425. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Maksudnya, setelah itu saya sendiri duduk santai. Seorang gembala pukul 15.00 ... tepat pukul 15.00 itu berteriak lihat saya, pendeta. Setelah pendeta itu berteriak, kita punya ketua KPU terbaik sedang merenung, dia sedang derit. Apa pun kita tidak mengutamakan uang, bawa rekap. Berteriak di depan aula dan semua rakyat itu kembali memberikan.

426. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Artinya, setelah ditenangkan oleh pendeta, lalu para PPD itu menyerahkan rekap dan selesai itu 10 dari PPD itu, ya?

427. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Semua rekap.

428. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada hal lain yang ingin Saudara jelaskan soal rekap itu yang akhirnya ada soal yang di ... diskualifikasi apa tidak itu, diskualifikasi itu?

429. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMMO

Pada saat itu PPD, PPS dengan catatan mereka meminta di pembacaan langsung oleh PPD-PPD di luar, jangan di aula pemerintah. Itu yang mereka minta.

430. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

431. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Dan mereka bawa keluar kursinya. Bukan sesuai dengan pembicaraan Vincent. Itu saya bantah. Rakyat sendiri yang bawa keluar meja, meminta. Bukan ketua Hanura atau ini yang suruh bawa keluar, tidak benar.

432. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Itu kaitannya dengan Vincent (...)

433. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Yang tadi Vincent itu kemarin.

434. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Masih ada hal yang ingin Saudara jelaskan?

435. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Ada lagi, Yang Mulia.

436. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa? Soal rekap, ya? Ini masih (...)

437. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Soal rekap.

438. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, apa itu?

439. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Setelah dibacakan semua, itu pribadi, kami memberikan kesempatan kepada setiap pihak atas keberatan-keberatannya.

440. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

441. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Ternyata tidak ada keberatan-keberatan pada saat kami rekap.

442. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Di ... secara tertulis pun tidak ada?

443. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Tertulis pun hanya pada saat itu, Panwas Kabupaten Dogiyai itu ada meminta kepada kami KPU agar dua kecamatan itu direkap ulang. Katanya pandangan dia itu bahwa tidak terjadi pemilihan, padahal panwaslu itu pada hari H tanggal 9 kami sama-sama di Kabupaten Dogiyai di kantor saya.

444. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terus karena ada pendapat panwas yang begitu, diulang lagi apa tidak?

445. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Saya tidak ulang karena kesediaan logistik. Jarak yang harus ditempuh mencapai 1 minggu-2 minggu. Yang di bagian selatan di Sukigai itu 2 minggu, di sini 1 minggu. Lima hari, Pak.

446. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sehingga tidak diulang?

447. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Tidak bisa ulang karena kesediaan logistik hanya 1.000, sementara saya membutuhkan adalah sebesar 18.022.

448. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, saya lanjut ini kalau begitu. Apakah rekap Saudara ini ketika sidang rekap di provinsi diterima juga?

449. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Saya ... memang itu saya hanya ini, atas rekomendasi Bawaslu itu saya tidak tahu. Pada saat direkap di provinsi itu keberatannya disampaikan oleh Bawaslu. Jadi, saya hanya katakan, "Rakyat Dogiyai sudah memberikan suara 2 distrik tetapi yang berani membatalkan adalah Bawaslu provinsi."

450. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, jadi keberatan itu muncul di sidang provinsi?

451. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Tingkat provinsi.

452. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup?

453. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Baik, Yang Mulia.

454. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sekarang yang kedua, soal menjelang ... menjelaskan tentang logistik pemilu. Bagaimana itu, apa yang ingin Saudara terangkan soal logistik itu?

455. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Logistik sesuai dengan Ibu Beti sudah berjalan ... sesuai dengan pembicaraan Ibu Beti sudah berjalan dan jelas. Sudah berjalan sampai ... saya hanya terbuka di sini. Pada saat itu, logistik bagian ke bawahnya

pribadi saya, saya tidak tahu seperti apa yang dilakukan oleh KPPS, PPS.
Terima kasih.

456. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke. Tadi, Saudara menjelaskan kaitannya logistik yang adanya sekian padahal Saudara memerlukan 18.000 itu maksudnya bagaimana?

457. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Maksudnya dua kecamatan yang meminta oleh pihak Bawaslu ...
panwas kabupaten untuk melakukan ulang.

458. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ulangan.

459. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Nah, itu apakah logistik.

460. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, logistik untuk ulangan itu yang tidak ada?

461. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Tidak cukup hanya cadangan 1.000, Pak.

462. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Cukup kalau begitu.

463. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Terima kasih banyak.

464. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih, ya. Hakim yang lain, silakan.

465. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saudara Saksi, ingin satu ketegasan tentang masalah bupati tadi. Bupati itu diusir atau memang meninggalkan tempat karena diprotes?

466. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Bukan diusir, saya bantah. Dia kemarin menyatakan diusir, tidak benar. Kata yang dikeluarkan oleh ... memaksa kepada rakyat suaranya dikumpul depan saya berdiri di sini sebagai ketua KPU. Suaranya dikasih kepada Prabowo. Kalau kasih Prabowo ada uang, kalau tidak kasih Prabowo tidak ada uang.

467. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ini tadi ditanya oleh Pak Ahmad Fadlil ada dua suasana. Suasana di luar penyelenggaraan rekapitulasi dan yang kedua adalah suasana dalam penyelenggaraan rekapitulasi. Betul, ya? Ada dua suasana tadi, ya? Bupati ini bicara tadi Saudara katakan di luar rekapitulasi.

468. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Yang Mulia, bupati itu ... kehadiran bupati itu karena pengangkutan dana logistik ... dana-dana operasional belum dibayar, sehingga selama satu minggu itu kami proses berjalan.

469. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Pertanyaannya, bupati itu bicara waktu rekapitulasi apa di luar rekapitulasi?

470. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Bukan, pada saat itu PPD tidak mau kasih hasil rekapan, sehingga kami datang ... saya meminta kepada Asisten II ... mendatangkan bupati untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Seperti itu, Pak.

471. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Baik. Tadi, Saudara gambarkan, tentu kita juga paham bahwa kondisi Dogiyai yang begitu sulit untuk ditempuh menyebarkan logistik, betul ya?

472. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Benar, Yang Mulia.

473. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, ada bayangan sampai 5 hari. Sudah terbayang sama kita. Pertanyaannya, apakah ada sepengetahuan Saudara ataupun laporan dari PPK atau jajaran Saudara, ada logistik yang tidak sampai ke TPS-TPS? Karena memang kemarin ada informasi seperti itu.

474. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Itu tidak sampai, tidak benar. Sudah sampai. Saya hanya ada di kabupaten, mereka sudah sampai dan sudah melakukan hak memilihnya.

475. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, semua logistik menurut Saudara, sampai ke TPS-TPS?

476. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Saya pikir sampai, Pak, sudah sampai. Jadi, orang katakan tidak sampai itu tidak benar. PPD, PPS, KPPS (...)

477. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, jangan ... jangan Saudara pikir, tapi betul-betul sudah sampai.

478. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bisa jamin itu, ya?

479. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Bisa.

480. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik. Di semua TPS-TPS yang sudah sampai logistik itu, apakah ada laporan kepada Saudara ada tempat-tempat yang tidak dilaksanakan pemilihan umum?

481. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Itu tidak pernah disampaikan. Tapi pada saat tanggal 15, surat yang menyatakan oleh ... surat dari Bawaslu bahwa dua panwaslu, dua kabupaten dilakukan pemilihan ulang karena tidak sampai. Dan masuk di tangan saya, tanggal 16 jam 19.00 malam di kantor KPU.

482. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Desa Awabutu itu di lingkungan Dege?

483. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Itu di Paniai, Yang Mulia.

484. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oh, Paniai, ya. Oke, cukup terima kasih.

485. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada satu lagi dari Yang Mulia Hakim Anwar.

486. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Saksi minta penegasan, pernyataan bupati tadi yang menyatakan bahwa kalau suara tidak dikasih ke Prabowo, tidak ada uang, itu uang apa sebenarnya?

487. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Buk ... kami tidak tahu, pada saat itu adalah seorang ... maksudnya Pak Sekretaris KPU tidak bisa menyelesaikan masalah dana operasional dengan penyangkutan logistik.

488. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Oh jadi dengan dana operasional ya? (...)

489. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Pada saat itu mereka meminta tanah hibah kalau apabila dicalirkan, tetapi kata bupati, "Kalau ada kasih-kasih suara Prabowo, berarti ada uang. Kalau tidak dikasih Prabowo, berarti tidak ada uang." Akhirnya masyarakat marah, dan Bapak Bupati, "Tinggalkan tempat!

Keluar!" Seperti itu. Sambil membenarkan (suara tidak terdengar jelas) kemarin.

490. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Jadi uang itu, uang operasional gitu ya maksudnya? Dana operasional KPU.

491. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Dana hibah yang mereka tuntutan karena APBN tidak ada.

492. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih.

493. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Selanjutnya.

494. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi ya Didimus Dogommo.

495. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Benar, Yang Mulia.

496. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kakak tidak usah keras-keras ya, kita pelan-pelan saja ya.

497. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Baik.

498. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ketika rekap di provinsi, Saudara hadir?

499. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Saya hadir dan saya membacakan.

500. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Apakah Saudara tidak mengetahui atau mengetahui ketika ada kebijakan bahwa suara di dua Distrik yaitu Mapia Barat dan Mapia Tengah dinyatakan diskualifikasi, yang sebelumnya kalau menurut keterangan kemarin di Dogia ... di Mapia Barat itu 6.828 suara untuk Nomor Urut 2.

Lalu di Mapia Tengah, itu 11.194. Ketika itu didiskualifikasi, apakah tidak ada keberatan dari tim sukses atau Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2?

501. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Bagian itu, saya ... pribadi saya, saya sudah tahu, sudah tingkatan provinsi. Jadi di sini, saya hanya mau tegaskan hanya rakyat Dogiyai meminta kepada Bawaslu provinsi, Bawaslu pusat sedang telepon saya, rakyat Dogiyai yang diberikan sekian, 18.000 sekian, sekian ... 18.022 suara yang dihilangkan dua distrik, itu mereka meminta. Sebab rakyat merasa sudah memberikan hak suaranya, sehingga disuruh Bawaslu provinsi bersama Bawaslu pusat bertanggung jawab. Kalau tidak datang sendiri, dia jalankan sampai di tempat baru memberikan penjelasan kenapa didisk. Itu yang mereka sudah tunggu.

502. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, apakah Saudara mengetahui bahwa setelah ada dis tadi, masyarakat yang jumlahnya begitu banyak yang sudah memberi suara itu menerima begitu saja atau marah? Karena suaranya dinyatakan tidak (...)

503. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Mereka meminta agar supaya Bawaslu provinsi, Bawaslu pusat itu masyarakat sudah merasa memberikan suaranya itu (...)

504. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Jadi mereka (...)

505. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Sehingga mereka minta Bawaslu pusat dengan Bawaslu ... datang jalan kaki ke tempat itu untuk memberikan pemahaman.

506. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Betul.

507. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Tidak ada surat tertulis buat Rakyat Dogiyai dua kecamatan itu sampai saat ini.

508. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, cukup ya. Saudara bisa pelan-pelan juga kan. Itu pelan-pelan saja, ya. Terima kasih.

509. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Terima kasih, Pak Yang Mulia.

510. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih Saudara Didimus, keterangan Anda cukup.

511. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Terima kasih, Pak.

512. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan duduk, sekarang gantian dengan Saudara Iman H. Keliwar, S.Sos. Saudara Iman, Saudara tempat tanggal lahir Saudara Maluku Tengah, 27 Januari 1975, benar?

513. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Benar.

514. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara beragama Kristen, tinggal di (...)

515. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Salah, Pak. Minta maaf, agama Islam.

516. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Agama Islam.

517. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Ya, itu salah penulisan di situ.

518. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nah ini Saudara Kuasa ini kurang tepat menulisnya, dikoreksi yang bersangkutan. Saudara tinggal di Mararena RT 003?

519. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Benar, Yang Mulia.

520. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sarmi, ya?

521. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Benar.

522. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara diminta untuk menjelaskan banyak poin ini, sampai 8 poin. Tapi supaya dapat diingat, satu-satu saja, saya akan mulai satu-satu. Satu, soal pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sarmi dan rekapnya di Sarmi, silakan.

523. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Baik, Yang Mulia.

524. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan.

525. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Assalamualaikum wr. wb.

526. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Walaikumsalam wr. wb.

527. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Hadirin yang saya hormati. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan ... izinkanlah saya untuk menyampaikan (...)

528. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Eggak, enggak, sebentar. Ini karena bukan pidato jadi anu (...)

529. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Baik, baik (...)

530. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Langsung saja, pertanyaan saya tadi dijawab. Bagaimana pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sarmi dan rekapnya? Itu saja dulu. Karena ini ada delapan poin, nanti Anda lupa. Silakan.

531. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan rekap rekapitulasi (...)

532. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pelaksanaan pemilunya dulu.

533. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sarmi mulai dari tahapan yang berjalan di Kabupaten Sarmi sepenuhnya berjalan dengan baik, tidak ada hambatan sampai dengan Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, bahkan kabupaten pun semua berjalan dengan baik, Yang Mulia.

534. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, saya tanya kalau begitu. Pelaksanaan pemilunya di sana termasuk yang noken, atau ikat itu, atau yang coblos?

535. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Tidak, Yang Mulia, coblos.

536. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Coblos, oke. Pasti, ya. Kemudian rekapnya bisa Saudara ceritakan berapa Pasangan 1, berapa Pasangan 2 dapat suara?

537. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Baik, Yang Mulia. Mohon izin sebentar, saya lihat dulu hasilnya.

538. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan, silakan. Ini soal penting ini perolehan suara ini.

539. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Siap. Izin, Yang Mulia, saya akan bacakan, mungkin saya bacakan secara rinci, kemudian nanti hasilnya akan berikut. Pertama (...)

540. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

DPT, mulai dari DPT.

541. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Ya, kita mulai dengan DPT.

542. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, DPT berapa ini (...)

543. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih (DPT), laki-laki=14.757. Kemudian perempuan=11.891.

544. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jumlah?

545. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Jumlah 26.648.

546. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebentar, di sini jumlahnya kok 26.248. Yang betul yang mana?

547. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Yang betul 26.648.

548. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

26.648?

549. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

26.648, ya.

550. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Apakah di sana ada daftar pemilih tambahan?

551. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Ada, nanti saya akan bacakan semuanya, Pak.

552. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, oke. Kalau dipotong-potong susah, ya. Baca saja di situ.

553. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Ya, saya bacakan.

554. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, saya mendengarkan baik-baik.

555. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Ya.

556. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan.

557. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), perempuan=9.

558. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tadi sudah.

559. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Oh, enggak yang tadi itu DPT, Pak, yang jumlah pemilih (...)

560. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

DPT (...)

561. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

DPT (...)

562. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pemilih tambahannya sekarang.

563. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Pemilih tambahannya sekarang.

564. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, dimulai.

565. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Jumlah pemilih terdaftar dalam pemilih tambahan, perempuan=9 ... laki-laki=15, perempuan=9, jumlah 24.

Yang kedua, pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), laki-laki kosong, perempuan kosong, jumlah kosong.

Ketiga. Pemilih khusus tambahan (DPKTB) pengguna KTP atau identitas lainnya, laki-laki=45, perempuan=43, jumlah 88.

Lima, jumlah pemilih tambahan, satu tambah dua tambah tiga tambah empat, laki-laki=14.817, perempuan=11.943, jumlah 26.760.

Pengguna hak pilih ... pengguna hak pilih dalam DPT, laki-laki=10.169, perempuan=8.362, jumlah 18.531.

Pengguna hak pilih dalam DPTB pemilih dari TPS lain, laki-laki=15, perempuan=9, jumlah 24.

Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), laki-laki kosong, perempuan kosong, jumlah kosong.

Lima. Jumlah seluruh pengguna hak pilih, satu tambah dua tambah tiga tambah empat, laki-laki=10.229, perempuan=8.404, jumlah 18.633.

Data pengguna surat suara. Jumlah surat suara termasuk cadangan 2% ditambah 3 ditambah 4. 27.181. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos=57. Jumlah surat suara yang tidak terpakai=8.491. Jumlah surat suara yang digunakan=18.633. Data surat suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah=17.681. Jumlah suara tidak sah=952. Jumlah suara sah dan tidak sah=18.633. Rincian jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Prabowo Subianto-Ir.H. Muhammad Hatta Rajasa)=4.586. Saya ulangi, perolehan suara sah Pasangan Calon H. Prabowo Subianto-Ir. Hatta Rajasa=4.586.

Nomor Urut 2 Pasangan Calon Presiden Ir. Joko Widodo-Drs. Muhammad Jusuf Kalla=13.095. Jumlah suara sah Calon Presiden dan Wakil Presiden (...)

566. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tadi kan sudah.

567. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Enggak, ini suara sah dari keseluruhan calon, Pak.

568. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, keseluruhan ya?

569. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Ya. Tadi itu rinciannya, dari jumlah suara sah dari (...)

570. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nomor 1 dan Nomor 2 dijumlah begitu?

571. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Ya.

572. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Enggak usah dijumlahlah, itu sebenarnya begini maksud saya itu sebenarnya sejak tadi, saya itu ingin kalau yang bisa dibuktikan dengan dokumen tertulis ya sudah selesai. Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh dokumen tertulis seperti poin 7 di sini, bagaimana soal pencoblosan di media kok disebutkan oleh petugas, tapi faktanya di situ seperti apa? Itu kan tidak ada di sini. Itu, itu yang diminta untuk dijelaskan sebenarnya. Silakan dijelaskan yang itu? Kalau itu kan tertulis Termohon sudah menyampaikan dokumen itu. Silakan, yang terakhir, pertanyaan terakhir ini, apa?

573. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Izin, Yang Mulia. Diulang lagi pertanyaannya?

574. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Aduh ini, boleh enggak apa-apa. Oleh media disebutkan Saudara ... di tempat Saudara itu ada pencoblosan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di daerah Sarmi.

575. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Izin, Yang Mulia. Kami keberatan, info itu tidak benar.

576. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, tidak benar. Jadi apakah oleh karena media menyebutkan begitu ketika rekap Saudara di tingkat Sarmi itu ada saksi-saksi yang keberatan?

577. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Baik, Yang Mulia. Pleno tingkat kecamatan sampai kabupaten tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon baik Nomor Urut 1 maupun Nomor Urut 2.

578. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baik lisan maupun tertulis?

579. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Izin, Yang Mulia. Tidak ada.

580. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau saksi tidak ada, apakah ada protes-protes oleh masyarakat?

581. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Oleh masyarakat pun tidak ada.

582. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kejadian-kejadian khusus yang lain?

583. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Kejadian khusus lain pun tidak ada.

584. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, oke. Saya ini meneruskan pertanyaan Yang Mulia Hakim Muhammad Alim, apakah bisa Saudara sebutkan siapa yang hadir ketika rekap itu?

585. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Izin, Yang Mulia. Rekap kecamatan apa kabupaten?

586. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kabupaten, Saudara kan (...)

587. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Kabupaten, oke. Kabupaten yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh lima komisioner, kemudian Bawaslu, kapolres setempat, dandim, kesbangpol, bahkan seluruh saksi dari kedua pasangan calon, kemudian PPD dan PPS.

588. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, cukup. Saudara ingat nama saksi siapa untuk Pasangan 1 siapa? Pasangan 2 siapa?

589. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Izin, Yang Mulia. Yang hanya saya tahu satu, yang satu dari Partai Nasdem, Pak Muzakar.

590. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pak Muzakar.

591. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Yang satunya memang saya belum tahu namanya.

592. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, enggak tahu namanya. Atau enggak ingat barangkali? Saudara enggak kenal?

593. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Enggak kenal.

594. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kenal juga enggak, ingat apalagi. Cukup, ya? Cukup?

595. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Cukup.

596. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih keterangan Saudara. Sekarang saya lanjutkan ... sudah terima kasih itu artinya Anda sudah boleh duduk.

597. SAKSI DARI TERMOHON: IMAN H. KELIWAR

Izin, Yang Mulia. Saya kira masih dapat yang lain.

598. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, sekarang Saudara Yermias Numberi. Silakan untuk ke depan pakai mik. Saya cek dulu Saudara Yermias, Saudara tempat, tanggal lahir, Serui, 20 Juni Tahun 1958, benar?

599. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Benar, Yang Mulia.

600. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Beragama Kristen, tinggal di BTN Skyline, blok D, 110?

601. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

110, Kotaraja, Distrik Abepura, Jayapura.

602. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Abepura, ya. Saudara ketua KPU yang tadi disebut-sebut oleh Beatrix, ya?

603. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Ketua KPU Kota Jayapura.

604. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kota Jayapura, bukan (...)

605. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Bukan provinsi.

606. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bukan provinsinya, ya?

607. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Ya.

608. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Mau menjelaskan apa soal Jayapura kalau Termohon sendiri meminta Saudara tiga poin. Pertama, soal pelaksanaan rekap di tingkat kota, ada hal yang spesifik yang ingin Saudara jelaskan?

609. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Ya, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kota, kami laksanakan pada tanggal 16.

610. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

16, ya.

611. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Catatan khusus yang terjadi bahwa saksi dari Pasangan Nomor Urut 1, tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi.

612. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, itu yang khusus, ya, yang spesifik.

613. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Saya tanyakan langsung, saya turun langsung ketemu, dibilang atas perintah atasan, sudah saya diam saja.

614. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Jadi, alasan dia, atas perintah atasan.

SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Kemudian karena dia sampaikan tentang keberatan yang di ... dibuat ketika terjadi pemungutan suara di TPS 16.

615. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

TPS 16, di kelurahan apa?

616. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan.

617. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Soal apa keberatan itu?

618. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Tentang saksi calon tidak diizinkan masuk.

619. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak diizinkan masuk.

620. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Ya.

621. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tapi, ada saksi calon yang lain?

622. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Ada.

623. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Misalnya kan ... itu kan pasangan dua, berarti dua itu, satu dan dua sudah ada, terus ada lagi yang mau masuk, atau tidak ada sama sekali, Anda melarang masuk (...)

624. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Jadi, begini, Yang Mulia. Jadi, begini, Yang Mulia.

625. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Gimana, gimana?

626. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 datangnya itu setengah ... jam 11.00 lewat, maaf, jam 11.00 lewat, ketika pemungutan suara harusnya dimulai dari jam 07.00, berdasarkan aturan, tapi karena tidak ada, ditunda setengah jam. Pasangan ... Saksi Pasangan Calon Nomor 1

dan 2 juga tidak ada, akhirnya dimulai acara pemungutan suara tersebut.

627. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

628. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Nah, dilaksanakan sampai dengan jam 10.30, saksi baru datang. Jadi, dia melihat bahwa sudah selesai, dia pulang.

629. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

630. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Jadi, tidak masuk, jadi, bukan diizinkan masuk.

631. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, bukan karena tidak diizinkan, tapi karena melihat sudah selesai lalu dia kembali?

632. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Ya. Kemudian (...)

633. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dua-duanya itu?

634. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Ya.

635. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saksi satu maupun saksi Pasangan 2?

636. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Karena di TPS 16 tidak ada pemilih yang terdaftar dalam DPK atau ... dan DPKTB, sehingga mereka tidak menunggu sampai jam 1. Jadi, dilaksanakan.

637. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, gitu.

638. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Itu yang di ... apa ... dibuat dalam keberatan. Tetapi, tidak dimunculkan pada tingkat PPS. Di tingkat PPS, saksi dari kosong ... Pasangan Nomor Urut 1, Gusmawati Guntur, tidak mempersoalkan itu, hanya menyampaikan bahwa (...)

639. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebentar, sebentar. Saudara cerita tidak ada pengajuan keberatan di PPS, bagaimana dengan di TPS?

640. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

TPS juga tidak.

641. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak.

642. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Karena dia pulang, begitu.

643. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, dia pulang, dihitung, tidak ada dia, dan tidak mengajukan keberatan. Di sidang PPS juga tidak ada keberatan. Baru ada keberatan di tingkat?

644. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Disampaikan di tingkat KPU.

645. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

KPU. KPU kabupaten ... anu ... kota maksudnya?

646. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Tetapi, tidak masuk ... tidak disampaikan ke panwas, sehingga saya juga tanyakan panwas, tidak ada keberatan. Itu yang terjadi di Pleno rekapitulasi di tingkat kota.

647. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Artinya, panwas menganggap itu selesai?

648. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Selesai.

649. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Enggak ada masalah?

650. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Enggak ada masalah.

651. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Berarti ... apa namanya ... rekap di tingkat kota selesai?

652. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Ya, Pak.

653. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Bisa Saudara jelaskan, siapa yang menang di Kota Jayapura?

654. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Baik, terima kasih. Untuk Kota Jayapura, perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1=69.220.

655. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

656. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, tadi pertama, Pasangan Calon Nomor Urut 2=96.780.

657. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Lalu, itu sudah selesai, ya, soal rekap. Ada hal khusus tadi yang ingin Saudara jelaskan. Kalau lain-lainnya kan dijelaskan oleh dokumen itu. Siapa yang hadir dan seterusnya.

Sekarang yang kedua, Saudara diminta untuk menjelaskan TPS 14, TPS 24, TPS ... yang sebenarnya TPS 23 itu.

658. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Ya, betul.

659. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kemudian, soal Pemohon menang dengan perolehan 332 dan Pasangan Nomor 2=290. Itu apa hal yang ingin Saudara jelaskan?

660. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Baik, Yang Mulia. Dalam dalil Pemohon, dikatakan bahwa TPS 14, TPS 16, dan TPS 23, tapi kemarin disebut 24, jadi saya ingin ketegasan, TPS 23 atau TPS 24?

661. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang pasti (...)

662. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Kalau TPS 24, saya akan tidak jelaskan karena dalil yang masuk dan kami baca adalah TPS 23.

663. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

664. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Baik, saya teruskan.

665. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau TPS 23, mau jelaskan?

666. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Tiga-tiganya?

667. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bukan, kalau 24 Anda enggak akan menjelaskan karena tidak didalilkan, sekarang TPS 23?

668. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

TPS 23, siap.

669. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

670. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Yang dikatakan bahwa TPS 23 itu, Pasangan Nomor Urut 1, Calon Nomor Urut 1 tidak mendapat suara.

671. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak mendapat suara.

672. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Tetapi fakta rekapitulasi bahwa ada suara untuk Pasangan Nomor Urut 1. Saya bacakan di sini, mohon izin.

673. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, sebentar! Ini kurang anu ... apa namanya ... keterangannya. TPS 14, TPS 24, atau 23 itu di kelurahan mana itu?

674. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan.

675. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kelurahan apa tadi?

676. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Entrop.

677. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Entrop, ya. Oke. Soalnya ... apa karena susah mengejanya itu enggak ditulis di sini. Terus? Silakan teruskan.

678. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Untuk TPS 23 (...)

679. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tadi sudah, 0, tapi ada suaranya.

680. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Ada suara, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1=332. Pasangan Calon Nomor Urut 2=290. Jadi, tidak benar bahwa Pasangan Nomor Urut 1=0 berdasarkan dalil mereka.

681. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu tidak benar?

682. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Tidak benar.

683. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

684. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Yang berikut adalah TPS 14. Itu juga dikatakan 0, tapi fakta rekapitulasi di tingkat PPS (...)

685. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Masih Entrop juga, ya?

686. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Masih Entrop. Tiga-tiganya di Kelurahan Entrop, Yang Mulia. Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1=63 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2=111 suara.

687. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, terus?

688. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Jadi, tidak benar bahwa di TPS tersebut mereka dapat 0. TPS 16 (...)

689. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, 16 sekarang.

690. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 0. Pasangan Calon Nomor Urut 2=617.

691. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

617?

692. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Ya.

693. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

694. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Terima kasih, Yang Mulia.

695. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu poin dua. Sekarang yang ketiga, soal intervensi yang di sini disebutkan tidak benar apabila terdapat intervensi dengan menghalang-halangi saksi Pemohon tadi, apakah juga di Entrop itu juga?

696. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Tidak terjadi.

697. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak terjadi.

698. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Ada surat pernyataan dari ketua KPPS, tiga TPS tersebut, ketua PPS, dan ketua PPD sebagai alat bukti yang sudah kami serahkan ke Penasihat Hukum.

699. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke, pertanyaan berikutnya. Apakah keberatan mengenai intervensi dengan menghalang-halangi saksi itu muncul juga ketika rekap?

700. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Tidak ada sama sekali.

701. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Cukup, kalau begitu.

702. SAKSI DARI TERMOHON: YERMIAS NUMBERI

Terima kasih.

703. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih. Ada Hakim yang lain? Cukup, terima kasih. Sekarang gantian dengan Saudara Immawan Margono. Saya cek dulu Saudara Immawan. Saudara tempat, tanggal lahirnya, Boyolali, 14 Juni 1978?

704. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Betul.

705. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Agama Islam. Alamat, Arso Puro, Keerom.

706. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Arso Pura, Pak.

707. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, Arso Pura, ya?

708. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya.

709. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saya ingatnya Boyolali, jadi Puro begitu ya. Ada Arso, ada Pura.

710. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Interupsi, Ketua.

711. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya?

712. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Saya usul kalau memang dimungkinkan ya, kita bicara mengenai daerah-daerah yang remote island, daerah-daerah yang jauh dari kita, sehingga bayangan kita pun tidak sampai ke sana. Apakah dimungkinkan Majelis atau KPU menyediakan satu peta besar, peta Indonesia ini?

Kalau enggak, enggak punya bayangan saya. Saudara katakan Boyolali atau daerah Purworejo atau daerah di sana di Papua begitu banyak. Mungkin enggak ada satu peta besar, jadi kita bisa melihat di mana itu.

713. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, nanti akan kami sampaikan kepada Ketua untuk dipertimbangkan usul Anda.

714. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Terima kasih.

715. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saya lanjutkan Saudara Immawan, Saudara Ketua KPU Kabupaten Keerom?

716. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Bukan, Yang Mulia, saya anggota KPU.

717. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Anggota KPU. Ini salah lagi ini. Anggota ditulis ketua, honorinya saja lain ini. Saudara Immawan, Saudara diminta untuk menjelaskan soal rekap di tingkat Keerom. Silakan. Ada hal spesifik barangkali yang akan Saudara terangkan?

718. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Terima kasih. Rekapitulasi di Kabupaten Keerom dilaksanakan hari Rabu, tanggal 16 Juli Tahun 2014, jam 11.00 kita mulai.

719. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, terus?

720. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Hadir di rekap itu bapak bupati yang diwakili oleh asisten 1, bapak dandim, bapak kapolres, Panwaslu Kabupaten Keerom, panitia pemilihan kecamatan di seluruh Kabupaten Keerom, tujuh distrik, kemudian pasangan ... Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 .

721. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini ... panwas? Panwas?

722. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Panwaslu hadir.

723. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lengkap berarti?

724. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Lengkap tiga orang.

725. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, kalau itu lengkap kan normal, enggak ada masalah. Ada hal khusus yang ingin Saudara jelaskan?

726. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak ada masalah. Cuma pada saat terakhir mau tanda tangan, mereka tidak mau menandatangani.

727. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tapi sudah ... penandatanganan itu kan biasanya ditutup dulu, baru ditandatangani, begitu?

728. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya.

729. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini sudah ditutup, tinggal sesi penandatanganan?

730. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya.

731. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Siapa yang keberatan?

732. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Waktu Pleno berjalan, ya sedikit mungkin ada salah tulis angka, harusnya 3, ditulis 2, disebut oleh PPD kan wajar kalau diinterupsi.

733. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, ndak usah dinilai wajar apa enggak, biar dunia yang menilai.

734. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Bukan, maksudnya (...)

735. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Anda cerita saja.

736. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Mungkin salah ketik ... sebut.

737. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, ya, ya.

738. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Sudah, kita koreksi benar.

739. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

740. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Kemudian, tidak ada permohonan pengaduan, kita sampaikan,
"Ada DB-2, mau diisi?"
"Tidak."

741. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak, ya.

742. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Kemudian, terakhir setelah ditutup, saya tanda tangan. Mereka bilang saya, "Mas, kalau enggak tanda tangan, enggak apa toh?"

"Lho, kenapa enggak mau tanda tangan?"

"Karena dari atas bilang, "Enggak usah tanda tangan.""

743. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, gitu.

744. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Seperti itu jawabannya.

745. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa ada alasan, "Kok diperintahkan enggak tanda tangan, kenapa?" Gitu, kan? Ada pertanyaan begitu enggak dari Anda?

746. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Saya cuma tanya terakhir, "Lho, ngapain enggak boleh tanda tangan?"

"Ya, suka-suka saja."

747. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ngapain itu kan kalau di sini, kalau di sana kan kenapa, gitu kan?

748. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya.

749. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kenapa (...)

750. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

"Kenapa enggak tanda tangan?"

Jawabannya, "Ya, suka-suka saja."

751. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, suka-suka saja?

752. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya, seperti itu.

753. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, ya? Itu saja, ya? Soal rekap masih ada yang ingin Saudara jelaskan?

754. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Terakhir. Begini, Pak Yang Mulia, di (...)

755. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini anu ... sebentar! Ada dari Yang Mulia Hakim Muhammad Alim tanya. Itu yang tidak menandatangani satu saksi, apa dua-duanya?

756. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Satu, nomor ... Saksi Pasangan Nomor 1.

757. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, yang satunya lagi tanda tangan?

758. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Tanda tangan.

759. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau menurut Pak Alim, "Itu tidak mereka namanya." Cuma satu, kok mereka, gitu ya. Cukup, ya? Sekarang (...)

760. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ada tambahan sedikit.

761. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, tambahannya apa?

762. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Kemarin saya dengar itu yang diprotes tentang rekap di kantor KPU dari distrik.

763. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dari distrik?

764. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya.

765. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

KPU provinsi?

766. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Kabupaten.

767. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kabupaten?

768. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya.

769. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terus?

770. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Jadi, tanggal 3 Juli saya sudah berangkat ke distrik terjauh di Keerom di ... namanya Distrik Towe. Itu harus naik pesawat capung.

771. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

772. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Di daerah sana tidak ada signal, tidak ada komunikasi. Saya balik ke Kabupaten Keerom itu tanggal 11 (...)

773. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

774. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Hari Jumat. Jadi, tidak ada komunikasi perjalanan pemilu di Kabupaten Keerom. Setelah sampai di kantor, baru saya tanya dengan teman-teman, pemilu aman-aman saja.

775. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Ndak, tadi kan ada ... ada distrik yang rekapnya di kabupaten?

776. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya, distrik terjauh yang saya datangi ini rekapnya di kantor KPU.

777. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, gitu. Ya, itu artinya benar adanya (...)

778. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya, ya.

779. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tadi Beatrix kan mau menjelaskan juga, diminta juga Anda menjelaskan, mengapa di kabupaten? Apa karena signal-signal tadi?

780. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Bukan, Pak.

781. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa?

782. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Karena persoalan transportasi.

783. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh.

784. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Karena harus menggunakan penerbangan.

785. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh.

786. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya, itu ada tujuh titik.

787. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

788. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Tujuh titik penerbangan di Distrik Towe dan satu kali terbang hanya bisa melayani dua titik. Dan satu hari cuma bisa melayani tiga kali penerbangan. Dan itu tidak semuanya bisa melayani untuk Keerom. Ada Kabupaten Pegunungan Bintang, kabupaten yang lainnya.

789. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Sehingga, apakah ketika Anda menetapkan atau bagaimana kok sampai disepekat di Keerom, itu inisiatifnya siapa?

790. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Selama ini proses di Distrik Towe rekapitulasinya selalu di kantor KPU.

791. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, jadi ini meneruskan yang sudah biasa saja, gitu?

792. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya.

793. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Dan ada yang keberatan enggak ketika di Keerom?

794. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Mereka yang hadir malah Saksi Pasangan Nomor Urut 1 (...)

795. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

796. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Untuk pada rekap itu. Dan mereka menandatangani formulir DA-1.

797. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Keberatan, enggak?

798. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Tidak.

799. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Menandatangani?

800. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Formulir DA-1.

801. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Dan tidak keberatan?

802. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Tidak keberatan.

803. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Sekarang, kalau soal rekap sudah selesai, Anda diminta oleh Termohon untuk menjelaskan soal DPT. DPT kok diminta menjelaskan, ini ada soal apa sih? Kalau jumlah DPT kan bisa dibaca isinya. Di sini ditulis, "46.770," bagaimana yang betul, bagaimana?

804. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Betul itu, Pak, 46.770.

805. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, ndak ada masalah dong?

806. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ndak ada masalah tentang DPT.

807. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

DPKTB ada?

808. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

DPKTB?

809. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

810. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ada sedikit.

811. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, silakan diteruskan saja! DPKTB-nya berapa, DPTB-nya berapa, meskipun bisa dibaca sebenarnya di dokumen. Tapi ini kok diminta menjelaskan, itu bagaimana?

812. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Jadi, di Kabupaten Keerom itu (...)

813. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

He em.

814. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

DPTB-nya=33, DPTB.

815. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, TB ya ini?

816. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya. Terus, DPK-nya=118.

817. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

DPK=118. KTB?

818. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

DPKTB=524.

819. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Ada yang mempersoalkan soal TB, K, dan KTB ini?

820. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Tidak ada.

821. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sampai penghitungan terakhir?

822. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Tidak ada. Sampai di provinsi juga tidak dipersoalkan.

823. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sampai di provinsi enggak ada?

824. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Enggak ada.

825. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Di tingkat nasional?

826. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Saya tidak tahu karena saya enggak mengikuti.

827. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, enggak mengikuti, ya?

828. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya.

829. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Cukup, ya?

830. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Terima kasih, Pak.

831. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sekarang yang terakhir, Anda diminta untuk memastikan penjelasan apakah di situ menggunakan sistem coblos apa noken pemilunya?

832. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Menggunakan coblos, Pak.

833. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Coblos, ya?

834. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya.

835. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pasti, ya?

836. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Pasti.

837. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Cukup? Ada hal lain lagi yang ingin Saudara terangkan?

838. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Terima kasih. Tidak ada.

839. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup. Terima kasih, Saudara. Ini ada tambahan dari Yang Mulia Hakim Arief Hidayat.

840. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, saya akan minta penegasan Saudara sehubungan dalil Pemohon. Tadi menyangkut distrik apa? Towet?

841. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Towe, Pak.

842. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Towe. Distrik Senggi gimana?

843. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Distrik Senggi beda, Pak. Distrik Senggi itu bisa menggunakan mobil hanya satu TPS yang dicangkokkan di Towe, yaitu TPS 2 Usku.

844. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini betul semuanya di distrik itu dilakukan penghitungan ... untuk Distrik Senggi hanya satu (...)

845. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Satu TPS itu yang ikut kami ke Towe.

846. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang ikut ke Towe, ya?

847. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Yang ikut ke Towe, yang ikut direka di kabupaten.

848. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh. Ini ada dalil di situ sebetulnya di dua distrik tadi, satu di TPS Senggi yang satu TPS (...)

849. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya.

850. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang lain di Distrik Towe, dilakukan pencoblosan enggak sih? Kok, kenapa dihitung itu? Dilakukan pencoblosan enggak?

851. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Dilakukan pencoblosan?

852. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, pencoblosan. Jadi setelah dilakukan pencoblosan di Distrik Towe semuanya diangkut ke (...)

853. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Kantor KPU.

854. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kantor KPU di hitung di tingkat KPU, ya?

855. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya.

856. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, gitu, ya. Jadi benar bahwa di situ ada pencoblosan di situ?

857. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ada.

858. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian yang untuk Distrik Web dan Distrik Waris gimana?

859. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Distrik Web dan Distrik Waris itu bisa transportasi darat menggunakan mobil?

860. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul pada waktu rekapitulasi tidak ada pemberitahuan sehingga pasangan ... gimana pasangan ... Saksi Pasangan Nomor Urut 1 hadir enggak di (...)

861. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Web dengan Waris.

862. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Web dan Waris?

863. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Itu mau bingung ... PPD-nya bingung dimana alamatnya pasangan itu, Pak, jadi pemberitahuannya tidak sampai.

864. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi Pasangan Nomor Urut 1 memang saksinya tidak hadir, ya?

865. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Nomor Urut 2 juga enggak ada.

866. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, gitu. Jadi dua-duanya tidak hadir?

867. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ya.

868. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu disengaja atau tidak memang? Diundang apa tidak?

869. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Saya tanya kepada Pasangan Nomor Urut 1 sudah dikasih mandat, tapi tidak sampai tempat tujuan.

870. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi yang hadir pada waktu rekap siapa? Panwas hadir?

871. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Di tingkat distrik?

872. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

873. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Di tingkat distrik ya otomatis panwas hadir.

874. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di tingkat KPU-nya?

875. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Hadir.

876. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada juga, ya?

877. SAKSI DARI TERMOHON: IMMAWAN MARGONO

Ada, ya.

878. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik, terima kasih.

879. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih, Saudara. Sekarang Nomor 6 Saudara Ham Nawipa, silakan. Saudara Ham Nawipa tempat tanggal lahir Saudara di Pasir Putih, 11 Februari 1981? Pakai saja. Saudara petugas. Benar, ya?

880. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Benar.

881. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Agama Kristen tinggal di jalan Tembaga Pura, RT 01, RW 01, Nabire?

882. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

KTP-nya Nabire, Pak.

883. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, sebentar. KTP-nya Nabire?

884. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

885. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tapi tinggalnya di mana?

886. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Di Paniai.

887. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Paniai, ya.

888. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tugasnya di Paniai KTP-nya di Nabire.

889. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Tugasnya di Paniai. Saudara Ketua KPU Kabupaten Paniai?

890. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Paniai.

891. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tadi banyak disebut-sebut oleh Beatrix untuk menjelaskan soal-soal tertentu, ya. Sekarang ini 7 poin Anda diminta menjelaskan soal ini supaya tidak lupa satu-satu saja deh sekarang. Pelaksanaan rekap di tingkat Kabupaten Paniai ada hal apa yang ingin Saudara jelaskan?

892. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 15 Juli 2014 kami sudah berjalan lakukan dengan aman.

893. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak ada masalah?

894. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tidak ada masalah.

895. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada keberatan?

896. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tidak ada.

897. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada yang tidak hadir?

898. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Yang hadir ... semua hadir, kelima anggota (...)

899. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Artinya semua yang punya kepentingan, peserta, pengawas, hadir semua?

900. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Penyelenggara hadir, pengawas ... panwas hadir, kemudian (...)

901. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Peserta pemilu?

902. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Saksi pasangan calon hadir.

903. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

904. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Kemudian PPD.

905. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Hadir juga?

906. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Hadir juga.

907. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

PPD kan penyelenggara juga kan, hadir juga?

908. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

909. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Karena rekap dik kabupaten itu kan PPD yang hadir kan?

910. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

911. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Sekarang kalau enggak ada masalah selesai ini. Sekarang soal DPT Paniai, ini Saudara diminta menjelaskan, jumlah sudah ada ditulis di sini 90.632, benar?

912. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Benar, Yang Mulia.

913. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada hal apa lagi yang ingin Saudara terangkan kaitannya dengan jumlah yang seperti itu? Atau ada hal apa mengenai DPT?

914. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tidak ada.

915. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak ada. Oke, lanjut kalau begitu. Soal sistem pemilunya apakah coblos atau noken?

916. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya, soal sistem yang dilakukan di lapangan itu ada sistem ikat dan sistem noken.

917. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sistem ikat sendiri, noken sendiri?

918. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tidak, sistem ikat itu kesepakatan musyawarah masyarakat di tempat.

919. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dan noken sama itu, ya?

920. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Noken sama.

921. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sama dengan itu ... noken itu kan tas itu, ya?

922. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

923. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lalu ada yang coblos juga?

924. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Kelihatannya kemarin noken semua ada 4 TPS yang distriknya dekat itu sudah coblos.

925. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, sudah. Hanya empat TPS yang coblos?

926. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Empat TPS saja.

927. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara bisa sebutkan yang coblos itu TPS mana saja, cuma empat kan?

928. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

TPS Enarotali, kemudian TPS 1 Madi, TPS 2 Madi, dan TPS Aikai.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Aikai ya?

929. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

930. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, yang lainnya?

931. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Yang lainnya sistem noken.

932. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Noken itu kan antara lain syaratnya mesti dibikin Berita Acara. Ada Berita Acaranya setiap TPS itu?

933. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ada.

934. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Ada keberatan dengan sistem yang ditempuh oleh masyarakat di tempat Saudara itu tadi?

935. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tidak ada.

936. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dari pasangan calon tidak ada?

937. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tidak ada.

938. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Cukup ya soal itu, sekarang akan lanjut ke ... yang menggunakan suara, hak suara. Itu di sini dituliskan 100%, tadi DPT-nya 90.632, menggunakan semua dari 90.632 itu, benar?

939. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ulangi, Yang Mulia.

940. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tadi kan DPT-nya=90.632?

941. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

942. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lalu yang ... yang menggunakan hak suara itu juga sejumlah itu juga?

943. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya, betul.

944. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lalu jumlah suara sahnya berarti sama?

945. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Sama.

946. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Lalu perolehan suaranya untuk Nomor 1 berapa, Saudara ingat?

947. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Perolehan suara Pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 1=7.662.

948. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, terus Nomor 2?

949. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Pasangan Nomor Urut 2=82.970.

950. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Itu rekapnya tanggal berapa?

951. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Rekapnya tanggal 15 Juli Tahun 2014.

952. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Juli ya.

953. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Juli.

954. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Di sini saksi-saksi ada semua?

955. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Saksi ada.

956. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dan mengajukan keberatan atau tidak?

957. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tidak.

958. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, cukup kalau begitu keterangannya. Ada hal yang Saudara perlu tambahkan.

959. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tidak ada.

960. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dari Yang Mulia? Silakan.

961. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, konfirmasi. Saksi-saksinya mereka tidak keberatan semua? Saksi-saksinya tidak keberatan, Bapak?

962. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tidak ada.

963. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Tapi mereka tanda tangan?

964. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Mereka tanda tangan.

965. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Saksi Nomor 1 dan Nomor 2?

966. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Saksi Nomor 1 ... Nomor Urut 1 Amirada Kudiai tanda tangan pada saat rekapitulasi perhitungan suara di kabupaten. Kemudian Saksi Pasangan Nomor Urut 2 Meri Tabai pernah tanda tangan Berita Acara.

967. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Oke, ya terima kasih.

968. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, Saudara Saksi. Saya ingin tanya, bagaimana masalah distribusi logistik. Apa itu sampai ke seluruh TPS-TPS atau ada yang bermasalah?

969. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Masalah distribusi logistik sudah sampai ke TPS.

970. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Apa ada TPS yang enggak menerima?

971. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ada pengurus ... penyelenggara menerima tapi tingkat penyelenggara sudah kembali ... tarik kembali ke tingkat distrik untuk melakukan coblos di tingkat distrik.

972. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Artinya ada TPS yang tidak sampai suaranya?

973. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Sudah.

974. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saudara bisa ceritakan di TPS mana saja?

975. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Yang tadi empat TPS itu sudah. Rata-rata semua TPS itu sudah dapat, sudah distribusikan logistiknya.

976. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Apakah di semua TPS dilaksanakan pemilu?

977. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Pemilu untuk kesepakatan yang mereka sudah lakukan tapi pengurus mereka sudah mencatat Berita Acaranya itu sudah ada.

978. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, memang tadi disampaikan, dilaksanakan di distrik ya?

979. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

980. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Artinya ada juga di kampung yang tidak dilaksanakan ya?

981. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

982. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tapi langsung ke distrik?

983. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

984. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Itu Awabutu masuk daerah Saudara?

985. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Awabutu itu masuk.

986. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Masuk, kemarin Novela cerita di sini.

987. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

988. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bahwa di kampung dia tidak ada pemilu. Bagaimana menurut Saudara?

989. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Novela waktu itu ... saya membantah sedikit, Hakim Yang Mulia, izin.

990. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

991. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Bahwa di tingkat rekapitulasi kabupaten, ibu tidak hadir.

992. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Bukan.

993. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

994. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Dia hanya menyaksikan ... mengatakan bahwa di kampung dia Awabutu tidak ada pemilu.

995. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya, benar.

996. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Kemudian kemarin juga ditanya apakah di distrik dilakukan, dia tidak menjawab.

997. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya karena logistik sudah ditarik kembali, di Kampung Awabutu juga tidak dilakukan untuk pemilihan.

998. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Artinya memang betul di Kampung Awabutu tidak dilakukan pemilihan?

999. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Betul, mereka sudah tarik kembali ke distrik.

1000. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ditarik ke distrik.

1001. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ditarik ke distrik, lalu mereka lakukan.

1002. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ini harus kita klirkan ya.

1003. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

1004. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Di distrik apa itu?

1005. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Di Distrik Paniai Timur.

1006. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Paniai Timur.

1007. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

1008. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi masyarakat yang ada di Kampung Awabutu melakukan pelaksanaan pemilihan umum di distrik?

1009. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

1010. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Itu apakah dihadiri oleh kedua pasangan saksi?

1011. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Di tingkat distrik itu kan mungkin masyarakat yang hadir, tapi kedua pasangan calon itu mungkin bisa belum.

1012. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Apa ada keberatan dari panwas lapangan?

1013. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tidak ada.

1014. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Apa disetujui pelaksanaan itu di distrik?

1015. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Disetujui.

1016. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Disetujui. Panwas apakah juga hadir menurut informasi?

1017. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Hadir.

1018. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Hadir. Jadi, tetap dilaksanakan (...)

1019. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

1020. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tapi memang bukan di desa itu (...)

1021. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

1022. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tetapi di distrik?

1023. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Di distrik, betul, Yang Mulia.

1024. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Begitu, ya?

1025. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya.

1026. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, oke, Terima kasih.

1027. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan (...)

1028. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Itu tetap noken ya, semua, ya?

1029. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tetap noken semua.

1030. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Ada pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Aswanto. Cukup? Cukup, terima kasih, Saudara Ham Nawipa.

1031. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Terima kasih, Yang Mulia. Waktu kami kembalikan.

1032. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sekarang Saudara Yanes Alit ... Alitnoe. Bacanya gimana ini? Benar saya bacanya ini, ya? Yanes saja deh yang mudah. Saudara Yanes, tempat tanggal lahir Arikbalek?

1033. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Benar, Yang Mulia.

1034. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

5 Mei 1979?

1035. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Benar.

1036. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Agama Kristen, Wambalfak, Abenaho, Yalimo?

1037. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Benar.

1038. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Ketua KPUD Kabupaten Yalimo?

1039. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Benar, Yang Mulia.

1040. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini Saudara diminta untuk menjelaskan tujuh poin. Supaya enggak lupa seperti kawan-kawan Saudara tadi, satu-satu. Yang pertama, soal rekapitulasi di Yalimo, ada hal khusus yang ingin Saudara jelaskan di sini?

1041. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Baik, Yang Mulia.

1042. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

1043. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo dilaksanakan tanggal 16 Juli, tempat di aula pemda, dihadirkan panwas kabupaten, Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 2, dan dihadiri pemda, dalam hal ini wakil bupati, sekda, asisten I, dan kepala kesbangpol. Itu unsur-unsur yang hadir dalam rapat Pleno, ya.

1044. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada masalah yang berkembang di situ, yang kemudian bagaimana Saudara menyelesaikan terkait dengan soal rekap itu ada, tidak?

1045. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Tidak ada masalah.

1046. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak ada masalah. Semua saksi tanda tangan?

1047. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Semua saksi tanda tangan.

1048. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Semua yang berkepentingan untuk rekap itu hadir? Penyelenggara, peserta, pengawas, pemda misalnya, atau ... apa namanya itu ... Muspida, hadir?

1049. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Hadir.

1050. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Cukup, ya?

1051. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Cukup.

1052. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Soal DPT, di sini disebutkan di Yalimo itu 67.863 suara, benar?

1053. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Benar, Yang Mulia.

1054. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada hal apa yang ingin Saudara tambahkan tentang informasi DPT ini? Ada hal lain, apa cukup itu saja?

1055. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Cukup.

1056. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih. Sekarang soal penggunaan sistem pemilu coblos, noken, atau ikat?

1057. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Coblos.

1058. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Coblos, oke. Kemudian, yang menggunakan hak suara, di sini diterangkan 67.682, benar?

1059. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

62.

1060. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saya ulangi, ya?

1061. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Ya.

1062. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

67.682. Yang betul seperti apa?

1063. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Yang betul ... saya baca, Yang Mulia, mohon izin.

1064. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, silakan.

1065. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Yang betul 67.862.

1066. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini terbalik, ya. Kemudian, yang tidak sah hanya ada satu suara, benar?

1067. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Benar, Yang Mulia.

1068. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kemudian, soal rekap. Tanggal berapa Saudara menyelenggarakan rekap?

1069. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Tanggal 16 Juli.

1070. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tadi Saudara sudah menyebutkan di pemda katanya, ya?

1071. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Aula pemda.

1072. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Aula pemda. Lalu perolehan suaranya bagaimana? Nomor 1 berapa?

1073. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Nomor 1=17.812.

1074. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Nomor 2?

1075. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

50.050.

1076. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tadi Saudara sudah menyebutkan semua pihak hadir, termasuk peserta. Apakah Saksi Peserta Nomor 1, Nomor 2, ada yang mengajukan keberatan?

1077. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Tidak ada, Yang Mulia.

1078. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak ada. Ini kan di tingkat kabupaten. Di tingkat yang lebih rendah, misalnya di distrik, ada yang keberatan-keberatan? Yang muncul di sidang rekap di kabupaten?

1079. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Baik, Yang Mulia, mohon izin saya jelaskan sedikit.

1080. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

1081. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Kami jujur sampaikan (...)

1082. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

1083. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Keterangan, kesaksian bahwa (...)

1084. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, harus jujur memang.

1085. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Ya.

1086. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terus?

1087. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Kabupaten Yalimo itu, di tingkat distrik itu tidak ada saksi yang hadir.

1088. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tidak ada. Semua? Di PPD ndak ada yang hadir?

1089. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Tidak ada. Dan kemarin dari saksi Pemohon sampaikan bahwa di sana ada saksi. Itu tidak benar, sejujurnya mereka itu tidak ada saksi.

1090. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. 1 point, ya. Kemudian di tingkat kabupaten sendiri bagaimana?

1091. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Di tingkat kabupaten sendiri, hadir dan ada saksi.

1092. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, di sini tergambar ini sesuai dengan permintaan Termohon sudah kami tayangkan, ini ada 4 distrik, ya? Benar ya?

1093. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

5 distrik, Yang Mulia.

1094. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Yang satunya di mana? Oh, apa itu pemekaran? Pemekaran, ya? Ada yang ... Saudara bisa baca juga kan? Ada yang enggak masuk di gambar ini? Di atas ini ... di atas ini.

1095. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Distrik, Yang Mulia. Maksudnya?

1096. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, ada distrik ... saya bilang 4, Saudara bilang 5?

1097. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

5 benar. Yang pertama, Distrik Elelim.

1098. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, di sini ada.

1099. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Yang kedua, Apalapsili.

1100. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

1101. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Yang ketiga, Abenaho.

1102. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

1103. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Yang keempat, Welarek.

1104. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

1105. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Yang kelima, Benawa.

1106. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Semua tidak ada saksi?

1107. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Semua tidak ada saksi.

1108. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Baru di tingkat kabupaten ada saksi?

1109. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Ada saksi, itupun kita yang berusaha sampai cari dan kasih undangan untuk hadir.

1110. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, pertanyaan penting juga, mengapa tidak ada?

1111. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Itu ada pada tim sukses.

1112. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, jadi Saudara tidak (...)

1113. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Kan tim sukses yang harus di tugaskan untuk meraka hadir.

1114. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, begitu, ya?

1115. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Bukan kita.

1116. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, tapi kewajiban Saudara kan mengundang, sudah di undang juga oleh ... apa namanya ... PPD?

1117. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Benar, Yang Mulia. Kami sampaikan dan di umumkan melalui RRI, tim sukses jika kalau ada segera laporkan ke kami supaya koordinasi setiap tahapan yang berlangsung, itu yang kami lakukan.

1118. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Cukup kalau begitu, ya? Cukup?

1119. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Cukup. Terus mungkin ada ... mohon izin, saya bisa tambahkan?

1120. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, itu ada tambahan, apa tambahannya?

1121. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Tambahannya terkait dengan ibu (suara tidak terdengar jelas) sampaikan itu.

1122. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

1123. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Terkait dalil yang disampaikan oleh Pemohon, pendistribusian logistik tidak dilakukan dan itu tidak benar.

1124. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

1125. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Kami lakukan pendistribusian logistic. Cara yang kami lakukan adalah titik yang susah dijangkau melalui jalan darat menggunakan pesawat.

1126. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

1127. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Dan 1 distrik itu pakai 3 titik, cepat untuk drop distriknya itu ke PPS.

1128. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

1129. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Dan itu yang kami lakukan.

1130. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

1131. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Kemudian yang pakai kendaraan kita tetap lakukan.

1132. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

1133. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Dan yang benar kita adalah lakukan pendistribusian (...)

1134. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

1135. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Logistik.

1136. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kalau begitu tambahan sudah selesai?

1137. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Ya, terima kasih.

1138. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih. Oke, sekarang Saudara Adam Arisoy. Saudara Adam Arisoy saya cek dulu identitas Saudara. Tempat tanggal lahir Kurudu, 17 Desember 1968?

1139. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya.

1140. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini kok orang Papua suaranya pelan, baru kali ini saya dengar. Agama Kristen, tinggal di Jalan Ardipura I laba-laba, RT 1, RW 3, Kelurahan Adipura?

1141. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Benar, Yang Mulia.

1142. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, Saudara ketika pilpres ini menjadi Ketua KPU Provinsi Papua?

1143. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Benar, Yang Mulia.

1144. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, tadi yang disebut Beatrix itu, ya?

1145. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, Yang Mulia

1146. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, Saudara secara spesifik di sini ak ... diminta oleh Termohon untuk menjelaskan 2 hal, soal proses pemilihan dan soal rekap, silakan di mulai yang pertama, pemilihan.

1147. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Baik, Yang Mulia. Proses pemilihan untuk pilpres khusus untuk Papua berjalan sebagai mana ya sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan, untuk logistik dalam upaya mengingat geo Papua yang sangat sulit sekali untuk logistik di dahulukan untuk Papua dan lewat daerah pemilihan yang telah kami tetapkan untuk Provinsi Papua, sehingga KPU Papua khususnya sebagai Ketua memerintahkan semua teman-teman komisioner untuk memantau secara langsung distribusi logistik yang kita siapkan, ya.

1148. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, tadi proses ini ... proses ini yang Saudara dahulukan mengingat geo Papua yang seperti itu maka soal logistik menjadi perhatian utama Saudara, sehingga Saudara tugasnya antara lain Beatrix tadi untuk memonitor.

Dari keterangan Beatrix tadi itukan kolega Saudara di provinsi, ya. Apa hal yang ... yang tercecer yang tidak di jelaskan tapi penting buat Saudara untuk ditambahkan, ada hal yang penting untuk Saudara tambahkan?

1149. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, jadi dalam proses ini kami lebih mengutamakan logistik itu harus tiba pada titik-titik yang telah dijadwalkan.

1150. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Jadi di samping mengirim, dimonitor terus, begitu ya?

1151. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya. Kita monitor sampai kepada rekapan terakhir pada tingkat KPU kabupaten/kota dan kita perintahkan mereka untuk segera merapat ke Provinsi Papua paling lambat tanggal 17 dan kita membuat tim jemputan, sehingga semua rekapitulasi perolehan suara sebelum disampaikan di dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Papua telah diblokir oleh tim KPU Provinsi Papua, sehingga tidak terjadi kesalahan rekapitulasi di saat pembacaan rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua.

1152. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Itu yang ... Saudara ... Ini sudah poin kedua sudah Saudara sampaikan juga. Ada hal lain yang ingin Saudara tambahkan berkaitan dengan dua-duanya, pemilihan dan rekap?

1153. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, baik. Mungkin saya bisa sampaikan tentang rekapitulasi di tingkat provinsi. Memang di dalam rekapitulasi, khusus untuk C-2 itu dari Pasangan Nomor Urut 1 mengkomplain. Ada beberapa daerah yang dikomplain, yaitu ada sekitar 10 kabupaten, yaitu Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Nduga, Paniai, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya dengan persoalannya masing-masing.

Yang bisa dapat kami selesaikan pada hari rekapitulasi tingkat (...)

1154. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Provinsi (...)

1155. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Rekapitulasi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Yahukimo. Di sana ada terjadi selisih suara yang di ... selisih suara yang ada di Panwas Kabupaten Yahukimo dan (...)

1156. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Penyelenggara?

1157. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Saksi.

1158. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, saksi?

1159. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya. Saksi (...)

1160. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu kan ada (...)

1161. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Tidak sesuai dengan apa yang direkap oleh KPU Kabupaten Yahukimo pada waktu itu, sehingga di saat itu juga, kami lakukan perubahan.

1162. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dan selesai (...)

1163. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Pencocokan dan selesai pada waktu itu.

1164. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Bagaimana dengan 9 kabupaten yang lain?

1165. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Sembilan kabupaten yang lain, menurut saksi Pak Waluyo yang kemarin.

1166. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

1167. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Mereka menyampaikan bahwa informasi yang mereka yang dapat dari ... yang mereka dapat itu dari saksi mereka di tingkat bawah. Dan mereka sampaikan bahwa di saat mereka sampaikan informasi bagi kami di KPU Provinsi Papua, itu mereka menyatakan bahwa kami masih menunggu bukti dari teman-teman kami di KPU kabupaten/kota, sehingga di dalam form DC-1 ini mereka cuma mengisi persoalan-persoalan yang terjadi.

Saya sampaikan untuk mereka bahwa oke silakan Anda boleh komplain, silakan, tapi buktinya ada, tidak? Bahwa memang di kabupaten, mereka menyatakan bahwa di Kabupaten Pegunungan Bintang, di Kabupaten Pegunungan Bintang, KPU-nya tidak mengundang saksi. Saya mempertanyakan kepada teman-teman KPU Kabupaten Pegunungan Bintang bahwa kalian ada melakukan ... mengirim undangan kepada para saksi untuk hadir di dalam rekapitulasi. Mereka sampaikan bahwa kami sudah mengirimkan undangan bahwa tanggal 16 kami lakukan rekapitulasi karena kami juga harus ada di Jayapura untuk menyampaikan ini kepada KPU Provinsi Papua. Ternyata dalam rekapitulasi, tidak dihadiri oleh Tim Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1.

Jadi ada hal-hal teknis yang mereka sampaikan kepada (...)

1168. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebelum Saudara berlanjut. Paling tidak, tadi kan Saudara sudah cerita tentang ... menerangkan tentang dua kabupaten Yahukimo dan Pegunungan Bintang. Saya ingin memperoleh gambaran, dari 10 kabupaten itu kalau dibagi 2 begitu, 1 keberatan soal proses, yang kedua keberatan soal hasil rekap, itu ada ndak bisa Saudara petakan mana yang dari 10 itu yang keberatan soal proses dan mana yang soal hasil? Ada, enggak? Apa semuanya soal proses? Tadi yang saya dengar tadi dua-dua tadi soal proses.

1169. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, jadi yang lebih banyak mereka persoalkan pada rekapitulasi di tingkat provinsi adalah soal sistem noken.

1170. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, soal sistem noken.

1171. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Kalau sistem noken, mungkin saya tidak bisa jelaskan itu secara lebar karena kita hadirkan saksi ahli kita yang akan menjelaskan bagaimana sistem penggunaan noken di Pegunungan Tengah sejak pemilu pertama tahun 1971, akan dijelaskan lebih jelas (...)

1172. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Dan secara faktual, tadi beberapa KPU kabupaten sudah menjelaskan juga, soal apa itu noken, bagaimana filosofinya, dan seterusnya, nanti ahli akan menjelaskan (suara tidak terdengar jelas). Jadi keterangan Saudara sudah cukup ini.

1173. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya menambahkan sedikit.

1174. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada mau tanya. Silakan.

1175. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saudara Saksi Pak Adam Marisoy. Saudara Ketua KPU provinsi, ya?

1176. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya. Benar, Yang Mulia.

1177. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dalil permohonan Pemohon itu mengatakan bahwa KPU itu sebagai penyelenggara negara, sebagai penyelenggara pemilihan umum tidak mandiri ya karena ada intervensi.

Bagaimana tanggapan Anda? Terutama di sini disebutkan secara gamblang di dalam permohonan pada halaman 170, ada intervensi yang juga dilakukan oleh kepolisian di wilayah tersebut. Bagaimana yang Saudara ketahui?

1178. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Baik, Yang Mulia, perlu saya jelaskan. Dalam proses tahapan ini, KPU seorang diri tidak mungkin melaksanakan pemilu ini. Bersama panwaslu kan tidak mungkin. Kita sebagai warga negara ada TNI, Polri yang ikut mendukung proses ini. Jadi, saya membantah itu. Bahwa di Papua kalau seandainya itu cuma KPU dan panwas, proses distribusi logistik tidak mungkin berjalan maksimal kalau tidak didorong oleh teman-teman kita Polri dan TNI. Saya membantah itu karena kami cukup dibantu, cukup banyak sekali oleh teman-teman kita TNI, Polri, bagaimana proses logistik ini bisa sampai kepada titik yang kita tuju.

1179. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Inti dari yang akan Anda sampaikan (...)

1180. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, di setiap airport di mana. Saya ingat persis, tanggal 8 saya ada di Kabupaten Jayawijaya, megecek secara langsung untuk semua kabupaten di Jayawijaya logistik. Bagaimana ada kapolresnya, bagaimana ada pak dandimnya. Mereka datang karena ada saya sebagai Ketua KPU Provinsi Papua yang hadir di Pegunungan Tengah untuk menyaksikan bagaimana logistik itu didistribusikan. Mereka mengambil bagian di dalam itu, memberikan semangat bagi penerbangan untuk segera cepat melaksanakan distribusi kepada tiap distrik yang ada di Pegunungan Tengah.

1181. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tidak intervensi, tapi mensupport, mendukung (...)

1182. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Mendukung.

1183. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terutama pada pelaksanaan distribusi logistik?

1184. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, benar, Yang Mulia.

1185. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih.

1186. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada satu lagi dari Yang Mulia Pak Anwar.

1187. HAKIM ANGGOTA: PATRILIS AKBAR

Saya juga ada, Pak.

1188. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan. Sebentar.

1189. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Masih ada pertanyaan saya tadi belum dijawab oleh Ibu Beatrix. Katanya, itu jatahnya Ketua KPU untuk menjawab.

1190. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya. Baik, Yang Mulia.

1191. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Masalahnya ringan saja sebenarnya.

1192. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, baik, Yang Mulia.

1193. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Jumlah DPT Papua berapa?

1194. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, baik. Jumlah DPT Papua=3.238.288.

1195. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ulangi!

1196. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

3.238.288.

1197. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, yang memilih?

1198. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Yang memilih pada tanggal 9=279.867.

1199. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Suara sah? Ada?

1200. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Baik, Yang Mulia, mungkin saya bacakan secara keseluruhan bahwa (...)

1201. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Eenggak, itu saja yang sah? Atau silakan baca secara keseluruhan.

1202. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, baik. Mungkin saya bisa bacakan, Yang Mulia. Bahwa data pemilih untuk Provinsi Papua secara keseluruhan, yaitu DPT-nya itu 3.238.288 dan DPTB-nya itu 2.260, dan DPK-nya 1.897, dan DPKTb-nya 28.395. Di dalam pelaksanaan pemilihan kemarin tanggal 9, pengguna hak pilih DPT=2.801.718, DPTB-nya=2.103.103, DPK-nya=1.051, DPKTb-nya=28.373.

1203. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Suara sah secara keseluruhan?

1204. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Data suara sah dan tidak sah. Jumlah suara sah=2.795.867, jumlah suara tidak sah=37.378. Jumlah suara sah dan tidak sah=2.833.245 dengan rincian perolehan suara bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Provinsi Papua, yaitu Prabowo-

Hatta=76 ... 769.132 dan Joko Widodo-Jusuf Kalla=2.026.735, dengan jumlah 2.795.867.

1205. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Saya mohon izin, mau kembali ke Saksi Didimus Dogomo, masih ada hal yang menggantung. Silakan.

1206. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, ini yang KPU Provinsi sudah cukup. Kalau sudah cukup, ini ada satu lagi dulu. Untuk provinsi, sekalian berdirinya gitu lho maksudnya. Silakan, Yang Mulia Ibu Maria.

1207. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya mohon klarifikasi dari KPU Provinsi, apakah benar bahwa 14 kabupaten itu tidak ada pemilihan umum? Karena ini didalilkan oleh Pemohon di 14 kabupaten tersebut, di Pegunungan dan di sini justru ada penulisan dengan huruf tebal ya, tapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini, musyawarah di tingkat kampung dan distrik tersebut tidak dilakukan karena intervensi penyelenggara pemilihan presiden dan wakil presiden atau Termohon dan juga kepolisian di wilayah tersebut. Sehingga dalam praktiknya, Termohon sebagai penyelenggara langsung memberikan surat kepada Capres Nomor Urut 2 dan tidak bersikap sebagai lembaga negara yang nasional, tetap, dan mandiri.

Tadi kalau Bapak mengatakan bahwa tanpa bantuan TNI, Polri, itu Papua tidak dapat melaksanakan pemilu. Apakah ada aparat pemda atau jajaran di pemda yang mengintervensi pemilu ini? Terima kasih.

1208. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Baik, Hakim Yang Mulia. Seperti tadi saya katakan bahwa untuk 14 kabupaten dinyatakan tidak melakukan pemilihan, sekali lagi saya mau sampaikan, saya membantah itu. Karena tanggal 8 saya berada di Jayawijaya, saya mengecek langsung logistik untuk Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya. Dan pada waktu itu, semua logistik didrop ke titiknya masing-masing. Dan saya beranggapan ... beranggapan bahwa tidak ada intervensi dari siapa pun. Dan pemilu pada tanggal 9, berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Dalam arti bahwa proses pemilihan itu berlangsung dari tingkat TPS. Demikian, Yang Mulia.

1209. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Tapi dari aparat pemda tidak ada juga pengaruh?

1210. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Tidak ada yang intervensi.

1211. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

1212. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saudara Adam Arisoy, ini kita ketemu untuk kesekian kalinya.

1213. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, Yang Mulia.

1214. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Waktu pileg juga kita sering ketemu ya. Jadi sudah kenal baik. Saya ingin tanya, waktu rekapitulasi di tingkat provinsi, apakah Bawaslu hadir? Gitu dulu.

1215. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi tanggal 18 sampai 19, teman-teman kita dari Bawaslu hadir.

1216. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Apakah ada rekomendasi-rekomendasi dari Bawaslu pada saat itu disampaikan kepada Saudara?

1217. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, baik, Yang Mulia. Dalam proses pemilihan pilpres kemarin untuk Papua, khusus rekomendasi yang kita terima adalah tentang Dogiyai, dan Dogiyai itu rekomendasi yang diterima yang disampaikan oleh teman-teman kita Dogiyai, rekomendasi yang diterima itu mereka terima pada tanggal 16, di saat mereka sudah selesai melakukan rekapitulasi untuk tingkat KPU Dogiyai, sehingga persoalan ini dibawa ke

KPU Provinsi Papua pada waktu itu dan dapat dijelaskan kepada kita semua dan kepada Bawaslu di Provinsi Papua.

Sehingga seketika itu juga, kami melakukan koordinasi ke tingkat atas, bagaimana tentang dua distrik yang dinyatakan bahwa tidak terjadi pemilihan. Mungkin seperti begitu. Jadi untuk ... untuk daerah atau kabupaten-kabupaten lain pada waktu itu, tidak ada rekomendasi khusus, cuma satu saja, yaitu Kabupaten Dogiyai.

1218. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, rekomendasi hanya untuk Kabupaten Dogiyai? Ya, jadi harus ada tegas. Sementara untuk yang lainnya, tidak ada ya?

1219. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya.

1220. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tindak lanjutnya bagaimana dari KPU provinsi?

1221. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Tindak lanjutnya kita mengingat bahwa PSU itu adalah 10 hari, kita sudah berada di tanggal 18, tidak mungkin lagi kita akan melakukan PSU karena kita lakukan PSU, berarti kita kembali melaporkan itu kepada KPU RI untuk melakukan pencetakan surat suara. Dan kalau kita bawa dari kabupaten/kota yang ada, juga sudah tidak ada waktu. Sehingga hal ini dari Bawaslu Papua dan KPU Papua, kita bersama-sama menyampaikan ini kepada KPU RI dan Bawaslu RI di saat rekapitulasi di tingkat nasional dan di saat itu juga teman-teman kita dari Bawaslu RI mereka menyatakan bahwa untuk dua distrik itu, jumlah pemilihnya dinyatakan nol.

1222. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ya, oke. Terima kasih.

1223. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih Saudara ... oh, ada tambahan. Silakan.

1224. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, ya, saya ingin penegasan dari Saudara, kembali ke Kabupaten Pegunungan. Menurut keterangan Saksi Pemohon bahwa ada tahapan-tahapan pada tahapan pemilu presiden pada 10 Kabupaten Pegunungan itu yang tidak jalan.

Memang kalau kita melihat ketentuan Pasal 3 ayat (6), tahapannya banyak ya, mereka mengakui bahwa ada tahapan, misalnya tahapan awal a, b, c, d, e, itu jalan, tapi pada butir f, yaitu pemungutan suara pada tingkatan TPS, itu tidak ada. Apakah ini karena persoalan noken atau persoalan lain, sepengetahuan Saudara?

1225. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Baik, Yang Mulia, mungkin saya perlu jelaskan bahwa saya besar di Pegunungan tengah. Saya pernah menjadi Panwas di Kabupaten Yahukimo pada waktu itu dan saya pernah menjadi Anggota KPU di Kabupaten Yalimo.

Proses kehidupan teman-teman saya, saudara-saudara saya di Pegunungan Tengah, saya pahami secara baik, bagaimana menjelang pileg nanti atau pilpres. Kesepakatan untuk menyampaikan aspirasi itu sangat jelas. Sehingga pada tanggal 9, saya kembali ke Pegunungan Tengah untuk mengatur teman-teman saya untuk bagaimana logistik itu harus didistribusikan sampai kepada titik-titiknya karena di sanalah masyarakat akan menyalurkan aspirasinya.

Entah itu melakukan lewat pemilihan langsung atau lewat sistem noken. Dan perlu saya jelaskan juga bahwa dalam proses noken di Pegunungan Tengah, selama satu tahun kami menjadi Anggota KPU Provinsi Papua, kami telah melakukan upaya yang maksimal mungkin, sehingga dua kabupaten di Pegunungan Tengah, yaitu Pegunungan Bintang dan Yalimo mereka sudah tidak lagi menggunakan noken, tapi melakukan pencoblosan (...)

1226. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, saya ingin ketegasan saja, saya ingin ketegasan saja bahwa apa yang dijelaskan oleh Saksi Pemohon bahwa ada dari sekian tahapan yang tidak berjalan, yaitu pemungutan suara di tingkat TPS, menurut Saudara itu tidak benar?

1227. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Itu tidak benar.

1228. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

1229. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih keterangan Saudara dan silakan duduk.

1230. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Terima kasih, Yang Mulia.

1231. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dan waktu saya kembalikan pada Yang Mulia. Oh, ada ... rupanya masih ada satu lagi. Silakan duduk, Anda. Saksi Didimus tadi. Silakan Saudara Didimus, ada?

Silakan, Yang Mulia, mau ditanya apa dia.

1232. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Supaya lebih clear, ya, lebih jelas. Rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai, itu tanggal 17?

1233. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Benar, Yang Mulia.

1234. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Nah, sementara pilpresnya sendiri, itu dilaksanakan tanggal 9. Lalu ada suara bupati tadi, ya, mengenai uang itu, itu berarti keluar ucapan itu setelah pilpres kan begitu?

1235. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Setelah pemilihan (...)

1236. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, pilpres kan. Ya, kan pada tanggal 17, ya kan?

1237. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Tanggal 17.

1238. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Setelah rekap kan, pada saat rekap paling tidak.

1239. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Ya, setelah rekap, Pak.

1240. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Nah, sementara rekap di KPU kabupaten, ya, itu didasarkan pada form DA-1, ya, DA-1 distrik, ya?

1241. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Benar, Yang Mulia.

1242. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Benar. Lalu bagaimana mungkin, ya, atau apa bisa hal seperti yang disampaikan oleh bupati tadi kalau suara dikasih ke Paslon Nomor 1? Kalau tidak dikasih, maka tidak ada uang, walau kenyataan ternyata uang itu sebenarnya adalah uang hibah dari kabupaten, ya, dari pemerintah?

1243. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Dari kabupaten, pemda.

1244. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Memang bisa begitu? Suara yang sudah direkap di kecamatan, kemudian dialihkan ke pihak lain?

1245. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Itu tidak ... tidak punya hak, kami harus merombak. Maksudnya tidak diperbolehkan.

1246. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Yang jelas, benar memang. Ya, terima kasih.

1247. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih, Saudara.

1248. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Baik, Yang Mulia.

1249. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

1250. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, Pihak Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, kita harus istirahat dulu, untuk istirahat, salat, dan makan, sampai jam 14.00 WIB. Setelah itu, nanti kita lanjutkan lagi satu dari Papua dan ahli, ya. Kemudian kesempatan bertanya kepada para pihak, setelah itu baru lanjut kepada provinsi yang lain.

Baik, sidang diskorsing sampai pukul 14.00 WIB.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 12.28 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1251. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Skorsing sidang dicabut kembali.

KETUK PALU 1X

Sebelum kita melanjutkan sidang untuk mendengarkan keterangan saksi dari Termohon, saya perlu menyampaikan bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak, kami memberikan batas sampai nanti malam karena Mahkamah juga harus secara bersamaan memeriksa dan melihat bukti-bukti itu.

Jadi kalau waktunya terlalu singkat karena buktinya banyak, nanti tidak sempat dibaca oleh para Hakim. Ya, jadi nanti malam jam 21.00 WIB terakhir. Besok atau lusa setelah kita melakukan verifikasi, kemudian kita sahkan.

1252. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari Termohon, Majelis.

1253. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

1254. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terkait perintah Majelis untuk membuka kotak seluruh Indonesia, itu sudah kami coba lakukan, Majelis, di beberapa tempat sudah dibuka, di beberapa tempat ada masalah karena panwasnya tidak berkenan, begitu.

Nah, itu kami butuh waktu juga untuk membawa bukti itu misalnya dari Papua yang kebetulan ombaknya lagi tinggi dan kami usahakan hari Senin, Majelis, terkait dengan itu karena seluruh Indonesia, Majelis.

1255. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, kalau itu bisa ... yang dimintakan bisa dipahami karena harus mengumpulkan banyak, ya. Jadi begitu ya, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Baik, kita lanjut. Silakan, Yang Mulia Pak Fadlil.

1256. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Akan saya lanjutkan saksi dulu dari Termohon dan sesudah saksi Termohon yang Papua Barat ini, baru akan diberi kesempatan ahli.

Yang dari Papua Barat hanya satu di dalam catatan yang diserahkan pada kami, Saudara Filep Wamafma?

1257. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Ada.

1258. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saya cek dulu, Saudara. Saudara beragama Kristen dan tinggal di Susweni, Kecamatan Manokwari Timur, Kota Manokwari, Papua Barat.

1259. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Benar.

1260. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara adalah Anggota KPU Provinsi Papua Barat?

1261. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Benar.

1262. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara oleh Termohon diminta untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pilpres di Provinsi Papua Barat, soal apa itu? Disilakan Saudara memulainya.

1263. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Baik, Majelis yang kami hormati. Sebelumnya kami menyampaikan suatu keberatan, Majelis.

1264. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Keberatan kepada siapa?

1265. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Keberatan kepada Pemohon.

1266. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

1267. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Kaitan dengan halaman 186 huruf e. Izin (...)

1268. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apa itu isinya?

1269. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Bahwa di daerah-daerah pemilihan, mayoritas warga Papua Nasrani dan disebut daerah basis Papua Merdeka, maka Pasangan Nomor 2 mendapat suara mayoritas. Hal ini disebabkan oleh isu lebih mudah merdeka atau dialog. Kalau Pasangan Nomor 2 yang menang, sedangkan di beberapa kampung Muslim dan daerah perkotaan yang penduduknya lebih heterogen, diperoleh kecenderungan ke Pasangan Nomor 1.

1270. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, Saudara keberatan terhadap itu?

1271. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Kami sangat keberatan.

1272. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

1273. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Karena ini adalah suatu stigma, stigma bagi saya dan kami orang Papua. Kami memandang ... kami hari ini disaksikan melalui siaran yang lagi diliput, semua orang Papua lagi ingin memastikan tentang stigma ini.

1274. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

1275. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Bahwa saya dan seluruh orang Papua merasa sudah dijadikan masuk dalam kategori ini. Saya anak Papua asli, berambut keriting, berkulit hitam, saya adalah orang Indonesia.

1276. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, cukup saya kira itu, ya. Silakan yang diminta oleh Termohon?

1277. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Selanjutnya, Majelis yang kami hormati. Dengan demikian, kami mohon sekali lagi kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencabut stigma tersebut dari seluruh bangsa Papua.

1278. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saya teruskan kepada Ketua nanti. Sekarang lanjutkan saja keterangan yang diminta Termohon.

1279. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Baik, siap, Yang Mulia. Berkaitan dengan pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana ... sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon untuk selisih hasil, telah kami jawab dalam ... kami sinkronkan dan dimasukkan di dalam daftar alat bukti yang ada karena berkaitan dengan TPS-TPS yang begitu banyak, sehingga kita sinkronkan antara data mereka dan data kami dan kami masukkan sebagai dalam daftar alat bukti.

Kemudian yang kedua, tentang pemilu presiden. Bahwa di Papua Barat, sama sekali tidak ada kejadian khusus tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Baik itu pelaksanaan di tingkat TPS, di tingkat distrik, di tingkat kabupaten, dan di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional.

Selanjutnya, setiap dokumen-dokumen yang ditetapkan di tingkat TPS, di tingkat PPS, distrik, sampai dengan provinsi, semuanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan juga saksi Pasangan Nomor Urut 2.

Majelis yang kami hormati, selanjutnya di ... dikatakan bahwa KPU bersama-sama dengan pejabat-pejabat melakukan upaya untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 2, sama sekali tidak ada dan tidak pernah ada. Sebenarnya, kalau kita ingin ... pada fakta, Gubernur Papua Barat adalah Ketua Partai Gerindra, Bupati di 10 Kabupaten adalah ketua-ketua partai pemenang koalisi partai politik pendukung Pasangan Nomor Urut 1.

Dengan demikian, tidak ada satu upaya sekali pun dari KPU secara berjenjang dan badan penyelenggara untuk memenangkan salah satu pasangan calon mana pun.

1280. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

1281. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Majelis yang kami hormati, demikian pula Papua Barat, tidak ada yang disebut dengan sistem noken, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Di Papua Barat, dalam sejarah pemilu, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, hingga Pemilu Presiden, tidak dikenal adanya sistem noken karena masyarakat di Provinsi Papua Barat sebagian besar adalah masyarakat yang majemuk yang sudah memahami tentang sistem pemilihan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Majelis yang kami hormati, dengan demikian, tidak ada satu dalil pun yang bisa kami memberikan sebagai data atau membantah atau memberikan ... menjawab semua ini karena bagi kami setiap TPS, setiap kabupaten/kota, dan di setiap ... dan di provinsi, tidak ada keberatan mana pun. Kami ambil salah satu contoh, berdasarkan permohonan Pemohon bahwa rata-rata di Papua Barat Pasangan Nomor Urut 2 menang, sebenarnya tidak, di setiap distrik di Papua Barat, Calon Nomor Urut 1 pun menang. Kalaupun di Kabupaten Manokwari misalnya, di Distrik Testega, Calon Pasangan Nomor Urut 1 menang 100% dan ditandatangani Berita Acara C-1 oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Nomor Urut 2. Di Distrik Anggi, Yang Mulia, dimenangkan oleh Calon Pasangan Nomor Urut 2, tetapi yang hadir menandatangani Berita Acara adalah Saksi Pasangan Nomor Urut 1.

Dengan demikian, Majelis Hakim yang kami hormati, dengan demiki ... untuk di Papua Barat, tidak ada peristiwa-peristiwa lain selain apa yang telah didalilkan oleh Para Pemohon. Demikian.

1282. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, terima kasih. Ada dari Hakim? Cukup?

Terima kasih, tidak ada pertanyaan, nanti barangkali dari para pihak. Terima kasih.

1283. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Mungkin kami tambahkan, Majelis.

1284. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup? Apa lagi?

1285. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Kami berharap, di dalam lembaga Konstitusi yang terhormat ini untuk Majelis memperhatikan ... mempertimbangkan dan menyampaikan apa yang telah kami sampaikan tadi.

1286. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, itu nanti. Biar kesimpulan Para Kuasa Hukum saja, ya.

1287. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Terima kasih.

1288. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih keterangan Saudara. Sekarang, Ahli belum disumpah, ya? Disilakan ahlinya, yang mana? Silakan, Yang Mulia.

1289. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ahli, ya? Ya, kita mulai. "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

1290. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

1291. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih.

1292. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan duduk, Ahli. Saudara Ahli, apa yang Pemohon ulangi ... Termohon minta, Saudara diminta menjelaskan tentang sistem noken dalam pelaksanaan pemilu di Provinsi Papua. Sebelumnya, saya cek dulu, Saudara beragama Islam, alamat di Perum Pemda Entrop, RT 001/RW 003, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, benar, Saudara Ahli?

1293. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Ya, Yang Mulia.

1294. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Disilakan, Saudara menjelaskan apa yang diminta oleh Termohon yang saya tadi sampaikan.

1295. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Izinkanlah kami, Yang Mulia, untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan noken sejak pemilu pertama di Papua sampai dengan dewasa ini.

Bahwa nilai budaya lokal yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di daerah pedalaman Papua, terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan noken merupakan sebuah kearifan lokal yang perlu diberikan ruang, tempat dalam perkembangan demokrasi. Bahwa penggunaan noken di Provinsi Papua telah berlangsung sejak pemilu pertama di Irian Jaya tahun 1971 sampai dengan pemilu 2014 ini. Bahwa dalam pemilu 1971 sampai dengan pemilu tahun 2009 tidak pernah dipersoalkan penggunaan noken ini, baik di kabupaten maupun di Provinsi Papua.

Noken ini dipersoalkan baru pada pemilu tahun 2009 terkait dengan sengketa PPHU dari Kabupaten Yahukimo. Pada saat itu, Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK Nomor 47-48/PPHU.A-VI/2009 tanggal 9 Juni 2009, dimana dalam pertimbangan MK pada putusan dengan nomor tersebut tidak membatalkan ... kami ulangi, tidak menolak dan tidak membatalkan pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan noken di daerah pedalaman Papua.

Bahwa dari perspektif asas pelaksanaan pemilu memang tidak memenuhi asas langsung dan rahasia. Namun, di sisi lain bahwa nilai budaya lokal dimana noken sebagai simbol kultural budaya masyarakat di suatu tempat tidak dinafikan begitu saja oleh penyelenggara pemilu, sepanjang anggota masyarakat setempat tidak ... masih mau menjaga, melestarikan, atau menggunakan. Bila penggunaan noken ini ditolak oleh penyelenggara pemilu, apakah itu di tingkat PPS, eh maaf, di tingkat KPPS, PPS, maupun PPD, maka pasti sebagian masyarakat ada di pegunungan tidak menggunakan hak pilihnya. Dan ini akan menimbulkan masalah sosial baru, bahkan gesekan antarmasyarakat di tingkat bawah yang akan memunculkan masalah baru di lapangan.

Bahwa keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud dari integrasi nasional, dimana di dalamnya terdapat integrasi bangsa, integrasi wilayah, dan integrasi nilai merupakan sebuah kesatuan untuk memadukan berbagai keragaman etnis, suku bangsa,

nilai budaya lokal dari berbagai daerah perlu dicari titik temunya, sehingga menjadi perekat untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Sejalan dengan integrasi nasional ini, izinkanlah kami, Yang Mulia, untuk mengutip salah satu kalimat yang puitis dari Proklamator, Bung Karno dalam berbagai pidato beliau pernah mengatakan, "Biarkanlah seribu kembang tumbuh dan bersedih di persada nusantara ini."

Dengan demikian, maka marilah kita memberikan tempat bagi kearifan lokal yang ada di pedalaman Papua untuk memperkaya khazanah budaya bangsa. Bahwa penggunaan noken merupakan sebuah kearifan lokal perlu dilihat dari sisi pengertian demokrasi yang lain, yaitu bagaimana memadukan berbagai kesepakatan yang muncul dari kehendak masyarakat adat untuk memilih calon pemimpinnya dengan cara mereka tanpa mencederai niat baik mereka dengan menggunakan noken atau sistem ikat. Di sini tinggal bagaimana penyelenggara pemilu, apakah itu di KPU kabupaten, di KPU provinsi, maupun di badan penyelenggara ad hoc di tingkat bawah perlu mengadministrasikannya sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan pemilu yang ada, dalam hal ini dibuat Berita Acara secara berjenjang mulai dari TPS oleh KPPS, dan seterusnya.

Kemudian, noken dalam pengertian sehari-hari atau fungsi noken di Provinsi Papua, khususnya daerah pedalaman. Noken adalah sejenis kantung atau tas yang dibuat dari anyaman kulit anggrek atau pintalan kulit kayu maupun pintalan benang yang digunakan oleh sebagian masyarakat Papua yang berfungsi sebagai berikut.

1. Merupakan tempat untuk membawa hasil pertanian atau perkebunan.
2. Tempat ayunan atau gendongan untuk balita pada sebagian etnis di pedalaman Papua.
3. Tempat untuk mengisi surat-surat suara ... surat-surat yang penting.
4. Tempat untuk keperluan lain sesuai dengan kebiasaan anggota masyarakat tertentu di sebagian masyarakat pedalaman yang dapat dijadikan sebagai tali asih, kenang-kenangan, lambang persaudaraan dan kekerabatan.

Pada pemilu ... berikutnya, pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah, noken juga digu ... digunakan untuk memilih calon legislatif, memilih calon kepala daerah, serta memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Selama pelaksanaan pemilu, mulai dari pemilu pertama di Irian Jaya 1971, penyeleng ... penyelenggara di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten tidak pernah ... kami ulangi, tidak pernah memberikan petunjuk kepada penyelenggara di tingkat bawah untuk menggunakan noken.

Noken digunakan atas inisiatif dari masyarakat di tingkat bawah, bahkan masyarakat menyediakan noken itu sendiri. KPU provinsi maupun KPU kabupaten selama ini, selama kami menjadi penyelenggara

pemilu di ... selama delapan kali berturut-turut dari 1977 sampai 2009 tetap menyediakan kotak suara di tempat pemungutan suara.

Kemudian cara penggunaan noken. Penggunaan noken sebagai pengganti kotak suara tidak seragam untuk masing-masing kabupaten di daerah pegunungan. Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau kepala suku. Ini pun bervariasi antardaerah yang satu dengan daerah yang lainnya di pedalaman.

Ada beberapa cara yang secara garis besar dapat kami kemukakan sebagai berikut.

Ada yang mengumpulkan sejumlah anggota masyarakat pemilih di sekitar area TPS. Kemudian tokoh masyarakat atau kepala suku meminta suara sejumlah pemilih tertentu dan surat suara tersebut dimasukkan ke dalam noken untuk diberikan kepada partai calon atau pasangan calon yang sebelumnya didalu ... didahului dengan permusyawaratan kampung.

Ada yang menggunakan hak pilihnya dengan cara sistem ikat, dimana jumlah pemilih di suatu tempat atau kampung tertentu langsung diberikan kepada beberapa partai calon atau pasangan calon menurut jumlah pemilih yang ada dalam daftar pemilih tetap. Ini terjadi di kampung. Jadi, sistem ikat itu terjadi di kampung, tidak terjadi di TPS.

Di sini faktor kesukaan dan kedekatan sangat menonjol. Yang dilihat adalah apa orang ini baik atau tidak menurut mereka, bukan menurut ... menurut kita atau partai politik.

Kemudian masalah yang muncul dengan penggunaan noken atau sistem ikat. Bila tidak dihitung oleh KPPS di tiap ... di TPS dan dimasukkan ke dalam Berita Acara setelah pemungutan suara, maka dikhawatirkan suara pemilih yang sudah ada dalam noken dapat teralih ke calon lain. Hal ini disebabkan karena surat suara tersebut dalam noken belum dicoblos untuk partai tertentu. Ada kalanya noken ini dibawa langsung ke PPS karena kondisi geografis di Papua. Kemudian dibuat Berita Acara ... Berita Acaranya dibuat di distrik itu bervariasi. Ada yang dibuat di tempat pemungutan suara oleh KPPS, ada yang satu distrik dibuat sekaligus. Pemu ... pelaksanaan pemungutan suara dilakukan di dalam distrik itu dengan menghadirkan semua KPPS dan pemilih datang di tempat KPPS. Ini terkait dengan masalah geografis.

Badan penyelenggara pemilu di tingkat bawah yang bertugas untuk membuat Berita Acara di TPS, PPS, dan PPD dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi untuk mengadministrasikan perolehan suara partai atau pasangan calon dengan sistem noken atau sistem ... sistem ikat, dalam arti dimasukkan dalam Berita Acara di TPS oleh KPPS.

Dengan demikian, perolehan suara calon atau pasangan calon pemungutan suara dilakukan dengan me ... menggunakan sistem oken ... noken ataupun sistem ikat. Mempunyai nilai budaya yang sangat dihormati itu menjadi berarti dan mempunyai nilai tersendiri.

Kemudian yang terakhir, perlunya regulasi berupa pengakuan negara terhadap penggunaan noken agar pembuat undang-undang dan penyelenggara pemilu di tingkat pusat dapat menetapkan sebuah ketentuan khusus terkait dengan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken, sistem ikat.

Pengakuan negara tentang pemungutan suara di daerah pegunungan Papua dengan menggunakan sistem noken atau sistem ikat dapat dirasakan oleh anggota masyarakat bila ada sebuah ketentuan khusus yang mengatur secara ketat dan tepat tentang penggunaan noken atau sistem ikat, mulai dari tata cara pemungutan suara, penghitungan suara, dan pembuatan Berita Acara.

Hal ini disampaikan mengingatkan UNESCO telah mengakui noken sebagai benda warisan budaya masyarakat di Papua. Kami ulangi, UNESCO telah mengakui noken ini sebagai benda warisan budaya bagi masyarakat di Papua. Karena ketentuan ini hanya berlaku di Provinsi Papua khususnya daerah pegunungan, sehingga tidak perlu diatur secara nasional, cukup ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah ... Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) terkait dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dengan demikian, tidak muncul lagi masalah penggunaan noken dalam sengketa pemilu, PHPU pemilu yang akan datang. Demikian, Yang Mulia.

1296. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pertanyaan tentang ini sama dengan saksi nanti pada saatnya akan diberikan sesi untuk pertanyaan. Namun, kita masih harus meneruskan Saksi Termohon ini. Berikutnya Nomor 10, nama Evi Novida Ginting Manik.

1297. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya, Pak Yang Mulia.

1298. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Mohon maaf, Saudara Evi, ini Hakim akan memberi kesempatan terdahulu untuk tanya jawab dengan Saksi yang dari Papua dulu. Disilakan, Ketua.

1299. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Majelis memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk bertanya khusus mengenai Papua dan Papua Barat, termasuk pada Ahli. Saya persilakan kepada Termohon kalau ada pertanyaan kepada Saksi atau Ahli.

1300. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Majelis, saya mohon izin untuk bertanya saja dulu. Apakah saksi-saksi ahli yang sudah kita ajukan tadi ... Pak Sangdaji, ya? Masih diizinkan untuk mengajukan ... sori, ahli lainnya?

1301. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih bisa nanti hari Jumat, masih bisa.

1302. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Ya, terima kasih.

1303. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada pertanyaan, ya, untuk (...)

1304. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ada, Majelis.

1305. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan.

1306. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terkait dengan pernyataan Ahli tadi, Majelis. Bahwa sistem noken dapat dilaksanakan di tingkat TPS, PPS, ataupun distrik. Sejauh ini berdasarkan pengalaman Ahli, apakah banyak terjadi di tingkat TPS atau di tingkat distrik? Atau bervariasi tentang jumlah pelaksanaan noken di tingkat daerahnya?

1307. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS oleh KPPS bervariasi untuk daerah pedalaman. Penggunaan noken di tingkat TPS lebih banyak daripada di tingkat PPD. Itu dilihat dari kondisi geografisnya.

Kalau kondisi geografisnya sulit, maka itu ditarik ke distrik dan ditarik ke PPS atau kampung, tapi kalau kondisi geografisnya tidak sulit karena di sana perlu kami sampaikan bahwa satu kampung di Papua itu terdiri dari berbagai kelompok, ada kelompok yang hanya mungkin 5

keluarga di gunung sana, ada kelompok yang hanya 4 atau 2 keluarga di gunung sana. Jadi, tergantung dari penyebaran penduduk dan isolasi daripada kampung itu sendiri. Demikian.

1308. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Cukup, Majelis.

1309. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Pihak Terkait, ada pertanyaan?

1310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Ada, Yang Mulia.

1311. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan.

1312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Saudara Ahli, saya ingin meminta sedikit penjelasan untuk pendalaman sistem noken atau ikat ini. Dalam satu sistem nilai sosial yang berkembang di masyarakat hukum adat di wilayah pedalaman Papua ... kita tahu bahwa cukup banyak suku yang tumbuh berkembang di sistem sosial itu.

Nah, apakah ... pertanyaan saya, apakah sistem noken ini dilihat dalam suatu kerangka wilayah, dilihat dalam suatu kerangka wilayah, apakah bisa sistem noken ini tidak hanya terjadi di kampung, tetapi ditarik ke tingkat wilayah yang lebih luas? Bisa di distrik atau di kabupaten?

Nah, ini perlu karena dari dalil permohonan Pemohon perlu juga saya kemukakan bahwa pemilu itu tidak ada di kampung, misalnya, tetapi tadi faktanya kita sudah dengar dari saksi fakta bahwa justru pemilu dalam sistem noken ini dilakukan di wilayah distrik. Nah, apakah suatu kebiasaan secara teritorial kewilayahan ini bisa demikian sistem sosialnya yang terjadi?

1313. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sebenarnya tadi sudah terjawab karena bisa di kampung bisa di tingkat distrik, tapi ... silakan.

1314. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Terkait dengan penggunaan noken itu, tergantung kepada kondisi daerah. Kami ulangi, terkait dengan kondisi daerah.

Kalau daerah yang terpenjar, terisolir itu biasanya ditarik ke tingkat PPS atau ke tingkat PPD, dalam hal ini kecamatan. Tapi kalau daerah yang tidak terisolir, maka itu tidak ditarik ke atas. Tetap dilakukan di TPS dengan cara masing-masing. Ada yang mengikat noken di kayu, ada yang menggantungkan noken di leher, tergantung dari kebiasaan masyarakat setempat di daerah pegunungan.

1315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Jadi, tidak tergantung dengan komunitas suatu masyarakat, begitu. Tapi lebih pendekatannya pada teritorial kewilayahan tadi ya, daerah tadi ya, geografis maksudnya.

1316. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Pertama, dilihat dari segi geografis, tapi pelaksanaan dengan sistem noken di suatu tempat dengan tempat lainnya bervariasi, tidak sama. Sekalipun itu dalam satu kabupaten bisa berbeda karena di sana bahasa yang ada di Papua itu hampir 300 bahasa di sana, 250 sekian bahasa. Dengan demikian, budayanya masing-masing berbeda.

1317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Saya mau bertanya lagi. Apakah dalam sistem sosial yang berlaku di masyarakat, komunitas masyarakat hukum adat itu, mekanisme keputusan itu apakah memang lahir dari sebuah proses musyawarah misalnya, atau bisa juga ditentukan pada kehendak dari kepala adat sendiri?

1318. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Kebiasaan masyarakat di pegunungan itu dimusyawarahkan dan hal ini barangkali sejalan dengan asas konstitusi kita, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Jadi, rasanya tidak salah kalau mereka memilih pemimpinnya dengan cara mereka. Kami kira demikian.

1319. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup ya. Dari pihak ... masih ada? Ya, silakan.

1320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Untuk Saksi dari Dogiyai, Saudara Saksi Didimus Dogomo.

1321. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Majelis, dari Termohon. Bila diperkenankan, Majelis. Pertanyaannya kalau boleh untuk Ahli dahulu, supaya Ahli selesai, baru kemudian untuk Saksi.

1322. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Eenggak, sekaligus, sekaligus.

1323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Saudara Saksi, pertanyaan kami adalah apakah Saksi bisa menjelaskan atau menerangkan saat proses kampanye sampai pemilihan itu. Suasana kondusif ... di masyarakat Dogiyai itu kabupaten sana, apakah mencekam atau seperti biasa pada umumnya?

1324. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Saya pikir biasa.

1325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Seperti biasa?

1326. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Tadi Pak Ahli kami sudah jelaskan, itu sudah jelas.

1327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Jadi, biasa, ya.

1328. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Apa yang mau saya jelaskan sebab sudah jelas?

1329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Karena dari Saksi Pemohon itu digiring, mau bicara saja seolah takut keamanan, keselamatan kan, sepertinya dalam suasana perang begitu, padahal kan, suasana merdeka. Itu yang dipertanyaan.

1330. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Tidak seperti itu.

1331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Ya, baik. Kemudian yang kedua, apakah ... tadi Yang Mulia Majelis menanyakan intervensi dari pihak kepolisian. Pertanyaan kami, apakah juga ada intervensi dari pihak keamanan lainnya kepada masyarakat sana?

1332. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Itu sangat tidak benar. Itu saya bantah, itu tidak benar.

1333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Tidak benar, ya. Kemudian, apakah Saudara Saksi bisa menerangkan atau pernah bertanya, atau kenal dengan saksi dari Paslon Nomor 1, kenapa di sana ada saksi dari Pasangan Nomor 1, tetapi kok, suaranya nol, misalnya. Apakah pernah bincang-bincang dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sana?

1334. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Kantor KPU, lembaga KPU bersama lembaga kantor tim sukses sebelah menyebelah. Undangan saya selalu kasih beliau duluan, kakak saya, Vincent. Selalu minum sama-sama, makan sama-sama di situ. Jadi di situlah ... jadi beliau katakan itu tidak benar.

1335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Kemudian apakah mengerti, kan ini dipersoalkan ini. Apakah ada saksi dari Pasangan Calon Nomor 1 tapi suaranya itu nol, gitu?

1336. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Saksinya ada pada saat kita pertemuan. Setelah ketua PKS meninggalkan tempat dan seperti yang tadi saya bilang, termasuk saksi-saksinya meninggalkan tempat. Terima kasih, Yang Mulia.

1337. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, cukuplah mengenai itu.

1338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Baik, untuk Saksi dari KPU Paniai, terima kasih. Pertanyaannya sama untuk Saksi Pak Ham Nawipa. Bagaimana keadaan masyarakat di Kabupaten Paniai saat menjelang dan saat hari pemilihan itu. Apakah ada huru-hara, keributan, atau suasana yang mencekam?

1339. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tidak ada, Pak.

1340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Tidak ada?

1341. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Masih aman. Ya.

1342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Jadi, tidak ada masalah misalnya orang mau bersuara atau bersimpang, berpapasan dengan polisi, dengan tentara, merasa takut dan bagaimana tentang keamanannya, enggak ada?

1343. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tidak ada.

1344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Bicara tentang bagaimana pemilu, mau melakukan apa juga bebas saja?

1345. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tidak ada. Tidak ada.

1346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Kemudian apakah di sana juga Saksi mengenal Saksi Novela Napiwa ini, kenal? Novela Napiwa?

1347. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya, Saudara. Saudara perempuan.

1348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Saudara. Apakah betul Saksi Novita ini caleg juga, Novela itu?

1349. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya, waktu pileg dia caleg dari Partai Gerindra.

1350. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Jabatannya apa?

1351. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Partai Gerindra.

1352. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak relevan, tidak relevan.

1353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Ya. Kemudian, apakah di sana juga ada intervensi dari aparat keamanan atau kepolisian yang memengaruhi masyarakat ya, atau engancam masyarakat dengan isu-isu HAM ya, menahan logistik kertas suara misalnya?

1354. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tidak ada, tidak benar itu.

1355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Tidak benar?

1356. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Tidak benar.

1357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

1358. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Cukup ya, Pihak Terkait.

1359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Masih ada (...)

1360. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

1361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Saya ingin tanya kepada Ahli ya, terkait dengan penjelasan sistem noken tadi, Pak. Ahli, Pak, pertanyaan untuk Ahli. Pertama-tama, tadi ditekankan sekali faktor integritas penyelenggara pemilu agar pelaksanaan noken ini berjalan dengan baik.

Nah, pertanyaan saya, Pak, sepanjang Bapak amati pemilu pertama sampai pemilu terakhir ini, apakah memang pernah ada penyimpangan atau katakan manipulasi terhadap suara rakyat itu? Dan kemudian ... kalau memang tidak ada sih enggak apa-apa, Pak, ya. Kalau ada, kira-kira apa sanksi yang diberikan masyarakat terhadap penyelenggara itu, Pak? Itu pertanyaan pertama untuk ... untuk Ahli. Mohon dijawab. Terima kasih.

1362. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Terkait dengan penyimpangan, di sini kami tegaskan bahwa masyarakat adat, khususnya di pedalaman, itu sangat menghargai, sangat menghormati suara yang diberikan kepada calon. Itu biasanya mereka mengawal sampai dengan tingkat kabupaten. Biasanya mereka mengawal itu sampai di tingkat ... dari PPS ... dari TPS, kemudian naik ke

PPS, sampai di tingkat kabupaten mereka mengawal. Bahwa suara yang diberikan itu tidak beralih. Sudah dimasukkan dalam Berita Acara, kemudian diteruskan ke jenjang yang lebih atas. Demikian.

1363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Lanjut, Pak. Saya ingin lebih mempertegas lagi ... minta ketegasan lagi. Bagaimana cara masyarakat memberikan (suara tidak terdengar jelas) itu, apakah dalam memberikan (suara tidak terdengar jelas) itu suara diberikan bulat atau memang ada sedikit perdebatan sebelumnya? Terima kasih.

1364. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Cara permusyawaratan yang dilakukan itu kan di ... eh, kalau sistem ikat itu biasanya dilakukan di kampung. Kesepakatan mereka, katakanlah ada dua pasangan calon sekarang ini, berapa diberikan kepada Pasangan Nomor Urut 1, berapa diberikan kepada Pasangan Nomor Urut 2. Itu sistem ikat.

Kemudian, setelah kesepakatan, katakanlah 300 pemilih, 250-250, maka dibagi 250-250-250 ke noken Nomor 1, 250 ke noken Nomor 2. Maka di sini dituntut integritas penyelenggara pemilu untuk mengadministrasikannya, dalam hal ini dimasukkan di dalam Berita Acara. Dan mereka yang menyaksikan.

1365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Kemudian, pertanyaan berikutnya kepada Ketua KPU Papua Barat. Saya ingin tanya, Pak, suasana kehidupan masyarakat, suasana kehidupan sosial di Papua Barat, ya kan, atau katakan di Manokwari dan sekitarnya itu, apakah masyarakat di sana itu ... setahu saya kan majemuk (suara tidak terdengar jelas), ada orang Bugis, ada orang Jawa, macam-macam di sana. Apakah kehidupan sosial masyarakat di sana itu, menjelang pilpres itu, apakah ada (suara tidak terdengar jelas) tertentu, sehingga muncul apa yang Bapak katakan barusan sebagai suatu stigma?

Jadi, mohon dijawab, bagaimana suasana kehidupan sosial masyarakat? Apakah memang mereka damai-damai saja, menghormati perbedaan sistem politik atau pandangan politik? Mohon dijawab. Terima kasih.

1366. SAKSI DARI TERMOHON: FILEP WAMAFMA

Baik, terima kasih. Sejak tahun 1855, Injil masuk di Papua dan diantar oleh seorang muslim dari Ternate. Istilah kita haji antarpendeta

ke Papua. Dan sejak saat itu, kehidupan beragama aman, nyaman, dan damai sampai dengan saat ini. Tetapi, dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka sudah sekitar satu minggu, sudah menjadi bahan diskusi yang sangat besar tentang kehidupan beragama itu.

Oleh karena itu, sekali lagi, ini adalah suatu proses yang kita berharap ada suatu kepastian dalam gedung ini. Demikian, ya.

1367. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik.

1368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Yang Mulia. Satu, Yang Mulia.

1369. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

1370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Baik. Penegasan saja kepada Ahli soal penggunaan sistem noken. Nah, sepengetahuan Ahli, apakah mungkin dalam pemilih ... pemilu yang menggunakan sistem noken ada pasangan yang memperoleh suara nol dan ada yang memperoleh suara maksimal? Misalnya, 100 atau 200. Terima kasih, Yang Mulia.

1371. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Saudara Ketua (...)

1372. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sudah terjawab tadi.

1373. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Apakah diizinkan itu? Pertanyaan mungkin atau tidak mungkin?

1374. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

1375. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Terima kasih.

1376. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tadi sudah jelas tadi, sudah tidak perlu diulangi lagi. Cukup. Ya, silakan, dari Pemohon.

1377. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau coba tanya dulu kepada Saudara Ahli ini, ya. Saudara Ahli, selama ini pekerjaannya sebagai apa, Pak?

1378. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Pekerjaan kami selaku PNS sejak 1972 sampai dengan pensiun sebagai PNS pada tahun 2007 dalam usia 60 tahun. Kemudian mulai bekerja di sebagai penyelenggara pemilu apa pun namanya, itu sejak pemilu tahun 1977 sampai dengan pemilu 2009.

1379. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Sampai pemilu 2009, sampai mulai (...)

1380. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Delapan kali berturut-turut.

1381. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Baik. Dari tahun 2009 sampai tahun 2013, Saudara Ahli menjadi apa?

1382. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

2013 kami masih menjadi anggota KPU provinsi dan berakhir pada Mei 2013, sampai Mei 2013 pencalonan masih kami di KPU.

Kemudian setelah pencalonan memang masa tugasnya lima tahun sudah selesai, dan kami kembali sebagai pensiun Pegawai Negeri Sipil.

1383. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Jadi terakhir jabatan atau pekerjaan bapak itu adalah anggota KPU provinsi.

1384. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Dan terakhir 2013 pada Bulan Mei tanggal 24.

1385. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Baik, ya. Kemudian yang kedua, yang saya mau tanya kepada Saudara Ahli mengenai ... tadi Saudara Ahli begitu banyak bicara tentang bagaimana sistem noken itu dilakukan di pedalaman, ya.

Pertanyaan saya yang pertama adalah di dalam menerangkan apa yang saudara Ahli sampaikan itu tadi sebelum ini, berapa paper yang sudah pernah Ahli sampaikan atau Saudara Ahli tulis dalam media internasional atau nasional mengenai hasil penelitian?

1386. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pertanyaannya langsung saja ke. Karena begini. Ahli di MK itu ada dua. Ahli karena akademiknya, tapi ahli karena pengalamannya.

1387. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Ya, justru karena itu, Yang Mulia (...)

1388. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tanya saja kepada keahliannya, ya?

1389. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Baik.

1390. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nanti Majelisnya yang akan menilai.

1391. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Pertanyaan saya adalah apakah Ahli ini mempunyai hasil-hasil penelitian atau karena punya pengalaman di dalam melaksanakan atau mengikuti pemilu atau pemilukada selama ini?

1392. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Saya keberatan Majelis. Kalau seorang saksi, eh sori, maaf. Kalau seorang Ahli sudah dipanggil membuka sidang dan sudah dipertanyakan oleh Majelis, sudah diterima jawaban-jawaban tadi, tidak ada masalah (suara tidak terdengar jelas) terlambat untuk Saudara mengajukan, terima kasih.

1393. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi curriculum vitae sudah ada di sini, dan sudah dibacakan, dan dipelajari oleh Majelis karena itu Majelis memberi kesempatan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli (...)

1394. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Saya ingin (...)

1395. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tanyakan saja, mengenai apa yang dia tahu berdasarkan keahliannya, ya. Baik karena pengetahuannya maupun karena pengalamannya. Tanyakan saja itu jadi tidak usah lagi mengungkit background, ya. silakan.

1396. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, saya teruskan pertanyaan saya Saudara Ahli, ya. Yang saya ingin juga tahu mengenai Saudara Ahli tadi menyebut soal permusyawaratan yang dilakukan di beberapa daerah tertentu, yang saya ingin tanya kepada Saudara Ahli adalah berapa banyak permusyawaratan di masyarakat kampung atau distrik tertentu yang Saudara pernah lihat?

1397. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Permusyawaratan yang dilakukan itu kami pernah menyaksikan pada pemilu 1977. Kemudian pemilu 1997, kebetulan bertugas di daerah pedalaman ditugaskan di daerah pedalaman selaku penyelenggara pemilu. Kemudian, pada pemilu gubernur 2005. Demikian.

1398. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Khusus untuk pilpres yang sekarang menjadi perkara kita di Mahkamah Konstitusi ini, apakah Saudara Ahli pernah melihat permusyawaratan yang dilakukan oleh masyarakat di pedalaman yang Saudara Ahli sebut tadi?

1399. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Untuk 2013.

1400. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

2014 maksud saya.

1401. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Untuk 2014 (...)

1402. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Begini-begini, jadi begini (...)

1403. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Kami bukan penyelenggara pemilu lagi, jadi kami tidak langsung melihat pelaksanaan pemungutan suara karena itu bukan fungsi dan hak kami, demikian.

1404. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi begini, jadi yang menilai nanti faktanya kita, ya. Para pihak, tanyakan saja keahliannya dari faktanya, nanti para pihak yang menilai. Nanti Anda mengajukan kesimpulan, Termohon juga kesimpulan, dan juga Pihak Terkait mengajukan kesimpulan nanti akan dinilai oleh Majelis, ya?

1405. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia.

1406. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tanyakan saja keahliannya, kepengetahuannya, jadi bukan kepada fakta, ya.

1407. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Kenapa saya tanya tadi itu, Yang Mulia karena saya ingin tahu apakah sama proses yang terjadi sampai tahun 2005 ya, dengan yang 2014 ini? Itu, itu yang saya mau tahu.

1408. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tanya saja keahliannya.

1409. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Makanya saya tanya lagi kepada Saudara Ahli sekali lagi, apakah menurut pengetahuan Saudara Ahli, ya. Pelaksanaan noken yang Saudara Ahli katakan tadi pernah melihat di tahun 2005, itu sama secara persis atau tidak dengan yang 2014 ini?

1410. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Pelaksanaan pemungutan noken, pemungutan suara dengan menggunakan noken atau sistem ikat di daerah pedalaman, katakanlah itu dari daerah kabupaten A di distrik X, itu dari tahun ke tahun sama, tetapi di kabupaten A di distrik X itu berbeda dengan di kabupaten B distrik X, katakanlah seperti itu.

Jadi mereka sama umumnya, cuma masing-masing bervariasi. Jadi dimusyawarahkan, kemudian dimasukkan ke dalam noken. Berapa untuk A, berapa untuk B. Demikian.

1411. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Beralih ke Saudara Saksi Didimus Dogomo, ya. Saudara Saksi ya, saya ingin tahu penerimaan logistik pemilu di Kabupaten di mana Saudara sebagai ketua KPU, KPU di Dogiyai itu tanggal berapa?

1412. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Penerimaan logistik di Kabupaten Dogiyai itu jalurnya yang tidak bisa dijangkau, dioper dengan pesawat yang mencapai dua minggu. Tanggal penerimaan logistik di Kabupaten Dogiyai pada daerah sekitar itu pada saat itu tanggal 3, tapi bagian sini saya bantah karena itu tugas ... tanggal 3, itu sudah sampai di Kabupaten Dogiyai, H-6.

1413. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, lanjut.

1414. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Baik.

1415. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Cukup.

1416. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Belum, belum, Yang Mulia. Saya teruskan. Sekali lagi saya mau tanya kepada Saudara Saksi, ya. Untuk daerah terjauh ya, itu dijangkau bisa hanya ... bisa dijangkau dengan pesawat?

1417. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Itu tugasnya bukan tugas arena KPU, hanya kami kontrol. Itu tugas pihak ketiga.

1418. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Bagaimana Saudara bisa mengecek bahwa logistik itu memang sampai atau dibawa oleh pihak ketiga? Pihak ketiga itu siapa?

1419. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Pemenang tender.

1420. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Pemenang tendernya itu Saudara bisa jelaskan?

1421. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Pemenang tendernya itu kalau kami belum tahu persis sampai saat ini. Bukan urusan kami, itu urusan sekretaris.

1422. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Jadi sekali lagi saya ingin ketegasan dari Saudara (...)

1423. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Jadi bagian yang kami tidak punya hak, tidak punya ini, tidak usah tanya dulu, Pak. Terima kasih.

1424. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Bagaimana ... Saudara Saksi ya, Saudara itu adalah ketua KPU. Yang bertanggung jawab terhadap ini adalah Saudara.

1425. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Hanya mengetahui.

1426. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Hanya mengetahui. Sebentar dulu, sebentar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak, ya.

1427. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Justru itu hanya mengetahui, tupoksinya itu harus jelas. Terima kasih.

1428. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Makanya saya tanya lagi kepada Saudara Saksi ya, Saudara Saksi bisa tahu secara persis, apakah Saudara Saksi mengetahui secara persis atau tidak bahwa logsitik surat ... terutama berhubungan dengan surat suara ini sampai atau tidak di distrik paling jauh di kabupaten Saudara ini?

1429. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Yang jelas sampai dan hasilnya PPD, PPS. Ini tugasnya para PPD, PPS harus mengantarkan di kampungnya masing-masing.

1430. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Yang saya tanya itu Saudara Saksi, apakah mengetahui betul bahwa ini disampaikan ke distrik atau tidak?

1431. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar. Jadi begini, jadi pertanyaannya begini ya. Jadi biar ... anu ... Saya sebentar ya, saya ambil alih sebentar. Jadi untuk mengklirkan ini, ya. Pertanyaan kepada Saksi, apakah pengangkutan untuk membawa logistik itu memang ditenderkan?

1432. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Minta ulang, Yang Mulia.

1433. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya?

1434. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Pertanyaannya minta ulang.

1435. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah pengangkutan dari kabupaten kepada distrik-distrik itu ditenderkan kepada pihak lain?

1436. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Pihak ketiga.

1437. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pihak ketiga. Apakah pihak ketiga ini setelah melaksanakan tugasnya melapor kepada Saudara bahwa logistik sudah dikirim?

1438. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Dilapor bahwa logistiknya dikirim.

1439. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dilaporkan kepada Saudara?

1440. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Dilapor.

1441. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah seluruh distrik di Dogiyai dalam pelaksanaan oleh pihak ketiga sudah melaporkan kepada Saudara logistiknya sudah sampai di distrik?

1442. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Di distrik di Mapia Barat, Mapia ... Piyaiye dengan Sukikai mencapai dua hari, sudah kirim pakai Pesawat Susi Air.

1443. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terus?

1444. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Terus dua kecamatan yang tadi ... apa ini ... Kampung Mapia Barat, Mapia Tengah, itu sudah diangkut oleh PPD, PPS. Sudah.

1445. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sudah sampai ke distrik?

1446. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Sudah. Hanya saya hanya terima rekapan.

1447. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima rekapan, ya. Baik, jadi begitulah. Silakan.

1448. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Terima kasih, Yang Mulia.

1449. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi modelnya agak beda memang Papua, tidak bisa samakan dengan wilayah lain karena jaraknya jauh itu. Silakan tanya.

1450. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Lagi kepada Ibu Beatrix, ya. Ibu Beatrix tadi sudah menerangkan di hadapan persidangan ini bahwa pada tanggal 6 Juli ya, Ibu itu masih

pergi ke Kabupaten Dogiyai, Nabire, mengecek logistik ya. Tanggal 6 Juli, Ibu ya?

1451. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

1452. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Baik. Perjalanan ibu mengecek ketiga kabupaten ini tadi dilakukan dalam waktu berapa hari?

1453. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya klarifikasi, Bapak, untuk di Dogiyai itu, kalau dari Nabire, saya tidak ke Dogiyai dalam penjelasan saya tadi. Penjelasan saya, saya di Nabire, tidak di Dogiyai. Karena saya ke Dogiyai, saya harus naik mobil satu hari lagi dan sewa mobil ke sana Rp5.000.000,00. Jadi, saya tidak sampai di sana.

1454. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Jadi, tidak sempat?

1455. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya di Nabire.

1456. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Di Nabire. Ya, baik.

1457. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya tadi tidak sebut Dogiyai.

1458. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Oke, tapi Saudara saksi tadi mengatakan melakukan pengecekan terhadap logistik yang berada untuk tiga kabupaten ini.

1459. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

1460. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Nah, pertanyaan (...)

1461. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya mengecek di Kabupaten Dogiyai ... Nabire karena Nabire adalah kota/kabupaten penyangga untuk daerah-daerah pemekaran di Deiyai, Dogiyai, Paniai di Nabire. Jadi, saya mengecek di Nabire.

1462. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Pertanyaan saya adalah yang melakukan pengecekan logistik di Dogiyai dan Deiyai itu siapa?

1463. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya minta pertegasan lagi penjelasannya, Bapak?

1464. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Tadi Saudara saksi mengatakan Saudara berada di Nabire.

1465. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

1466. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Untuk melakukan pengecekan terhadap logistik.

1467. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Klarifikasi, Bapak. Saya bukan pergi untuk pengecekan, saya pergi untuk supervisi hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, saya sambil mengecek.

Jadi, saya tidak dimandatkan oleh KPU provinsi semata-mata untuk mengecek logistik. Saya melakukan supervisi terhadap hasil putusan Mahkamah untuk Paniai yang menang di Nabire.

1468. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Baik. Pertanyaan saya adalah siapa yang melakukan pengecekan terhadap logistik itu yang diberikan tugas secara khusus?

1469. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Ada tim ... ada tim yang ditunjuk oleh KPU provinsi untuk mengecek hanya sampai di ibu kota kabupaten. Lalu ke ibu kota kabupaten, kami memerintahkan tim di kabupaten untuk melakukan sampai ke daerahnya masing-masing.

1470. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Oke. Pertanyaan saya adalah apakah sesudah sampai di kabupaten itu (...)

1471. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kabupaten apa itu?

1472. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Misalnya sekarang ini Dogiyai karena Saudara saksi tadi mengatakan mengecek itu di Nabire ya (...)

1473. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

1474. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Untuk tiga kabupaten ya, Dogiyai, Paniai. Betul begitu?

1475. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Dogiyai, Paniai, Deiyai.

1476. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Oke. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Saudara sudah cek tanggal 6 Juli apakah Saudara Saksi mengetahui bahwa dari tiga kabupaten ini tadi, logistik itu memang sudah sampai ke distrik atau belum pada tanggal 6?

1477. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Bapak, logistik itu ada beberapa tahap yang harus didorong. Jadi, tidak semua serta-merta global satu kali tanggal 6 baru dorong semua satu kali, tidak.

Ada logistik itu didorong bertahap, bertahap. Misalkan surat suara atau form-form itu didorongnya bertahap dan kalau didorong satu kali, Bapak tidak ada track yang besar bisa antar satu kali.

Jadi, mereka dorong. Pas tanggal 6 yang saya tadi sebut, itu masih ada sebagian logistik di Nabire untuk beberapa kabupaten dan saya melihat dengan mata kepala.

1478. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Baik. Itu tanggal 6 masih Saudara saksi lihat di Nabire, ya?

1479. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

1480. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Pertanyaan saya adalah (...)

1481. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Bukan berarti semua logistik masih tanggal 6 di Nabire.

1482. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Baik, baik, baik.

1483. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Masih sebagian yang sudah (...)

1484. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Sebagian sudah dikirim.

1485. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Sudah keluar.

1486. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Makanya pertanyaan saya adalah sebagian yang masih berada di Nabire itu, siapa yang mengantarkannya ke kabupaten lain dan kemudian yang menyampaikannya di distrik?

1487. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tahu enggak, Saudara?

1488. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Oh, kalau itu saya tidak tahu, Pak. Saya hanya melihat ada yang bertugas, ya tadi seperti disampaikan oleh Ketua KPUD Dogiyai bahwa itu tugas pihak ketiga. Dia melakukan, kami hanya mendapat laporan. Baik, kami dapat laporan di tingkat kabupaten, kami mengecek ke tingkat kabupaten. Kabupaten melaporkan ke tingkat provinsi. Jadi, bukan kami.

Ada pihak ketiga yang mendorong logistik dalam pengawalan seperti tadi dijelaskan juga oleh ketua KPU provinsi bahwa ketika logistik didorong, pihak aparat kami minta untuk pengawalan dokumen negara sampai ke tempat tujuan masing-masing.

1489. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, cukup ya. Dia tidak tahu.

1490. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Baik.

1491. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, masih ada?

1492. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Masih ada.

1493. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

1494. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi/ahli. Pertama ... kepada Ahli maksud saya ... kepada Ahli. Apakah betul Ahli pernah menyusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 1/KPTS/KPU Provinsi 030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara?

1495. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Itu ditetapkan oleh KPU provinsi secara kolektif karena di sana tidak ada keputusan perorangan, tetapi dimusyawarahkan bersama-sama lima komisioner. Kemudian, ditetapkan dalam petunjuk teknis, bukan peraturan. Karena kami tidak diberikan kewenangan untuk membuat sebuah regulasi berupa peraturan yang mengikat, tapi hanya petunjuk teknis bagaimana memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi, kami lakukan itu.

1496. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Baik. Apakah Ahli juga yang menyusun Berita Acara Nomor 03/BA/B15/2013 bersama Ketua KPU Beni Sweny, Selviana, Ferry Kareth, Cipto Wibowo.

1497. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Itu Berita Acara itu ditetapkan oleh KPU provinsi bukan orang per orang.

1498. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Ya. Maksud saya apakah Ahli ikut dalamnya?

1499. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Majelis Yang Mulia, kami keberatan karena ini terkait dengan fakta, bukan keahlian dari Ahli.

1500. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Bukan, ini masalah fakta juga, Pak.

1501. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya tidak apa, terus lanjut, lanjut!

1502. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Itu ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua.

1503. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Ya, termasuk Ahli kan?

1504. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Termasuk salah seorang anggota KPU di dalamnya.

1505. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Ya.

1506. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Lima-lima menetapkan bersama-sama dan ditandatangani bersama-sama.

1507. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Yang saya tanyakan, apakah Ahli ikut di dalamnya?

1508. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Kami ikut di dalamnya.

1509. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Terima kasih. Kemudian saya ingin tanyakan, dalam sistem noken siapa yang dibolehkan untuk membuka, menghitung surat suara dalam noken tersebut?

1510. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Dalam sistem noken, kami tadi dari awal sudah jelaskan bahwa di lapangan itu bervariasi, ada yang dilakukan di dalam noken ini dilakukan oleh KPPS, tapi ada yang dalam noken itu oleh masyarakat setempat, katakanlah itu sistem ikat, itu langsung disampaikan kepada PPS. Kemudian, PPS membuat Berita Acara. Kemudian, dilanjutkan secara berjenjang.

1511. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Kenapa itu saya tanyakan? Sebab di dalam tata cara penggunaan noken yang Saudara Ahli ikut membuat di dalamnya dalam Pasal 3 ayatnya yang ketiga, ini jelas ditekankan bahwa selama berlangsung

pemungutan suara, noken yang telah berisi surat suara tidak dibenarkan untuk dibuka, dihitung, dibawa oleh tokoh masyarakat, kepala suku yang mewakili (...)

1512. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Keberatan Majelis!

1513. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, sebentar, tunggu dulu selesai pertanyaannya karena ini memang berkaitan dengan keahlian.

1514. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Sebentar, Pak, saya belum selesai, Pak ya. Tidak dibenarkan untuk dibuka, dihitung, dibawa oleh tokoh masyarakat, kepala suku yang mewakilinya. Isi noken hanya dapat dibuka dan dihitung oleh petugas KPPS. Ini peraturan tata cara penggunaan noken yang Ahli buat bersama KPU. Tolong jelaskan, Ahli.

1515. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

1516. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Kami ralat tadi bukan peraturan, tapi itu petunjuk teknis. Kemudian petunjuk teknis itu hanya berlaku sekali saja pada saat pemungutan suara gubernur pada pemilu 2013 kemarin, bukan berlaku untuk pilpres yang sekarang ini.

Jadi kami kira pertanyaannya tidak pas dan tidak klop karena sekarang terkait dengan pilpres bukan pemilu gubernur, dan kami tidak punya kewenangan lagi untuk menyusun suatu petunjuk kepada KPU di tingkat bawah pada saat ini karena kami bukan komisioner KPU provinsi.

1517. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Pertanyaan saya selanjutnya adalah Anda kan sebagai Ahli, ya kan? Sebagai Ahli, kan?

1518. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Ya, berpengalaman dalam pemungutan suara.

1519. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Okelah, Ahli.

1520. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

1521. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Nah pertanyaan saya, apakah ini berlaku secara dinamis atau statis dalam suatu pembukaan noken?

1522. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Hanya berlaku satu kali pada pemilu kepala daerah pada saat itu.

1523. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi untuk juknis yang itu, menurut Ahli ini hanya berlaku untuk pilgub (...)

1524. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Khusus untuk pilgub?

1525. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Pilgub pada saat itu.

1526. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

1527. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Karena bukan KPU yang sekarang.

1528. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya, silakan lanjut pertanyaan lain.

1529. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Ya, ya, ini perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Karena dalam permohonan kami, kami tidak mempermasalahkan sistem noken, yang kami permasalahan adalah proses yang terjadi. Katanya ada noken tapi ternyata tidak ada noken, dan rekapitulasi dilakukan di kabupaten atau distrik. Ini yang kami permasalahan.

1530. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, fakta itu nanti diajukan ke Mahkamah sebagai bukti, akan dinilai oleh Mahkamah.

1531. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Baik, baik, baik, Ketua. Kemudian, saya ingin bertanya kepada Ketua KPUD Provinsi ... KPU provinsi, ya, Ketua KPU Provinsi Papua. Saya ingin nama dari Ketua KPUD Puncak Jaya, siapa Pak?

1532. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ingat KPU Kabupaten Puncak Jaya?

1533. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Yang Mulia, mungkin saya lupa karena cukup banyak 29 KPU kabupaten/kota.

1534. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Kalau Tolikara?

1535. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Hosea Genongga.

1536. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Yahukimo?

1537. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini untuk apa?

1538. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Karena begini, Yang Mulia. Saya perlu menanyakan ini karena ketua-ketua KPUD tersebut saat ini sebagai tersangka, dalam kasus pidana pileg kemarin sehingga kalau mereka menandatangani rekapitulasi (...)

1539. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tidak relevan, Majelis.

1540. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Relevan, Majelis.

1541. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Yang Mulia, ini perlu kita bantah. Ini tidak benar, proses sidangnya belum selesai, Pak.

1542. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar!

1543. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Belum ada putusan di (...)

1544. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara Saksi, sebentar! Jadi, ini melalui di sini ya, jadi Saudara tanyakan saja, tidak usah tanya kepada nama ... Saudara mengkonfirmasi saja ya, informasi itu apakah benar jadi tersangka? Ya tanyakan saja.

1545. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Baik, baik, Yang Mulia.

1546. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

1547. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Terima kasih. Saudara Saksi sekali lagi, apakah betul para Ketua KPUD yang saya sebutkan tadi statusnya sebagai tersangka?

1548. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Baik, Yang Mulia, mungkin saya perlu klarifikasi.

1549. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

1550. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Bahwa proses ini (...)

1551. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Apakah betul, yang saya tanyakan?

1552. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, juga bisa jelaskan (...)

1553. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sedang menjawab, tunggu dulu, ya. Sedang menjawab.

1554. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Lewat pemilihan pileg kemarin ada sedikit kesalahan yang dila ... yang didorong oleh teman-teman kita Bawaslu bahwa telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman kita KPU kabupaten/kota, sehingga didorong kepada Gakkumdu dalam pemeriksaan Berita Acaranya dan sampai pada hari ini proses sidang di pengadilan yang menyatakan bahwa mereka bersalah belum ada. Sehingga kami sebagai Ketua KPU Provinsi Papua kami belum bisa membikin jaminan bahwa mereka salah di dalam pengambilan keputusan rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten/kota.

1555. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Ya, ini kenapa saya tanyakan? Karena kami mendapatkan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua, nama-nama tersebut.

1556. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, saya juga punya.

1557. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Ya, itu satu. Yang kedua, untuk Kabupaten Sarmi itu ketua KPUD-nya sebagai terpidana, sudah diputuskan (...)

1558. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Kami sudah memberhentikan (...)

1559. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Apakah betul?

1560. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Sudah memberhentikan beliau.

1561. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Terima kasih.

1562. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup?

1563. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Beatrix. Terima kasih, Ketua KPUD Provinsi.
Tadi Ibu Beatrix katakan bahwa tanggal 6 Ibu di Nabire, ya?

1564. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

1565. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Ya, kemudian Ibu berangkat ke Jayawijaya tanggal 7?

1566. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Tanggal 7?

1567. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Ya.

1568. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

17, bukan 7. Tadi saya sudah klarifikasikan pada waktu ditanya.

1569. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Ya.

1570. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya bukan berangkat tanggal 17 ... eh, 7.

1571. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Tidak, tadi dalam keterangan Ibu pertama (...)

1572. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya sudah klarifikasi tadi kepada yang bertanya (...)

1573. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tanggal 17 (...)

1574. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

17.

1575. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

1576. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Bukan 17. 16 saya naik ke Wamena (...)

1577. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Tanggal 4 Ibu mendapat mandat?

1578. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tanggal 4 itu ke Nabire.

1579. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Ya, Ibu mendapat mandat, kemudian ke Nabire?

1580. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Siap.

1581. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Ya, kan. Terus tanggal 6 itu logistik akan diantar ke Kabupaten Dogiyai, Paniai, ya kan?

1582. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya (...)

1583. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Klarifikasi, saya sekali lagi, saya bukan tujuan khusus hanya untuk periksa logistik. Fungsi pertama saya adalah supervisi (...)

1584. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Supervisi, betul.

1585. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kemudian saya hanya mengambil langkah adalah mengecek karena saya berkonfirmasi pak ketua (...)

1586. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau itu sudah jelas. Tadi yang Jayawijaya apa yang mau ditanyakan, Jayawijaya?

1587. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Sedangkan berada di Jayawijaya itu tanggal ... saya naik untuk ke Lanny Jaya melihat rekap itu tanggal 15. Turun dari Lanny Jaya di Wamena, perjalannya empat jam dari Lanny Jaya ke Wamena, 16.

1588. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Ya.

1589. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

16 dan saya mengecek di Wamena untuk adik-adik, saya menelepon, "Bagaimana, ada Pleno?"

Mereka sampaikan, "Kaka, kami siap untuk Pleno 16 dan 17." 17 paginya saya terus pulang.

1590. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Oh, jadi bukan tanggal 7 Bu, ya?

1591. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Ya, tadi saya kan sudah bilang.

1592. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

1593. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Baik. Saya hanya mau klarifikasi itu, Pak. Karena jarak antara Jayapura dan Nabire ... eh, Jayawijaya dan Nabire ini harus kembali ke Jayapura dulu. Terima kasih, Pak.

1594. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, cukup. Baik (...)

1595. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Masih lanjut, Yang Mulia.

1596. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih ada?

1597. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada beberapa tambahan, mohon izin.

1598. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini yang depan apa yang belakang? Masih ada yang juga depan ini. Koordinasi dulu yang mana yang duluan. Ya, silakan.

1599. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Saya tolong melanjutkan kepada Saksi Ibu Beatrix Wanane. Ya, kalau tidak salah tadi Ibu mengatakan bahwa masalah proses pilpres logistik semuanya beres, tidak ada masalah, ya? Benar enggak tadi mengatakan demikian?

1600. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kalau tidak salah, berarti benar kan.

1601. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Enggak, saya cuma menanyakan, apakah (...)

1602. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Tadi saya sudah nyatakan bahwa benar.

1603. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Benar, ya. Logistik juga beres, ya. Bisa enggak beri penjelasan logistik semua sampai pada tempatnya dan beres, tetapi penjelasan Saudara bagaimana tentang dianulirnya dua distrik karena logistik tidak ada, sehingga tidak ada pilpres dilakukan, bisa dijelaskan hal ini?

1604. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Untuk hal ini saya tidak bisa menjelaskan karena itu yang dilaporkan adalah panwas, sehingga yang bisa menjawab ini adalah panwas bukan saya, Ibu.

1605. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Bukan soal itu. Kan itu kan sampai ada keputusan dianulir ya, tentunya kan ada proses (...)

1606. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kan panwasnya yang menganulir, bukan saya (...)

1607. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Tunggu, tunggu. Ibu tenang-tenang saja, jawab saya, saya juga bertanyanya juga pelan-pelan. Yang saya tanyakan, tadi kan Ibu bilang, "Beres." Logistik sampai semua. Sesuai dengan laporan dan segala rupa. Ada yang dilihat dengan mata kepala sendiri.

Yang saya ingin tanyakan, prosesnya sampai dianulirnya dua distrik ini, tentunya kan di provinsi itu dilakukan, sehingga dianulirnya dua distrik ini, tentu Ibu bisa menjelaskan kepada kami semua karena Ibu bilang sampai logistik, sedangkan proses anulir ini bukan karena logistik tidak ada. Tolong dijelaskan?

1608. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Keberatan, Majelis. Ini sudah disampaikan (...)

1609. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi sebenarnya begini. Tadi KPU Kabupaten Dogiyai ya, mengenai dua itu dan juga sudah dijelaskan pada saat rekapitulasi, ini saya me-remind saja, mengingat kembali saja penjelasan dari saksi-saksi ini bahwa untuk dua itu tidak bisa dilaksanakan PSU atas rekomendasi karena sudah sangat dekat, sudah sangat dekat dengan tanggal berakhirnya tanggal 19, tidak boleh ada PSU setelah tanggal 19. 19 Agustus ... 16 ... 19 ... 19 Agustus, kan ... apa ... 10 hari setelah itu. Karena itu berhubungan dengan logistik apa saja tidak mungkin dalam waktu itu untuk mengadakan PSU, itu yang tadi dijelaskan.

1610. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Ya, saya mengerti masalah (...)

1611. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa yang mau di (...)

1612. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Yang saya tanya kisruhnya itu sehingga akhirnya ... kan mau di-PSU, kisruhnya yang sebelum ditetapkan anulir itu yang ingin kami dengarkan pejasannya, kan hanya mengatakan bahwa panwaslu mengusulkan untuk PSU (...)

1613. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Itu sudah dijelaskan (...)

1614. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Tapi PSU-nya ada 1.000 lembar, hanya tinggal 1.000 lembar surat suara, sedangkan dibutuhkan 18.200 kertas suara. Itu masalah itu.

1615. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Itu sudah dijelaskan (...)

1616. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Tapi yang sebelumnya penjelasannya itu belum dengar (...)

1617. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara Kuasa tidak usah dipotong, ya! Jadi biar saya yang arahkan sidang, ya. Jangan Saudara yang arahkan sidang!

Jadi begini, sekali lagi bahwa yang logistik yang tidak mungkin itu adalah PSU. Kalau bukan PSU sudah selesai, cuman dipermasalahkan di situ sehingga minta untuk PSU.

1618. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Yang diulang (...)

1619. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu yang tidak mungkin logistik.

1620. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Ya, yang ingin saya tanyakan (...)

1621. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa yang ditanyakan?

1622. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Penyebab dari mengapa panwaslu meminta PSU itu? Prosesnya. Tentunya kan dipersoalkan, masalahnya apa?

1623. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tahu, enggak Saudara?

1624. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya tidak tahu, tadi saya sudah sampaikan, Ibu tanya pada panwas.

1625. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Jadi tidak tahu?

1626. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Ya. Tadi saya sudah (...)

1627. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Tidak tahu.

1628. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Tidak tahu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi masalah yang tadi penggunaan-penggunaan sistem noken maupun sistem ikat ya, di suatu kampung-kampung yang ditetapkan itu.

Tadi ada yang ditarik ke distrik, ada yang di kampung itu sendiri, yang saya ingin tanyakan tentunya di dalam setiap TPS kan itu memang ada penunjukkan dari KPU Papua sendiri. Yang ingin saya tanyakan di dalam sistem-sistem noken maupun ikat, semua panitianya itu sudah ada ditetapkan sehingga dibuatnya noken itu ada C-1, dimana para saksi-saksi pasangan calon ini bisa hadir untuk mengisi tentang C-1 tersebut?

1629. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Saya minta Ibu mengulangi penjelasan (...)

1630. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Eenggak, pertanyaanya apa? Pertanyaan.

1631. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Pertanyaan saya, di dalam penetapan penghitungan perolehan suara dengan sistem noken ataupun ikat itu, apakah pasangan calon dari kedua belah pihak itu dihadirkan dan ikut menandatangani sebagai saksi di dalam proses itu?

1632. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Di tingkat mana, Bu?

1633. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Ya tingkat desa.

1634. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Oh, saya bukan di tingkat desa.

1635. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Eenggak, tapi tentu ada laporan, laporan di dalam C-1 dari kabupaten, itu yang saya ingin jelaskan karena (...)

1636. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kalau laporan tadi saya sudah nyatakan bahwa di tingkat kabupaten atau itu urusannya teman-teman komisioner di kabupaten dan mereka yang mengetahui masalahnya. Sedangkan yang saya baru ketahui di provinsi hanya 3, tadi kan saya sudah jelaskan.

1637. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Bukan itu maksud saya.

1638. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Catat, pertanyaannya begini, biar saya ... aduh ... saya ambil alih sebentar. Apakah di setiap TPS ada KPPS-nya? Harus hadir KPPS dan juga saksi-saksi, menurut aturan?

1639. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Harus.

1640. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Harus.

1641. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Nah, saya ingin (...)

1642. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi ada tentunya karena harus.

1643. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Nah, sekarang kan saya ingin tanyakan lagi, tadi kan ada saksi seperti Saksi Novela. Dia adalah saksi dari kampung tersebut. Awutabu ... Awubutu. Nah, dalam hal dia sebagai saksi jika ada penghitungan suara di ... untuk kampung itu tentunya kan dia harus mengetahui hal itu, hadir dalam ... jika ada proses itu.

Nah, itu ada enggak laporan Saudara? Karena Saudara bilang enggak ada masalah, semua ikut tanda tangan, semua tidak keberatan. Nah, ini yang saya ingin ... yang jelas-jelas saja bagaimana penjelasan Saudara?

1644. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Itu sebabnya tadi saya sampaikan, Ibu. Saya itu di level provinsi.

1645. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Jadi Saudara tidak tahu?

1646. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak tahu.

1647. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Kalau di level kabupaten kan tadi saya sudah menyerahkan (...)

1648. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Jadi tidak ada laporan dari kabupaten ya?

1649. SAKSI DARI TERMOHON: BEATRIX WANANE

Tidak ada. Tadi kan saya sudah (...)

1650. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Ya, berarti nanti saya akan tanya kepada ... dari KPU (...)

1651. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, cukup. Dia tidak tahu.

1652. KUASA HUKUM PEMOHON: ELZA SYARIEF

Ya, sudah. Tidak tahu.

1653. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih ada?

1654. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

1655. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan, silakan. Kepada siapa?

1656. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kepada Pak Sangadji dulu.

1657. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kepada Ahli ya?

1658. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kepada Ahli, Pak Sangadji.

1659. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Silakan.

1660. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada pertanyaan begini, Pak. Dengan pengalaman Bapak yang sejak tahun 1977 ya, Pak ya, menjadi penyelenggara. Apakah ada pemetaan, pemetaan wilayah kabupaten-kabupaten kota mana yang penyelenggaraan pemilunya menggunakan noken dan yang coblos, Pak, yang selama ini dilakukan oleh KPU di wilayah Provinsi Papua?

1661. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Pada saat kami masih di KPU, belum pernah dilaksanakan pemetaan wilayah untuk daerah-daerah atau distrik atau kampung yang mencoblos dan menggunakan sistem ikat.

1662. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, kemudian Saudara Ahli, apakah ingin kami ketahui ... memang benar di kabupaten-kabupaten pegunungan, khususnya 14 kabupaten yang kami sampaikan dalam permohonan, Jayawijaya, Duga, Yakuhiro, Puncak Jaya, Puncak Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Lani Jaya, dan Mamberamo Tengah, selama Ahli menjadi penyelenggara sampai dengan saat ini, penyelenggaraan pemilunya menggunakan sistem noken? Bagaimana, Pak Sangadji?

1663. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, dinyalakan dulu itu. Tadi dimatikan, ya.

1664. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Apakah benar ke-14 kabupaten yang kami sebutkan tadi, dari waktu ke waktu memang penyelenggaraan pemilunya menggunakan sistem noken?

1665. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Pada saat kami menjadi penyelenggara pemilu, belum 14 kabupaten. 14 kabupaten ini baru pemekaran, terhitung tahun 2001. Kemudian, dulu hanya Paniai di pedalaman itu hanya Paniai, Jayawijaya ... hanya du ... maaf kami ulangi, di pegunungan itu hanya Kabupaten Paniai, kemudian Kabupaten Jayawijaya, hanya 2 kabupaten. Selebihnya itu adalah pemekaran setelah otonomi khusus, tahun 2001. Jadi, pada saat ini pemekaran menjadi 29 kabupaten, itu pelaksanaan sistem coblos maupun ikat itu bervariasi.

Pada saat kami menjadi penyelenggara di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kami beritahukan agar semua menggunakan kotak suara, di ibu kota kabupaten. Di luar daripada ibu kota kabupaten, tergantung kepada masyarakat setempat. Namun, kotak suara tetap disediakan. Pada saat ini kami tidak tahu persis karena kami bel ... berada di luar daripada penyelenggara pemilu.

1666. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kemudian, pertanyaan berikutnya, Pak Sangadji. Meskipun itu ada kotak suara.

1667. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Coba ganti dulu miknya, Petugas.

1668. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Lanjut, Saudara Ahli. Untuk pengadaan noken itu sendiri sebagai kotak suara, apakah diadakan oleh penyelenggara atau masyarakat adat yang menyediakan?

1669. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Tadi tidak salah kami sudah sampaikan bahwa noken itu sendiri tidak pernah dianggarkan apalagi dibelikan oleh penyelenggara pemilu mulai dari KPU provinsi, KPU kabupaten. Semuanya atas inisiatif masyarakat dan noken itu pun dibawa oleh masyarakat setempat dan setelah itu mereka bawa kembali ke tempat masing-masing. Jadi, KPU hanya menyediakan kotak suara, bukan noken. Demikian.

1670. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Kemudian, Saudara Ahli, bagaimana pengamanan yang berlangsung selama ini terhadap proses pemungutan suara atau

kesepakatan yang menggunakan noken, sementara suara itu masuk di dalam tas, kemudian pengawalannya dengan melihat geografis yang sulit, mengirim logistik saja sampai 2 minggu. Ketika dibawa dari kampung ke distrik, dari distrik ke kabupaten, apakah yang selama ini berlangsung, KPU atau penyelenggara juga menyertakan saksi-saksi untuk selalu mendampingi atau mengawasi suara itu menjadi aman sampai dengan kabupaten?

1671. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Penyelenggara ... penyelenggara mulai dari KPU provinsi sampai dengan kabupaten selalu memberikan pemberitahuan kepada par ... kepada saksi pasangan calon untuk mengirimkan saksinya. Apakah ada saksi atau tidak, semua berpulang tergantung kepada pasangan calon masing-masing terkait dengan kondisi daerah di sana, apakah dia mampu jalan kaki 2-3 hari atau 1 minggu? Itu semua berpulang kepada mereka. Jadi, pada saat nyata tidak ada saksi, bukan salahnya penyelenggara pemilu.

Kemudian, pengamanan dalam perjalanan, Berita Acara itu tergantung kondisi daerah, ada yang dibuat di TPS oleh KPPS, ada yang dibuat di PPS. Pengamanannya langsung karena kalau terkait dengan noken itu langsung oleh yang melakukan kesepakatan tadi itu langsung mengawasi sampai di tingkat distrik, sehingga semuanya dimasukkan dalam Berita Acara.

1672. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, pertanyaan kepada Ahli, terima kasih. Kemudian, cukup, ya. Kemudian ke Ketua KPU Provinsi, Pak Adam Arisoy. Pak Adam, pertanyaannya, apakah ada kabupaten yang pemilunya tidak serentak dilaksanakan?

1673. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, ini pertanyaannya paling ke Yahukimo, ya. Memang Yahukimo itu ada 7 distrik yang pada tanggal 8 sampai tanggal 9 itu tidak bisa didistribusikan logistiknya dikarenakan geo dan cuaca yang tidak bisa kompromi pada waktu itu, sehingga pada tanggal 10 baru logistik didistribusikan ke 7 distrik tersebut.

1674. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Kemudian berikutnya, Saudara Saksi, ketika Pleno di provinsi, KPU menerbitkan SK rekapitulasi tingkat provinsi yang di

dalamnya menyebutkan ada 2 distrik untuk pemilu susulan. Betul, Pak, ya?

1675. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Perlu saya jelaskan bahwa pemilu berlangsung tanggal 9 dan rekomendasi Panwas Kabupaten Dogiyai tanggal 15. Diterima oleh teman-teman KPU Kabupaten Dogiyai tanggal 16. Peraturan di dalam PKPU 10 hari pelaksanaan PSU. Dan logistik yang ada di Kabupaten Dogiyai tinggal 1.000 lembar surat suara, sedangkan kita harus membutuhkan sekitar 18.000 surat suara.

1676. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau itu sudah dijelaskan berkali-kali tadi. Cari yang lain?

1677. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, pertanyaannya singkat, apakah betul itu ada amar tentang atau keputusan tentang pemilu susulan, begitu, Pak?

1678. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, saya perlu jelaskan bahwa bagaimana mungkin kita lakukan pemilu susulan? Waktunya sudah tidak ada.

1679. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Di dalam keputusan tersebut ada pemilu susulan di 2 distrik? Ada apa enggak?

1680. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ada.

1681. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada, ya. Dan sampai (...)

1682. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Logistiknya, rekomendasinya keluar kan tanggal 15, diterima oleh KPU kabupaten/kota.

1683. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, itu sudah.

1684. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Bahwa memang terjadi kesalahan atau terjadi ketidakberesan di 2 distrik itu. Itu diterima oleh teman-teman kita, KPU, tanggal 16.

1685. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian, apakah ketika di Pleno tingkat nasional, keputusan ini dianulir tentang pemilu susulan?

1686. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Tidak ada pemilu susulan, sedangkan (...)

1687. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bukan pemilu ulang, bukan pemilu susulan, beda itu.

1688. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Di dalam SK KPU, Yang Mulia, sebutannya pemilu susulan di 2 distrik.

1689. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dua distrik di Dogiyai?

1690. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya.

1691. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di Dogiyai.

1692. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Pemilu susulan, kemarin dibacakan oleh saksi.
Kemudian berikut, Pak Adam Arisoy, kapan di KPU provinsi itu dilakukan pembukaan kotak suara?

1693. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Baik, mungkin perlu saya sampaikan bahwa sejak kami semua KPU Provinsi Papua dan kabupaten/kota tetap berada di Jakarta, jadi untuk pembukaan kotak suara khusus untuk Papua kita tidak lakukan. Karena C-1 yang ada di dalam kotak suara itu pun juga yang ada di kami, kabupaten/kota. Jadi, untuk Papua kita tidak lakukan pembukaan kotak suara.

1694. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Karena C-1 nya tidak ada di dalam kotak suara, begitu?

1695. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Bukan tidak ada. Di dalam berkas yang kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi, semua C-1 kami ada.

1696. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Sampai dengan saat ini belum dilakukan pembukaan?

1697. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, kami belum melakukan pembukaan.

1698. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Pak Ketua. Selanjutnya, ke Pak Ham Nawipa, Yang Mulia, mohon izin, Ketua KPU Paniai. Pak Nawipa, tadi ada di Kabupaten Paniai ada berapa distrik, Pak? Mohon maaf tadi untuk mengingatkan.

1699. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

10 distrik.

1700. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

10 distrik. Ada berapa distrik yang pemungutannya, pemungutan suaranya dilaksanakan di distrik, tidak di kampung?

1701. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ini ada 4.

1702. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada 4.

1703. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Satu distrik, Distrik Paniai Timur ada 4 TPS yang melakukan pemungutan suara, yang lain itu lakukan sistem ikat dan sistem noken.

1704. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Sistem ikat itu di distrik, Pak ya, tidak di kampung, ya?

1705. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya, betul.

1706. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Kemudian, cukup, Pak. Satu lagi kepada KPU Yalimo, mohon izin, Yang Mulia.

1707. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ketua KPU Yalimo.

1708. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Siap, Yang Mulia.

1709. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Untuk klarifikasi saja, tadi jumlah DPT di Yalimo berapa, Pak, mohon maaf?

1710. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Jumlah DPT di Yalimo 67.863.

1711. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

67.863. Kemudian, menurut keterangan Bapak tadi di Yalimo itu sudah tidak dengan noken. Betul, Pak?

1712. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Betul.

1713. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ingin klarifikasi, apakah benar tadi jumlah perolehan Pasangan Nomor Urut 1 adalah 17.812?

1714. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Benar dan Berita Acaranya langsung kami serahkan sama saksi atas nama Joel Waliangken dan tanda terima ada.

1715. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kemudian, apakah perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 itu 50.050?

1716. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Benar.

1717. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Nah. ketika itu dijumlah ... mohon izin, Yang Mulia, jumlahnya adalah 67.862. Betul, ya Saksi, ya?

1718. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Benar.

1719. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Sama dengan jumlah DPT ditambah 1 suara tidak sah. Itu dari mana, Pak, 1 suara tidak sah itu, sementara DPT-nya sama dengan suara sah?

1720. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

DPT-nya, mohon dipahami baik 67.863. Suara sah seluruhnya 67.862. Jelas.

1721. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Jadi, ini sistem coblos ya, bukan sistem noken, ya?

1722. SAKSI DARI TERMOHON: YANES ALITNOE

Sistem coblos.

1723. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, cukup.

1724. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya lah cukup. Ya, dalam bahasa itu law is experience. Law itu adalah hukum itu adalah fakta, itulah faktanya, ya. Ya, silakan.

1725. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada Ketua KPU Provinsi, Pak Adam. Saya ingin kejelasan, pada tanggal 9 Juli, Pak Adam itu mencoblos di mana?

1726. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, baik. Mungkin saya perlu jelaskan bahwa tanggal 8 memang saya ada di Wamena. Pagi saya berangkat ke Wamena, itu kan cuma 30 menit terbangnya, sore saya pulang.

Tanggal 9, saya lakukan pencoblosan di Jayapura, di Kelurahan Vuria, Kota Raja.

1727. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Tanggal 8 itu Bapak berada di Wamena atau di (...)

1728. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Saya di Wamena.

1729. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Jayawi ... Jayawijaya?

1730. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Jayawijaya.

1731. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Jayawijaya?

1732. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya. Sorenya saya pulang.

1733. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Sorenya pulang?

1734. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya.

1735. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Tanggal 8 sore?

1736. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya.

1737. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Jadi, berarti tanggal 9 Bapak mencoblos di Jayapura?

1738. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, saya coblos di Jayapura.

1739. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Oke, pada saat tanggal 8 itu, Bapak katakan tadi melakukan pemantauan terhadap tiga kabupaten untuk melakukan cross-check distribusi logistik Kabupaten Mamberamo, Tolikara, dan Jayawijaya?

1740. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Menduga.

1741. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Menduga?

1742. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

He em.

1743. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Ya, empat, ya? Empat, ya. Artinya, ada koordinasi secara intensif yang Bapak lakukan terhadap ketua KPU setempat?

1744. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, sejak saya tiba pagi, dari Jayapura saya sudah menelepon mereka bahwa saya akan ke Wamena untuk kita melihat cross-check logistik distribusinya. Dan saya tiba di Bandara Wamena, saya dijemput dan kita lihat Jayawijaya setelah saya sampai di gudang dan kita lihat pada hari itu juga ... pada pihak ketiga datang menjemput logistik yang mau dikirim karena di Jayawijaya ada suatu distrik yang harus menggunakan pesawat. Dan hari itu juga kita lihat diantar ke airport dan dinaikkan ke helikopter, dan dibawa terbang ke Distrik Trikora.

1745. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Ya, pada waktu itu jadi apa hasil dari pantauan Bapak terhadap empat ... empat kabupaten ini? Padahal waktu tinggal satu hari lagi menjelang pemilu.

1746. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, jadi distrik-distrik yang seperti Wamena, Wamena itu kan tidak bisa didi ... didistribusikan tanggal 7 atau tanggal 6 karena itu kan lewat ... lewat mobil saja, dekat saja kan. Sehingga tanggal 8 itu yang didistribusikan itu Distrik Trikora. Sedangkan yang lain yang dekat itu di distrik ... didistribusikan (...)

1747. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Enggak, maksud saya begini (...)

1748. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Tanggal 9 pagi.

1749. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Maksud saya begini, dari laporan empat ketua KPU tersebut yang Bapak koordinasikan, apa laporan mereka terhadap distribusi logistik di empat kabupaten itu terhadap distribusi yang ada?

1750. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya.

1751. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Apakah ... apakah semuanya sudah tersampaikan atau masih ada kendala, apakah cuaca yang belum tersampaikan, gitu? Secara riil gitu saya minta kepastiannya.

1752. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, secara riil tanggal 8 saya berada di sana, semua kabupaten ... semua empat kabupaten itu logistiknya sudah didistribusikan, tinggal Yahukimo yang tidak bisa didistribusikan karena cuacanya sangat buruk sekali pada waktu itu.

1753. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Yahukimo kan tidak masuk dalam pertemuan Bapak ini?

1754. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya karena itu harus menggunakan pesawat lagi sekitar 30 menit.

1755. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Ya, jadi artinya empat kabupaten itu semua logistik menurut keterangan dari ketua KPU kabupaten tersebut, sudah tersampaikan ke masing-masing tempat?

1756. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, jadi ... jadi seperti begini, Pak, itu seperti Kabupaten Yahukimo ... eh, Kabupaten Lanny Jaya, semua dis ... semua daerah khusus (...)

1757. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Bukan, saya mau tanya hanya di empat kabupaten yang Bapak melakukan pertemuan di Jayawijaya. Itu saja jawab!

1758. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, maka (...)

1759. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Apakah empat (...)

1760. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Saya perlu menjawab Bapak.

1761. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Ya.

1762. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Supaya jelas, kan?

1763. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Ya, ya.

1764. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Bapak jangan coba tanya saya, saya tidak bisa menjawab itu dengan baik.

1765. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Ya, ya, silakan!

1766. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Lanny Jaya, Tolikara, Yalimo itu semua menggunakan mobil.

1767. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Ya.

1768. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Semua menggunakan mobil. Sehingga mereka sejak saya ke Wamena, mereka ketemu saya dan mereka menyampaikan bahwa semua logistik telah terdistribusi dengan baik.

1769. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Oke.

1770. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Kuyawage hari itu harus didistribusikan karena itu juga menggunakan pesawat bersamaan dengan Trikora.

1771. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Oke, berarti laporan dari empat itu beres, enggak ada masalah logistik ya sampai (...)

1772. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, logistik didistribusikan (...)

1773. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sudah, sudah. Oke, Sudah jelaslah.

1774. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Yang kedua, saya menanyakan kepada Bapak tentang waktu rekap. Ada beberapa di empat kabupaten itu kan yang KPU-nya sudah ada kasus pidana, pidana pemilu ya. Apakah Bapak mengetahui siapa yang menandatangani rekap kabupaten dari beberapa ketua-ketua KPU tersebut di Puncak Jaya (...)

1775. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Majelis Hakim, kami keberatan pertanyaan. Kami keberatan. Orang sudah ... tadi sudah dijawab (suara tidak terdengar jelas) (...)

1776. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Tidak, ini (...)

1777. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Proses hukum pidana ini.

1778. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Ini (...)

1779. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Kok diulang-ulang ini (...)

1780. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Ini kita mau minta kepastian (...)

1781. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi begini, jadi baru satu yang sudah dihukum dan itu sudah diberhentikan, yang lainnya masih dalam proses. Oke, sudah jelas.

1782. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Ini hanya hasil rekapnya, Yang Mulia. Apakah mereka masih menandatangani hasil rekap itu?

1783. SAKSI DARI TERMOHON: ADAM ARISOY

Ya, mereka kan belum diberhentikan.

1784. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi sudah jelaslah.

1785. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Tidak relevan ini, Saudara Ketua. Tidak (...)

1786. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

1787. KUASA HUKUM TERMOHON: ADNAN BUYUNG NASUTION

Tidak berdasar pertanyaan itu. Wajarlah (...)

1788. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup, cukup, cukup! Cukup, ya!

1789. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Oke, saya kembali ke ... terima kasih, Pak. Saya ke KPU Paniai, silakan duduk, Pak. Ketua KPU Paniai Nawipa, tadi Saudara menjelaskan, Kampung Awabutu itu pencoblosannya ditarik ke Distrik Paniai Timur, benar begitu?

1790. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya, benar.

1791. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Saya pengin kepastian tentang penarikan pencoblosan di Kampung Awabutu itu, apakah pada saat itu dilakukan penarikan atau ada informasi sebelumnya?

1792. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Ya, kan masyarakat kampung itu mereka sepakat logistik harus (suara tidak terdengar jelas) di distrik karena ada kesepakatan itu kesamaan dengan PPD.

1793. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Yang siapa ... kesepakatan atas siapa itu?

1794. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Masyarakat, Pak. Masyarakat Kampung Awabutu.

1795. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Kampung Awabutu sepakat untuk?

1796. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

(Suara tidak terdengar jelas) kerja bersama dengan PPD di tingkat distrik.

1797. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Untuk dilakukan panarikan di ... pencoblosan di Paniai Timur?

1798. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Pemilihannya dilakukan di tempat distrik.

1799. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Distrik Paniai Timur?

1800. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Distrik Paniai Timur.

1801. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Artinya, kesepakatan itu apakah hanya secara lisan atau ada pemberitahuan secara tertulis kepada masyarakat?

1802. SAKSI DARI TERMOHON: HAM NAWIPA

Dia kan kerja sama, masyarakat itu kan kalau memang ada informasi itu selalu (suara tidak terdengar jelas) itu kebiasaan, mereka harus kesepakatan dulu, mereka kerja sama-sama, seperti itu.

1803. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya? Yalah.

1804. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Cukup, Yang Mulia.

1805. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, cukup, terima kasih ya, baik.

1806. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Satu lagi, Yang Mulia.

1807. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dari mana?

1808. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Dari Pemohon, Yang Mulia. Saya ingin menanyakan kepada Ketua KPU atau Komisioner KPU dari Kabupaten Dogiyai.

1809. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terakhir ini!

1810. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Ya, saya ingin tanyakan kepada Saudara Didimus.

1811. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa? Mengenai apa? Yang mana Dogiyai?

1812. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Ya. Saya mau tanya untuk Didimus. Pada saat rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai, apakah hasil rekap itu diisi dalam form pilpres atau pileg?

1813. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Baik, Yang Mulia. Rekap saya melakukan pada jam 19.00 WIT di form pileg dan hasilnya dibacakan depan, semua tim sukses, termasuk ... termasuk 01, 02, ada. Terus, saksi-saksi semua ada di Kabupaten Dogiyai, termasuk tidak ada keberatan dari panwas sampai ini semua.

Termasuk ada sambutan saya kasih kesempatan kepada sambutan, hasil yang termasuk dua distrik tadi disebut-sebut, itu sudah diberikan kepada Nomor 02.

1814. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAY

Saya kira pertanyaan saya hanya apakah dimasukkan dalam form pileg atau pilpres. Itu saja cukup (...)

1815. KETUA: HAMDAN ZOELVA

(Suara tidak terdengar jelas) cukup, hanya itu saja.

1816. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Ya, hasilnya dimasukkan.

1817. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, cukup.

1818. SAKSI DARI TERMOHON: DIDIMUS DOGOMO

Terima kasih.

1819. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, ya. Oh, masih ada. Tadi dari Majelis untuk Ahli. Ya, silakan.

1820. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Ahli, minta keterangan tambahan. Tadi dari paparan dan keterangan diusulkan ke depan bahwa sistem noken itu diatur dalam Perdasus, sebuah instrumen peraturan perundang-undangan yang setingkat peraturan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Memang dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu, materi dari Perdasus harus sudah ditentukan limitatif dalam Undang-Undang Otonomi Khusus dan itu memang tidak ada.

Kita mengetahui bahwa noken ini disebutkan tadi sebagai warisan budaya. Nah, kita mengetahui juga bahwa di Papua itu ada lembaga representasi kultural yang disebut dengan Majelis Rakyat Papua yang anggotanya 42 orang, 14 tokoh agama, 14 tokoh adat, 14 tokoh

perempuan. Itu menggambarkan representasi kultural, sementara representasi politisnya DPRP.

Nah, selama ini, apa pandangan dari Majelis Rakyat Papua terhadap noken itu? Karena ini pertama, Majelis Rakyat Papua itu representasi kultural, sementara noken ini adalah warisan budaya yang bersifat kultural, dan nanti apabila akan dijadikan muatan dari Perdasus salah satu mekanismenya, Perdasus itu tidak hanya dibentuk oleh DPRP dan pemerintah, tapi harus ada persetujuan Majelis Rakyat Papua.

Nah, selama ini, apa pandangan dari Majelis Rakyat Papua ini sebagai tambahan keterangan di sini terhadap noken ini sebagai warisan budaya dan ini sudah menggambarkan representasi masyarakat kultural? Itu sekadar tambahan dalam makalah ini, terima kasih.

1821. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sekaligus dari Hakim Yang Mulia Pak Patrialis.

1822. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Ketua Yang Mulia. Ini Pak Sangadji, ya. Kita ini sebetulnya sudah dua kali ketemu. Dulu tanggal 9 Juni 2014, Bapak juga sebagai Ahli diajukan dalam sengketa pemilu legislatif, juga telah memberikan keterangan yang hampir sama.

Memang persoalan pengamanan dan penghargaan terhadap sistem noken ini masih bermasalah. Kalaupun tadi Bapak mengatakan ada pengawalan sampai ke tingkat distrik. Tokoh atau kepala adat waktu itu datang ke sini dijadikan saksi oleh para pihak, mereka telah memberikan suara kepada seseorang, tapi ternyata di tingkat PPK hilang, hilang. Itu fakta bahwa memang persoalan pengamanan, apalagi sampai tingkat provinsi, apalagi sampai tingkat pusat, itu memang tidak ada yang bisa jamin. Itu kan sangat jauh ya, Pak, ya.

Bapak boleh memberikan komentar, juga boleh tidak. Tapi saya ingin sampaikan ini satu persoalan, bagaimana cara mengamankan ke depan suara masyarakat dalam sistem noken ini. Kalau Bapak punya pengetahuan boleh komentar, kalau enggak, enggak apa-apa, ya. Saya ingin menyampaikan itu.

Yang kedua, saya ingin mendengar suara dari Bawaslu, ya. Terhadap perdebatan antara Kuasa Pemohon Ibu Elza Syarif dengan Ibu Beatrix yang tidak bisa menjawab, tapi justru menunjuk Bawaslu.

Jadi supaya lebih clear dalam persidangan ini dan kita tidak bertanya-tanya, bagaimana posisi yang sebenarnya. Bawaslu ada di sini, saya ingin dengar suara Bawaslu. Tadi saya lihat juga mengikuti dengan baik, silakan.

1823. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar, Ahli dulu, Ahli dulu.

1824. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ada tambahan sedikit, Yang Mulia.

1825. AHLI: HASJIM SANGADJI

Terima kasih, Yang Mulia.

1826. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sebentar, sebentar. Masih ada satu lagi, sekaligus.

1827. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi ya, Drs. SA, ahli ya, ahli Hasjim Sangadji ya. Ada seorang mahasiswa S2 di Gadjah Mada yang pernah menulis tesis dan melakukan riset di Papua tentang sistem noken. Dalam tesis itu, dia bedakan antara noken dan ikat. Apakah Ahli bisa menjelaskan apa perbedaan antara noken dan ikat itu?

Yang kedua, di dalam tesis itu juga dia jelaskan bahwa pada noken ... pada sistem noken itu, pemilih harus tetap datang di TPS. Sedangkan pada sistem ikat, pemilih tidak perlu datang di TPS. Saya minta, apakah riset itu benar adanya sesuai dengan pandangan Bapak atau Bapak punya pandangan yang lain tentang hal tersebut? Terima kasih, Yang Mulia.

1828. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih ada lagi satu.

1829. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ahli (...)

1830. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dicatat dulu, Ahli.

1831. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Patrialis tadi, memang benar bahwa Ahli pernah menjadi ... memberikan keterangan sebagai Ahli pada sidang pileg yang lalu. Lalu, Mahkamah melalui Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tanggal 20 Juni 2014, saya tidak tahu pasti, apakah Saksi sudah pernah membaca. Bahwa Mahkamah memang mengakui sistem noken itu yang tadinya dimulai sejak tahun 2009, putusan perkara tahun 2009. Tetapi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bahwa sistem noken itu hanya dibolehkan pada daerah atau wilayah yang pernah melakukan sistem noken, sehingga tidak ada lagi pengembangan baru atau diperluas di suatu wilayah atau di suatu daerah tertentu. Itu yang perlu diketahui oleh kita bersama.

Kemudian, ada hal yang perlu saya minta penegasan dari Ahli yang kebetulan memang dari tahun 1977 sudah bergelut di dalam dunia pemilihan, khususnya di Papua. Tadi Ahli menyatakan bahwa memang bisa lahirnya ya, kesepakatan bersama di antara para anggota suku untuk menentukan pilihan, apakah kepada si a atau kepada si b, atau dibagi dua-duanya dan bisa juga langsung ditunjuk oleh ketua suku atau ketua adat.

Nah, selama Ahli ya menjadi komisioner di KPU. Apakah tidak perlu memverifikasi atau menanyakan ketika petugas yang ditunjuk untuk membawa hasil itu, apakah melalui sistem musyawarah atau langsung ditunjuk oleh ketua adat? Dan apakah memang kalau terjadi hal-hal seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Patrialis tadi bahwa kenyataannya bisa berubah dari hasil a menjadi b? Silakan.

1832. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

1833. AHLI DARI TERMOHON: HASJIM SANGADJI

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan hubungan Perdatus, kemudian warisan budaya, dan Majelis Rakyat Papua. Sebenarnya, hal-hal yang terkait dengan masalah budaya, ini merupakan kewenangan dari Majelis Rakyat Papua. Perlu kami sampaikan bahwa pada Pemilu 2004, Majelis Rakyat Papua telah mendorong KPU, waktu itu KPU Provinsi untuk menyampaikan ini ke KPU RI untuk dibuat ... dibuat suatu regulasi khusus. Dan ini kami pernah bersama-sama dengan Majelis Rakyat Papua mendatangi KPU di Imam Bonjol. Namun pada saat itu, dikatakan bahwa tidak ada cantolannya di Undang-Undang Pemilu. Akhirnya dikembalikan kepada daerah, bagaimana kebijakan lokal yang ada di sana diawasi secara baik. Kami sudah pernah menyampaikan

kepada Majelis Rakyat Papua juga pada ... sejak kami menjadi anggota untuk membuat sebuah regulasi, tapi sampai saat ini, belum juga dibuat regulasi terkait dengan penggunaan noken ini. Mungkin ini saran, alangkah baiknya kalau dalam keputusan Majelis Yang Mulia ini ... Majelis Yang Mulia ini dicantolkan juga, ada petunjuk, sehingga daerah memerhatikan terkait dengan penggunaan noken ini.

Kemudian, komentar kami mengenai tadi ... eh, awal kami sudah katakan. Penggunaan noken dan sistem ikat ini diperlukan integritas yang sangat tinggi dari penyelenggara pemilu, (suara tidak terdengar jelas) dituntut. Bagaimana integritas penyelenggara pemilu mulai dari tingkat bawah KPPS sampai di PPD, ini yang rawan. Kalau sudah di tingkat KPU kabupaten dan provinsi tidak ada masalah, tapi di tingkat KPPS, di tingkat PPS, dan di tingkat PPD, selama kami di Papua, kami lihat ini rawan karena bisa terjadi seperti yang disampaikan tadi. Maka tadi kami katakan, pengamanan dan pengawalan dari adat, serta masyarakat adat, sampai dengan dimunculkan dalam Berita Acara, ini perlu. Makanya, perlu ada suatu regulasi khusus yang dibuat untuk itu sebagai pengakuan negara terhadap penggunaan noken ini.

Kemudian, terkait dengan sebuah tesis yang disampaikan dari Gadjah Mada tadi, kami juga sangat sependapat. Bahwa memang berbeda antara sistem noken dan sistem ikat. Sistem ikat memang surat suara tidak dimasukkan di dalam noken karena itu dilakukan di ... umumnya dilakukan di tingkat PPS, kampung dalam hal ini. Jadi, katakanlah pemilih dalam satu kampung itu 500 pemilih, kalau itu pemilu legislatif, maka itu dibagikan kepada calon x dari partai a, atau calon b dari partai e, dan seterusnya. Kalau pemilu presiden, maka langsung dibagikan kepada ... kalau itu dua pasangan calon, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor 2, maka menjadi kewajiban daripada penyelenggara pemilu untuk diadministrasikan, dalam hal ini dibuat dalam ... dalam Berita Acara.

Kemudian, perluasan mengenai sistem noken, kami kira tidak perlu. Sudah ada kemajuan sekarang ini, dimana ada dua kabupaten di daerah pedalaman, yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang yang dulu 100% sampai dengan 2009 itu 100% menggunakan noken, tapi sekarang satu Kabupaten Pegunungan Bintang tidak lagi menggunakan noken. Kemudian, Yalimo tadi dijelaskan juga tidak menggunakan noken. Dengan demikian, berkurang. Dan kita harapkan dan ini menjadi kewajiban penyelenggara pemilu tentunya, untuk yang akan datang ini berkurang, dan berkurang, dan seterusnya. Dan kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, semuanya sudah mencoblos atau apa pun namanya, tapi seragam secara nasional.

Barangkali demikian kami sampaikan, Yang Mulia.

1834. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Dari Bawaslu khusus mengenai keputusan rekomendasi Bawaslu mengenai dua Distrik di Dogiyai tadi, pada saat rekapitulasi di tingkat nasional.

1835. BAWASLU: NASRULLAH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati. Dari perspektif pengawasan pemilu, pengawas pemilu kami menemukan di lapangan bahwa khusus di distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah di Kabupaten Dogiyai, tidak sama sekali ditemukan adanya pemungutan suara berlangsung, termasuk noken, ikat, dan lain sebagainya.

Atas pertimbangan itulah, maka tiba-tiba ada angka yang muncul ketika rekapitulasi dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, angka yang muncul itu, 6.000 sekian Mapia Barat, 11.000 sekian Mapia Tengah, jumlah total list 18.000 sekian, yang semuanya perolehan suara itu peruntukan kepada Pasangan Nomor Urut 2, Pasangan Nomor Urut 1 posisi=0. Karena berdasarkan temuan pengawas pemilu yang tidak sama sekali dilakukan pemungutan suara itu, maka direkomendasikan oleh pengawas pada tingkat Kabupaten Dogiyai agar dilakukan pemilu, prinsipnya seperti itu, termasuk pemungutan suaranya, kira-kira seperti itu.

Nah, tapi karena pertimbangan waktu dan lain sebagainya, sehingga hal ini tidak mungkin bisa dilakukan, sehingga persoalan ini itu diteruskan sampai pada tingkat provinsi. Sampai pada tingkat provinsi pun juga, terlihat bahwa persoalan ini juga belum selesai semuanya. Maka dari itu, di tingkat provinsi ini mengambil sebuah sikap bahwa tidak akan mungkin tetap dipertahankan angka-angka perolehan sebagaimana dimaksud 18.000 itu dari 2 distrik tersebut.

Kemudian, persoalan ini muncul di tingkat rekapitulasi nasional. Kesimpulannya bahwa pada tingkat rekapitulasi nasional tersebut, Bawaslu mengusulkan bahwa sebaiknya daerah yang memang tidak dilakukan pemungutan suara ulang, berdasarkan temuan pengawas pemilu ini, maka tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Nah, sehingga diusulkanlah yang sayang seribu sayang, Saksi Pasangan Nomor Urut 1 ketika pembahasan ini sudah WO, sudah keluar, tetapi meskipun saudara-saudara kami prinsipnya tanpa peduli apakah Saksi Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 tidak ada, Bawaslu tetap objektif dalam hal memberikan penilaian, mengawasi di dalam proses rekapitulasi nasional itu, sehingga kami mengusulkan sebaiknya ini dinolkan.

Nah, dihadiri oleh Saksi dari Nomor Urut 2, demikian juga KPU, dan tidak ada persoalan, solusi tersebut diambil dan klirlah persoalan Mapia Barat dan Mapia Tengah. Demikian, Majelis. Terima kasih.

1836. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi sudah cukup jelas, ya? Dan kita harus istirahat dulu untuk Salat Asar. Sidang kita skorsing, diskorsing sampai pukul 16.45 WIB, ya. Sidang diskorsing sampai pukul 16.45 WIB.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 16.13 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 16.50 WIB

1837. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Skorsing sidang dicabut kembali.

KETUK PALU 1X

Ya, kita melanjutkan sidang mendengarkan keterangan saksi dari Termohon. Silakan, Yang Mulia Pak Fadlil.

1838. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Nomor 10, Saksi Termohon Saudara Evi Novida Ginting Manik. Saudara saya cek dulu, tempat, tanggal lahir Saudara, Medan, 11 November 1966.

1839. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Benar, Yang Mulia.

1840. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Beragama Islam. Tinggal di Kompleks Tasbi Blok SS No. 99, Medan.

1841. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Benar, Yang Mulia.

1842. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara adalah Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara yang oleh Termohon ini diminta menjelaskan soal rekap di tingkat provinsi. Silakan.

1843. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin menjelaskan tentang rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi pada tanggal 18 Juli 2014 yang kita laksanakan di Hotel Dharma Deli. Dan pada tanggal 18 Juli tersebut, kami menyelenggarakan rapat Pleno tersebut pada ... dari pukul 09.00 sampai pukul 02 ... 01.00 pagi. Dan apa yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 1, kemarin yang bersaksi di sini, Yang Mulia, itu prosesnya benar seperti yang disampaikan dan disampaikan juga keberatan dari Saksi Nomor 1. Kemudian dalam rapat Pleno tersebut, Bawaslu juga menyampaikan terkait dengan rekomendasi yang belum dilaksanakan oleh ... yang dianggap belum dilaksanakan oleh KPU Nias Selatan.

Dan kami ingin menjawab, terkait dengan Nias Selatan, KPU Provinsi Sumatera Utara sudah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan bersama-sama dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di bawah supervisi KPU RI dan Bawaslu RI dengan membuat Berita Acara yang menjelaskan hasil pencermatan bersama tersebut di dalam rapat Pleno di tingkat KPU RI pada tanggal 21 sampai tanggal 22 Juli yang lalu.

1844. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu Berita Acara-nya kan dilampirkan sebagai bukti juga?

1845. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Sudah, Yang Mulia.

1846. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

1847. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Yang ingin ... kemudian, boleh izin, Yang Mulia?

1848. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan, silakan.

1849. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Saya lanjutkan, isi daripada Berita Acara tersebut, kami menemukan bahwa terjadi kesalahan KPPS dalam menginput data pemilih pada formulir C-1. Kemudian kedua, adanya pemahaman yang lemah terhadap klasifikasi pemilih, baik itu DPT, DPTB, DPK, dan DPKTB, dan klasifikasi terhadap surat suara. Kemudian, kami juga menemukan kesalahan dalam penjumlahan suara sah dan tidak sah. Ini semua dari formulir C-1 yang sebagai bahan daripada rekomendasi. Kemudian juga, kami menemukan kesalahan dalam input data surat suara tidak terpakai yang dianggap sama sebagai surat suara tidak sah. Kemudian, kami juga menemukan bahwa ada memang pemilih yang sudah meninggal masih ditemukan dalam DPT sebanyak 4, tersebar di 4 TPS.

Jadi, kesimpulan kami adalah bahwa KPPS di dalam mengisi ataupun ini disebut dengan kesalahan administrasi di dalam mengisi sertifikat formulir C-1. Ini hasil dari pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Provinsi Sumatera Utara.

1850. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pertanyaan yang selanjutnya dari saya ini, apakah setelah pencermatan itu kemudian dilakukan koreksi karena Anda bilang itu kesalahan administrasi?

1851. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya, sebenarnya ini sudah dilakukan koreksi di tingkat PPK sebagian dan juga di kabupaten.

1852. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi tinggal di provinsi itu tinggal finishingnya saja berarti?

1853. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya, untuk pencermatan. Karena rekomendasi yang diusulkan oleh panwas terkait dengan formulir C-1.

1854. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, C-1 saja, ya? Oke. Ada hal lain yang ingin Saudara terangkan?

1855. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Tidak ada, Yang Mulia.

1856. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, ya. Terima kasih, Saudara Evi.

Sebentar, ini ada pertanyaan untuk saya teruskan dari Yang Mulia Muhammad Alim.

Jadi sekali lagi, dengan adanya pencermatan dibuat Berita Acara, saya ingin tanyakan untuk pastinya, persoalan itu menjadi selesai?

1857. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Benar, Yang Mulia.

1858. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lalu yang menandatangani Berita Acara itu selain KPU dan Bawas, siapa saja?

1859. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Yang menandatangani, kebetulan itu ditandatangani oleh 5 Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Karena kita diminta oleh Bawaslu RI dan KPU RI untuk melakukan pencermatan.

Hasilnya itu, tentu saja karena ini merupakan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Sumatera Utara, kami yang menandatangani.

1860. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apakah peserta pemilu dalam hal ini saksi-saksinya, diberi tahu oleh Saudara?

1861. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Baik. Mungkin tadi saya belum menceritakan bahwasanya proses rekapitulasi di tingkat KPU RI tanggal 21 Juli, ini kami membacakan hasil rekapitulasi di tingkat KPU provinsi formulir DC. Kemudian pada waktu itu, ada keberatan dari Calon Nomor 1, kemudian disarankan oleh Bawaslu untuk di-pending khusus untuk Sumatera Utara terkait dengan Nias Selatan, tetapi pembacaan sudah selesai dilaksanakan. Kemudian, kita diminta untuk melakukan pencermatan dan hasil pencermatan Berita

Acara tersebut dibacakan, disampaikan pada rapat Pleno tanggal 22 Juli di hadapan bawaslu, pemantau, kemudian seluruh yang hadir di dalam rapat Pleno KPU RI.

1862. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Jadi, apakah dengan demikian ketika Anda melakukan pencermatan yang menurut Anda tadi dianggap sudah selesai itu dari saksi para peserta belum tahu?

1863. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Sudah dianggap selesai, Yang Mulia.

1864. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bukan. Soal tahu selesainya itu?

1865. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya, disampaikan di dalam forum rapat Pleno terbuka.

1866. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu kan di Pleno RI?

1867. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya.

1868. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Di sana, di pencermatan yang di sana? Tidak ... belum dilakukan ketika (...)

1869. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Kabupaten?

1870. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bukan, di provinsi.

1871. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Di provinsi kami kan, sudah selesai, Yang Mulia. Kemudian, ini Berita Acara kan, tidak ada perubahan terkait dengan perolehan suara.

1872. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, jadi (...)

1873. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Karena formulir C ini sudah diperbaiki. Dari kabupaten sudah selesai, Yang Mulia.

1874. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi karena sudah diperbaiki, tidak ada hal yang perlu diberitahukan. Ketika ada keberatan di tingkat nasional, Berita Acara itu dibacakan?

1875. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya, Yang Mulia.

1876. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang Mulia.

1877. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, ada Yang Mulia Hakim Arief untuk menanyakan.

1878. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Saudara Saksi, tadi disebutkan ada yang sudah meninggal. Kemarin juga saksi mengatakan sudah ada yang meninggal, tapi hanya masuk di DPT atau juga dicobloskan oleh orang lain? Ini perlu penegasan.

1879. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Masuk di dalam DPT, Yang Mulia.

1880. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi tidak dilakukan pencoblosan oleh orang lain?

1881. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Jadi begini, Yang Mulia. Ketika kita cermati formulir C-1, seluruh data-data pemilih itu dimasukkan hanya di dalam satu kolom. Dikelompokkan di dalam satu. Misalnya dimasukkan dalam DPT. Begitulah mereka mengisi daripada formulir C. Jadi, ada juga kita temukan.

1882. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, clerical error ya?

1883. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya.

1884. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian yang kemarin di Nias Selatan itu ada yang membagi surat suara tersisa, kemudian ada yang mencoblos bersama-sama dibagi-bagikan pada KPPS atas kesepakatan anggota KPPS. Itu gimana itu di Nias Selatan?

1885. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya, sampai sekarang walaupun sebenarnya terjadi itu, tidak ada satu orang pun yang dipidanakan terkait dengan hal tersebut. Artinya bagi kami, sepengetahuan kami tidak ada hal tersebut terjadi di Kabupaten Nias Selatan.

1886. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang terakhir. Ada dalil di Pemohon yang mengatakan ada mobilisasi pemilih. Mobilisasi pemilih ini didalilkan atas dasar indikator ada 1.027 surat suara yang tidak sama antara seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Apa ini ada ... ada begini? Ada kelebihan 1.027?

1887. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ini mohon, Yang Mulia, di mana? Di kabupaten mana?

1888. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hanya disebutkan mobilisasi di Provinsi Sumatera Utara. Jadi, seluruhnya berarti di seluruh provinsi.

1889. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Tidak ada, Yang Mulia.

1890. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak ada, ya.

1891. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Tidak ada mobilisasi.

1892. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, itu mobilisasinya ditunjukkan dengan adanya indikator antara pengguna hak pilih. Jadi, yang memilih dengan jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai, betul?

1893. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Terkait dengan lampiran ini, Yang Mulia, dari Pemohon. Setelah kita lihat lampiran dari Pemohon, ternyata Pemohon memasukkan pengguna hak pilih itu adalah data-data DPT. Makanya tidak sinkron dengan suara sah dan tidak sah.

1894. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih.

1895. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan, Yang Mulia.

1896. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, ya.

1897. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya, Yang Mulia.

1898. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara sebagai Komisioner KPU Sumatera Utara?

1899. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Benar.

1900. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara di divisi apa?

1901. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Divisi hukum.

1902. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Divisi hukum. Ketika rekapitulasi tingkat provinsi, apakah Saudara mengetahui bahwa di Kabupaten Nias Selatan ada rekomendasi dari Bawas ... panwaslu bertanggal 14 Juli 2014? Rekomendasi Bawaslu itu meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Teluk, Kecamatan Ulusua, Kecamatan Panayama Khusus, Kecamatan Maniamolo, kecamatan Amandraya, kecamatan Aramo, Kecamatan Lolomotua, bias Saudara lihat di permohonan ... permohonan Pemohon mulai dari halaman 64 sampai halaman 72 itu, nama-nama kecamatan yang direkomendasikan oleh Bawaslu tertanggal 14 Juli agar dilakukan penghitungan ulang di beberapa TPS, TPS-nya saya tidak sebut, tapi Saudara bisa lihat nanti di permohonan.

1903. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya.

1904. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Apakah Saudara mengetahui itu?

1905. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Sudah, Yang Mulia.

1906. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, apakah Saudara ... menurut dalil Pemohon bahwa rekomendasi panwas tersebut tidak ditindaklanjuti, apakah Saudara menerima laporan karena Saudara adalah divisi hukum dan ini adalah persoalan hukum? Apakah Saudara menerima laporan bahwa alasan untuk tidak ditindaklanjuti itu adalah apa?

1907. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Baik, Yang Mulia. Sebenarnya ketika kami mendengarkan kabar itu tanggal 15. Jadi, KPU Kabupaten Nias Selatan menerima surat itu tanggal 15 Juli yang tentu saja pada tanggal 16 Juli mereka sudah melaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Dan tanggapan kita pada waktu itu adalah untuk segera berkordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, segera mendapatkan data-data yang lebih detail terkait dengan rekomendasi yang disampaikan. Karena waktu yang mungkin tidak mencukupi ... karena waktu memang tidak mencukupi karena tanggal 16 surat undangan sudah disebar kepada pihak-pihak yang akan diundang pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Selatan, maka ini kemudian nanti mungkin bisa dijelaskan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, Yang Mulia, terkait dengan Rapat Plenonya.

Nah, kemudian ini dibuka kembali di rapat Pleno rekapitulasi provinsi. Nah, kami menanggapi dengan pada waktu itu juga di-pending untuk Nias Selatan dalam rangka Bawaslu meminta pada waktu itu untuk menerima dulu ... apa ... surat semacam surat dari ... semacam surat pernyataan dari Nias Selatan, yang waktu itu dikirim melalui e-mail dari Nias Selatan.

1908. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Dari KPU atau panwas?

1909. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Bukan, bukan, dari kepala desa pada waktu itu.

1910. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Dari kepala desa. Berkaitan dengan apa surat tersebut?

1911. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Pernyataan meninggal, gitu lho. Tapi tulisan tangan, Yang Mulia, waktu itu yang kita lihat.

1912. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Apa Saudara mengetahui atau menerima laporan bahwa ini kan, banyak sekali kecamatan (...)

1913. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya benar, Yang Mulia (...)

1914. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Yang diminta untuk dilakukan penghitungan ulang.

1915. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

27 kecamatan.

1916. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Apakah Saudara punya informasi apa yang menjadi dasar untuk meminta penghitungan ulang di sekian kecamatan?

1917. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya. Di dalam surat tersebut, rekomendasi itu didasarkan karena ditemukannya pengguna hak pilih 100% atau lebih, gitu.

1918. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oh, gitu.

1919. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Jadi, itu yang (...)

1920. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tetapi, tidak langsung dilakukan karena persoalan waktu (...)

1921. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya, benar.

1922. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kemudian yang kedua, belum yakin dengan rekomendasinya panwas, sehingga harus menunggu dulu surat keterangan dari desa atau kelurahan?

1923. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Bukan, itu sebenarnya ... mungkin saya koreksi, Yang Mulia.

1924. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Silakan.

1925. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Bukan tidak ditindaklanjuti, menindaklanjuti itu juga KPU Kabupaten Nias Selatan sudah menyurati panwas pada waktu itu.

1926. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya.

1927. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Kemudian di dalam rapat Pleno nanti mungkin (...)

1928. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Apa isi surat KPU ke panwas? Saudara tahu?

1929. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya, intinya adalah meminta data-data yang lebih detail, kemudian ... kemudian juga (...)

1930. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Di rekomendasi panwas itu, sudah disebut TPS mana saja yang kalau menurut dalil Pemohon, ya?

1931. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya, ya, betul.

1932. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Menurut dalil Pemohon, di rekomendasi panwas itu sudah disebutkan TPS-TPS mana saja yang diminta untuk penghitungan ulang.

1933. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya, betul, Yang Mulia.

1934. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saya kira menurut aturan, panwas memberi rekomendasi telah melakukan pencermatan dan penyelenggara wajib menindaklanjuti rekomendasi panwas.

1935. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya, betul, Yang Mulia, tetapi tentu saja kami membutuhkan data pembandingan. Itu yang dibutuhkan.

1936. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Data pembandingan dari?

1937. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Dari panwas menurut KPU Kabupaten Nias Selatan.

1938. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Lah, ini kan, panwas yang merekomendasikan?

1939. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya, benar, Yang Mulia. Jadi, itu dibawa di rapat Pleno KPU provinsi.

1940. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sebentar, ini supaya ... supaya klir, ya.

Panwas menganggap bahwa ada masalah di sekian kecamatan, di beberapa TPS. Tentu menurut aturan, panwas juga tidak boleh memberi rekomendasi sebelum dia melakukan pencermatan. Apakah itu temuan atau laporan, dilakukan pencermatan, setelah dilakukan pencermatan, keluar rekomendasi.

Undang-undang menjelaskan bahwa rekomendasi panwas wajib dilaksanakan. Pertanyaan saya singkat saja, ini tidak dilaksanakan karena Saudara belum yakin dengan rekomendasi panwas, sehingga masih membutuhkan data pembandingan?

1941. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya. Karena waktu juga, Yang Mulia.

1942. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Waktu, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1943. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saya pertegas dari pertanyaan Yang Mulia Hakim Aswanto. Tadi Saudara bilang, ini diangkat lagi di provinsi, setelah sampai di provinsi di-pending, gitu. Saudara bilang begitu. Bisa dijelaskan?

1944. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Di-pending sementara karena menunggu data yang tadi ditunggu dari (...)

1945. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dari panwas?

1946. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Dari Nias Selatan.

1947. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dari Nias Selatan (...)

1948. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya (...)

1949. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu ... sebentar, sebentar. Nias Selatan itu kan, ada panwas, ada kepala desa, yang Saudara ceritakan (...)

1950. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Panwas, Yang Mulia.

1951. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Panwas?

1952. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Bawaslu pada waktu itu yang menunggu meminta kita untuk me-pending, kita pending.

1953. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, yang meminta justru Bawaslu (...)

1954. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya, betul (...)

1955. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bukan KPU?

1956. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Bukan. Jadi, karena (...)

1957. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Nah, pertanyaan berikutnya, setelah di-pending itu sudah diselesaikan ketika ... apa namanya ... rekap di tingkat nasional, apa di tingkat nasional masih muncul lagi?

1958. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Betul, Yang Mulia. Karena begini, Yang Mulia. Terkait dengan TPS-TPS tersebut ini kan, pada waktu datang direkapitulasi di provinsi, baru

dinyatakan ada yang meninggal dan lain sebagainya. Itu baru muncul di tingkat KPU provinsi.

1959. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

1960. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Oleh karena itu, tentu saja kami perlu sekali untuk mendapatkan informasi dan data yang cukup dari petugas kita sendiri, dari KPU.

1961. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

1962. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Karena pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi, KPU Nias Selatan itu baru sampai karena sulitnya untuk mendapatkan penerbangan dari Nias ... dari Gunungsitoli menuju Medan, mereka baru datang siang hari. Jadi, kami belum mendapatkan informasi yang cukup terkait apa yang sudah dilakukan di dalam Rapat Pleno Kabupaten Nias Selatan dan bagaimana proses itu terjadi, sehingga ini sangat penting bagi kami untuk mengambil keputusan ataupun merespons apa yang di ... apa yang muncul pada saat di dalam rapat Pleno rekapitulasi, sehingga kami bersepakat pada waktu itu sudah dibicarakan dan memasukkan itu ke dalam DC-2.

1963. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

1964. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Dan DC-2 itu sudah disampaikan di dalam forum, semua sepakat juga untuk dilanjutkan nanti di tingkat KPU RI.

1965. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

(...) Sekarang, pertanyaan untuk di tingkat KPU RI. Apakah selesai

1966. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Selesai (...)

1967. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Atau diperintahkan untuk dihitung ulang?

1968. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Tidak, Yang Mulia.

1969. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, dianggap selesai?

1970. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Pencermatan itulah yang diminta kita melakukannya diawasi oleh Bawaslu (...)

1971. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, dari (...)

1972. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Dan disupervisi.

1973. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dari yang semula direkomendasikan untuk di ... apa ... hitung ulang, setelah di tingkat nasional, kemudian menjadi cukup dicermati?

1974. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Benar, Yang Mulia.

1975. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dan setelah dicermati tadi tanggal 21-22 tadi dibikin Berita Acara?

1976. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Benar, Yang Mulia.

1977. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dengan demikian, Anda ingin bilang ini sudah dilaksanakan dan selesai?

1978. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Benar, Yang Mulia.

1979. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

1980. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saya, Pak.

1981. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan.

1982. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saudara Saksi, itu berubahnya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang menurut Saudara menjadi pencermatan, itu resmi tertulis atau bagaimana?

1983. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Di dalam forum dalam rapat Pleno, Yang Mulia.

1984. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tertulisnya ada apa enggak? Ada, enggak surat dari Bawaslu yang mengeliminasi surat dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang secara otentik?

1985. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Tidak ada, Yang Mulia.

1986. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tidak ada, ya.

1987. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Sedikit, Yang Mulia.

1988. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, ya? Pak ... Yang Mulia Hakim Anwar.

1989. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, sedikit saja. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin memastikan jawaban dari Saksi tadi. Jadi, sampai rekap terakhir di provinsi itu, permasalahan semua dianggap selesai?

1990. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Bukan.

1991. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Tadi ... enggak, enggak. Enggak, tadi kan, ada masalah seperti Nias tadi kan, belum selesai tadi? Kemudian dibawa ke tingkat nasional, kan gitu?

1992. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Belum ... ya, dibawa ... belum selesai di tingkat provinsi, dicatat di dalam DC-2.

1993. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

He em. Baik.

1994. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Supaya pihak-pihak masing-masing, ya.

1995. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Tetapi sudah bisa dipastikan bahwa untuk Paslon 1 dan 2 itu sudah ditetapkan, ya?

1996. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Sudah, Yang Mulia.

1997. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Paslon 1 berapa suaranya?

1998. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Sebentar, Yang Mulia. Baik, untuk perolehan suara Nomor 1 (...)

1999. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Untuk provinsi, ya?

2000. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Ya, Yang Mulia. Nomor 1=2.831.514. Nomor 2=3.494.835.

2001. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

DPT berapa?

2002. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

DPT Provinsi Sumatera Utara=9.902.948.

2003. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Suara sah?

2004. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Suara sah=6.326.349.

2005. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, cukup.

2006. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih.

2007. SAKSI DARI TERMOHON: EVI NOVIDA GINTING MANIK

Terima kasih.

2008. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan duduk kembali. Sekarang, Saudara Sumangeli Mendrofa, S.E. Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan.

2009. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Betul, Yang Mulia.

2010. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara, tempat, tanggal lahirnya Hilinamazihono, betul?

2011. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Betul.

2012. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

10 November 1981?

2013. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Betul.

2014. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kristen. Alamat Hilinazihono, Nias Selatan?

2015. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Betul, Yang Mulia.

2016. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara, selain tadi, soal Nias Selatan sudah diterangkan oleh KPU kejadiannya di provinsi, Saudara diminta juga oleh Termohon menerangkan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Nias dan rekapitulasinya di Nias. Silakan, dimulai.

2017. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, kami menjelaskan bahwa proses rekapitulasi khususnya di Nias Selatan terlaksana pada tanggal 16 Juli 2014 di Wisma Yonnas, Teluk Dalam. Prosesnya pada saat itu, kami juga menyampaikan dari KPU Nias Selatan karena ada rekomendasi. Kami juga menyampaikan sebelum pelaksanaan rekapitulasi itu bahwa pada Pleno ini, semua pihak, baik Saksi Nomor 1 dan 2 dan juga panwas, kita bersama-sama memperbaiki atau mengoreksi bila ada permasalahan di tingkat KPPS, PPS, PPK yang belum selesai. Kita mau di ruangan ini, di Pleno ini selesai semua, jangan seperti pada pileg kemarin. Itu yang kita sampaikan pada saat itu, sehingga pada saat itu, Yang Mulia, setiap kecamatan menyampaikan hasil rekapitulasinya masing-masing.

Setiap kecamatan menyampaikan, kami sebagai pimpinan sidang pada saat itu meminta tanggapan atau keberatan dari pihak-pihak, pihak Nomor 1, 2, dan panwas. Jadi, bila ada koreksi, bila ada yang mereka sampaikan langsung kami selesaikan di tempat. Contoh, pada saat itu ada beberapa yang disampaikan oleh Saksi Nomor 1, dia melihat cross-check dan ada yang dia keberatan, langsung kita buka C-1, kita cocokkan bersama-sama. Dan saat itu juga selesai, sehingga, Yang Mulia, dari awal sampai 31 kecamatan terlaksana rekapitulasi itu dan pada saat itu tidak ada permasalahan yang terjadi, dan semua apa yang disampaikan pada saat itu sudah kami selesaikan, sehingga kedua saksi disaksikan oleh panwas menandatangani Berita Acara, sehingga tidak ada permasalahan di tingkat KPU Nias Selatan.

2018. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, itu penyelenggaraan dan rekapitulasi sudah dijadikan satu ya, keterangannya. Ada hal lain yang ingin Saudara terangkan?

2019. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Hal lain, Yang Mulia. Seperti yang disampaikan tadi ... yang disampaikan kemarin oleh saksi dari Pemohon yang menyampaikan bahwa ada pencoblosan (...)

2020. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oleh KPPS?

2021. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Oleh KPPS, dan beliau sendiri mengaku enam surat suara yang dia ini. Kami ... semalam kami juga sampaikan ini ... menelepon para KPPS kami di sana bahwa itu tidak benar, Yang Mulia. Jadi, pada saat itu DPT mereka 99 tambah 2 orang yang menggunakan KTP, sehingga 101 jumlah dan semuanya itu memilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9. Bahwa itu, keterangan itu tidak benar, Yang Mulia.

2022. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

2023. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Yang kedua adalah keterangan dari Saudara Bismark Elman Duha yang menyatakan bahwa dia tercatat enam, enam kali dicatat dalam DPT, begitu juga ayahnya yang sudah meninggal yang ikut memilih menurut beliau, dan juga ibunya ada enam kali tercatat. Setelah kita melihat DPT, itu tidak benar, Yang Mulia. Karena di dalam Sidalih ... proses Sidalih, tidak ada istilah pemilih ganda. Itu langsung terhapus. Dan ini yang kami sampaikan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saudara Bismark semalam itu tidak benar, Yang Mulia.

2024. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

2025. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Jadi selain itu, kami juga menyampaikan bahwa di Teluk Dalam di TPS 10 yang telah disampaikan oleh Saudara Saksi kemarin bahwa 100% memilih. Itu tidak benar, Yang Mulia. Yang benar adalah DPT di sana 395, sementara yang memilih hanya 235. Ada selisih 60, termasuk ayahnya atas nama Amir Hamzah Duha tidak memilih karena memang C-6 nya tidak diberikan karena sudah meninggal. Itu yang perlu kami sampaikan, Yang Mulia.

2026. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup?

2027. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Cukup.

2028. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke. Dimulai dari Pak Patrialis, kemudian Yang Mulia Pak Aswanto.

2029. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Saudara saksi, tadi saya dengar ketua KPU, Ibu Evi, justru ingin persoalan yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan ini diserahkan menjawabnya kepada Saudara yang lebih mengetahui secara langsung. Kami ingin mengetahui apa sebabnya Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan rekomendasi begitu banyak, 27 kecamatan dan ratusan TPS-TPS untuk dilakukan penghitungan suara ulang? Silakan.

2030. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Baik, Yang Mulia. Yang pertama, kami perlu menjelaskan bahwa pada tanggal 15, pukul 14.30, tanggal 15, kami menerima surat dari Panwaslu Nias Selatan sebanyak 27 surat yang isinya di dalamnya perihal untuk melaksanakan perhitungan ulang di beberapa TPS.

Setelah kami jumlahkan itu sebanyak 287 TPS. Setelah itu, Yang Mulia, kami menyampaikan, alasan mereka di (suara tidak terdengar jelas), sesuai dengan surat di sini, surat mereka, perlu kami menjelaskan bahwa hanya 2 lembar tanpa menyerahkan kajian. Jadi, sehingga kami pada saat itu karena kekurangan data ini, kami ... apa namanya ... menyampaikan surat kepada mereka untuk meminta data kajian supaya kami bisa menindaklanjuti, sehingga pada saat itu, Yang Mulia, kami menyurati panwas sebagai tindak lanjut daripada rekomendasi mereka. Itu, Yang Mulia.

2031. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Apa ... sebelumnya tidak ada koordinasi atau penyampaian temuan-temuan oleh panwaslu yang Saudara ketahui, kok tiba-tiba ada surat seperti ini?

2032. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Ya, kita tidak dapat, Yang Mulia. Jadi, pada tanggal 14 itu, kita dapat langsung 27 surat.

2033. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Maksud saya, sebelum surat ini keluar, tentu Saudara mendapatkan informasi dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh panwas yang akhirnya panwaslu ini mengeluarkan surat rekomendasi penghitungan suara ulang 27 kecamatan. Bagaimana?

2034. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Ya, yang penting, pada saat itu, Ketua, belum ada kita koordinasi dan tidak ada juga pertemuan.

2035. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Apa Saudara mengetahui setelah dikeluarkannya surat panwaslu ini, kenapa sampai dikeluarkan surat rekomendasi oleh panwas?

2036. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Saya tidak mengetahui, Yang Mulia.

2037. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Sampai hari ini?

2038. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Kalau sampai hari ini, tahu.

2039. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jelaskan itu. Pokoknya jelaskan saja, enggak usah disimpan, ya. Jelaskan apa yang Saudara ketahui.

2040. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Yang saya ketahui, Yang Mulia bahwa dasar mereka merekomendasikan karena ada pemilih. Menurut mereka ada pemilih lebih dari DPT.

2041. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke, itu satu.

2042. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Karena mereka sudah menemukan di C-1, itu dasar yang mereka sampaikan. Hanya itu, Yang Mulia, sesuai dengan surat yang kami terima.

2043. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, sepengetahuan Saudara, surat panwaslu ini keluar hanya didasarkan pada dugaan pemilih lebih dari DPT?

2044. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Betul, Yang Mulia.

2045. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Itu saja?

2046. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Ya.

2047. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ada lagi yang lain?

2048. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Pada saat rekomendasi ... pada saat rekapitulasi tingkat provinsi, di situ Bawaslu menyampaikan bahwa ada yang meninggal.

2049. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Meninggal.

2050. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Tapi, kita tidak pernah menerima pada saat itu, siapa yang meninggal itu, sehingga, pada saat itu di-pending, Yang Mulia, untuk rekapitulasi Nias Selatan, ditunggu dulu surat keterangan dari panwaslu Nias Selatan.

2051. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Apakah panwaslu Nias Selatan mengirim surat lagi kepada Saudara, menjelaskan sebagai respons dari surat KPU Nias Selatan?

2052. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Tidak ada, Yang Mulia.

2053. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tidak ada. Sampai hari ini?

2054. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Dari panwaslu Nias Selatan belum pernah ada.

2055. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Belum pernah. Jadi, hanya rekomendasi, sementara penjelasan lebih lanjut yang Saudara minta tidak ada dari panwas? Begitu, ya?

2056. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Tidak ada. Tapi setelah itu, Yang Mulia, di tingkat provinsi kemarin sudah kami serahkan kepada provinsi dan Bawaslu.

2057. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oh, jadi Saudara sudah merespons itu?

2058. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Sudah.

2059. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Tapi panwaslu tidak merespons lebih jauh?

2060. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Ya.

2061. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Nanti kita minta komentar dari Bawaslu mengenai hal ini.
Terima kasih, Ketua.

2062. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan, Yang Mulia Hakim Aswanto.

2063. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi, ya. Saya minta ... ingin
minta penegasan sekali lagi. Surat rekomendasi panwas itu tanggal 14
Juli? Betul?

2064. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Betul, Yang Mulia.

2065. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara menerima tanggal 15 Juli?

2066. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Betul, Yang Mulia.

2067. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Betul. Saudara melakukan rekap tanggal 16 Juli?

2068. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Betul.

2069. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Betul. Tadi Saudara mengatakan bahwa di kabupaten Nias Selatan
itu tidak ada masalah?

2070. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Betul, Yang Mulia.

2071. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Apa dasarnya kira-kira, sehingga Saudara mengatakan tidak ada dasar, sementara sebelum Saudara menerima Sebelum Saudara melakukan rekap, Saudara sudah mengetahui bahwa ada surat dari panwas untuk 26 kecamatan dilakukan penghitungan ulang?

2072. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Baik, Yang Mulia, kami menjelaskan bahwa ... tadi sudah kami jelaskan dari awal bahwa sebelum kami laksanakan rekapitulasi, kami menyampaikan kepada semua pihak supaya ini bisa di ... kalau ada permasalahan-permasalahan termasuk rekomendasi itu, bisa kita clear-kan di rapat Pleno ini. Setelah selesai Pleno, Yang Mulia, kami kan, tanyakan kepada panwas apakah ada keberatan atau ... sehingga tidak ada diisi pun ... apa namanya ... D2 pada saat itu.

2073. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu sudah jelas. Satu lagi. Apakah Saudara memahami atau mengetahui bahwa rekomendasi panwas itu final dan mengikat?

2074. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Yang pertama, Yang Mulia, kan di sana menindaklanjuti, Yang Mulia, jadi kita sudah menindaklanjutinya dengan menghitung suara kepada mereka.

2075. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Yang diminta kan, menghitung ulang?

2076. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Ya.

2077. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Apakah makna menindaklanjuti itu ketika Saudara membalas suratnya atau ketika melaksanakan permintaan yang ada di rekomendasi?

2078. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Yang pertama, Yang Mulia, kami membalas surat dulu. Membalas surat mereka untuk (...)

2079. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saudara menganggap bahwa dengan balasan surat itu sudah ditindaklanjuti?

2080. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Sudah.

2081. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, cukup.

2082. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sekarang, panwas saja deh. Kalau ada hal yang penting, Bawaslu, Bawaslu Nasional bagaimana Nias ini karena penyelesaiannya itu justru di ... ketika rekap di tingkat nasional? Disilakan.

2083. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan Nias Selatan itu memang muncul kembali pada saat rekapitulasi di tingkat nasional. Dan dari kedua, baik itu di KPU Sumatera Utara ataupun Bawaslu Sumatera Utara sama-sama sudah menyampaikan apa yang terjadi pada Nias Selatan. Dan kemudian di forum rekapitulasi di tingkat nasional, itu tidak selesai dan kemudian di-pending untuk membahas kenapa rekomendasi dari Panwas Nias Selatan itu kemudian belum sempat dilaksanakan. Dan kemudian ada keputusan dalam rekapitulasi di tingkat nasional pada saat itu di KPU bahwa untuk menindaklanjuti yang belum selesai terkait dengan Nias Selatan, maka KPU Sumatera Utara dan Bawaslu Sumatera Utara harus mencermati kembali apa yang terjadi pada Nias Selatan.

Kami pada saat itu kemudian setelah selesai rapat rekapitulasi di tingkat nasional, mengumpulkan kedua (...)

2084. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bawas itu, Bawaslu dan KPU.

2085. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

KPU Sumatera Utara kemudian Bawaslu Sumatera Utara yang kalau tidak salah itu juga menjelang sahur sampai jam ... melebihi jam 03.00 untuk memutuskan soal-soal terkait ini. Jadi, kedua belah pihak sudah kita pertemukan. Jadi, benar bahwa ada supervisi dari KPU RI dan Bawaslu RI dalam konteks ini dan kemudian keesokan harinya itu maju provinsi yang lain karena Sumatera Utara tersendat di bagian Nias Selatan. Dan itu nanti akan dibacakan kembali setelah beberapa provinsi yang lain sudah selesai. Dan mereka ditugaskan untuk mencermati kembali. Jadi, panwas ... rekomendasi Panwaslu Nias Selatan dari sekian TPS itu dibuka kembali dan itu dilakukan bersama-sama antara KPU Sumatera Utara dan Bawaslu Sumatera Utara.

2086. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebentar, sebentar. Dilakukan pencermatan Nias Selatan itu?

2087. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Ya, atas rekomendasi (...)

2088. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu berdasarkan dokumen atau berdasarkan surat suara di kotak?

2089. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Berdasarkan dokumen.

2090. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Dokumen. Terus?

2091. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Dan setelahnya kemudian disampaikan, dibuka kembali untuk Provinsi Sumatera Utara dan dibacakan hasilnya seperti apa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan (...)

2092. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, kalau hitung-hitungannya sudah. Sekarang persoalan yang tadi ditanyakan oleh Hakim Patrialis itu kan, ini kan tadinya diminta untuk menghitung ulang berubah menjadi pencermatan. Apakah

pencermatan itu tadi juga Saudara sampaikan menghitung ulang berdasarkan dokumen itu?

2093. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Baik, Yang Mulia. Karena memang ini tidak selesai di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi, kemudian muncul kembali di tingkat nasional. Dan karena pada saat itu, provinsi-provinsi yang lain sudah menyampaikan (...)

2094. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bukan. Ini, ini ujungnya, saya, saya langsung ke ujungnya saja. Ini kan lalu diselak-selaki dengan provinsi lain, setelah itu kan kembali lagi ke situ yang menurut istilah Saudara sampai waktu sahur itu. Nah, setelah sampai waktu sahur selesai, kan selesai juga dengan berubah menjadi pencermatan itu. Perubahan menjadi pencermatan itu dari yang semula menghitung ulang itu, apakah memang makna menghitung ulang itu mencermati dengan menghitung ulang atau sama itu dua-duanya?

2095. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Baik, Yang Mulia. Jadi, pada dasarnya rekomendasi Pengawas Pemilu Nias Selatan saat itu baik di kabupaten atau provinsi tidak sempurna dilaksanakan. Sehingga muncul kembali (...)

2096. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sebentar, tidak sempurnanya ketika masih di kampung masing-masing atau setelah di tingkat nasional?

2097. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Di kabupaten dan di provinsi juga tidak dilaksanakan.

2098. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tadi sudah jelas itu.

2099. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Benar.

2100. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Maksud saya ketika di tingkat nasional itu, sempurna apa enggak pelaksanaannya?

2101. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Karena ini menyangkut soal data-data, jadi kedua belah pihak karena dalam catatan pengawas pemilu itu terkait penghitungan suara ulang pada 279 TPS (...)

2102. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, ya, itu, itu sudah oke.

2103. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Benar.

2104. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Lalu pertanyaan saya belum terjawab tadi. Apakah yang disebut dengan menghitung ulang itu sudah dilaksanakan dengan pencermatan kalimatnya, tapi buktinya juga menghitung ulang berdasarkan dokumen itu? Ini maknanya sudah selesai dilaksanakan.

2105. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Mengingat itu sudah dibacakan dalam forum rekapitulasi dalam bentuk Berita Acara yang disampaikan oleh KPU Sumatera Utara dan Bawaslu Sumatera Utara, proses untuk melaksanakan hasil pembahasan rekapitulasi di tingkat nasional itu dengan mencermati dokumen-dokumen.

2106. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Jadi, dianggap selesai atau ujungnya tadi seperti ketua ... Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara tadi juga bilang, "Itu artinya sudah selesai di tingkat nasional."

2107. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Baik, kami bacakan.

2108. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

2109. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Mohon izin, Yang Mulia.

2110. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Berita Acaranya?

2111. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Ya.

2112. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

2113. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Jadi, dari bahwa pada rapat Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di gedung KPU RI pada tanggal 22 Juli, selanjutnya KPU Sumatera Utara bersama Bawaslu Sumatera Utara melakukan pengecekan maupun pencermatan pada 279 TPS-TPS yang direkomendasikan Panwaslu Nias Selatan.

2114. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

2115. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Kejadian khusus itu, kemudian ditemukan sebagai berikut.
Bahwa pertama, terjadi kesalahan KPPS dalam input data pemilih pada formulir C-1.

2116. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, tadi sudah, ya. Yang poin-poinnya itu sudah. Sudah cukup jelas itu. Jadi, sama ya keterangannya dengan KPU Provinsi Sumatera Utara, ya?

2117. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Ada lima poin di sini.

2118. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, oke. Nanti itu dokumen itu dilampirkan saja sebagai ... apa namanya ... keterangan Bawaslu terhadap sengketa ini.

2119. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Baik.

2120. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

2121. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Sebentar, Pak. Saya mau menambahkan saja.

2122. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, silakan.

2123. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, persoalan Nias Selatan ini kan salah satu persoalan yang dibawa oleh Pemohon. Ya, oleh Pemohon, ya. Jadi, memang harus kita klirkan supaya Mahkamah juga bisa menyeluruh komprehensif untuk mengambil kesimpulan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita harus klir.

Tadi latar belakang yang disampaikan oleh Ketua KPU Nias Selatan antara lain, pemilih lebih dari DPT, kemudian juga ada persoalan yang meninggal, ya. Kalau memang hanya persoalan itu misalnya, tentu ini bisa kita mempersandingkan angka-angka yang ada oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dengan KPU, di mana kelebihan pemilih itu? Karena ini 27 kecamatan ini kan banyak sekali. Banyak sekali, ya.

Saya minta Bawaslu dengan Panwaslu Nias Selatan menyampaikan angka-angka itu yang dimaksudkan dengan pemilih lebih dari DPT, kemudian yang meninggal itu berapa. Karena rekomendasi yang diberikan itu enggak main-main, membuat KPU Nias Selatan kaget karena ini 27 kecamatan.

Siapa yang benar ... siapa yang enggak benar, nanti akan kami nilai. Jadi, angka-angkanya tolong dilampirkan, serahkan sebagai bukti.

Kemudian, KPU Kabupaten Nias Selatan juga sampaikan, biar nanti kami yang akan menilai.

Pertanyaan saya terakhir Bawaslu, apa masih ada alasan lain selain daripada dua hal itu? Coba jelaskan!

2124. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Baik, Yang Mulia. Bahwa salah satu yang paling pokok dari rekomendasi Panwaslu Nias Selatan adalah memang kejanggalan dokumen C-1.

2125. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Oke, satu.

2126. BAWASLU: DANIEL ZUCHRON

Dan hanya itu sebenarnya. Karena pada saat pencermatan yang dilakukan oleh (...)

2127. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Oke, oleh karena itu, Bawaslu juga harus ikut bertanggung jawab terhadap dikeluarkannya rekomendasi itu. Jadi, kalau mengeluarkan rekomendasi juga harus bertanggung jawab. Enggak bisa saya mengeluarkan rekomendasi. Ya, panwaslunya maksud saya, jajaran Saudaralah ya, Bawalsu.

Oleh karena itu, persandingan angka-angka ini memang harus disampaikan kepada Majelis. Terima kasih.

2128. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup untuk Nias dan Sumatera Utara, saya kira sudah cukup, dan kita akan lanjutkan ke Provinsi Maluku Utara.

2129. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Majelis Yang Mulia, dari Termohon.

2130. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

2131. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Bila memungkinkan, Majelis, untuk Saksi Papua yang sudah selesai tadi apakah bisa meninggalkan ruangan?

2132. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, bisa meninggalkan.

2133. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik.

2134. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bisa sekali itu.

2135. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Majelis.

2136. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Karena sudah enggak ada yang mau tanya-tanya. Silakan, Saksi-Saksi dari Papua bisa istirahat. Ya, dan Papua Barat juga, kan?

Sambil ini ... menunggu selesai keluar dari ruangan ini, silakan Saudara Ir. Haji kalau enggak salah ini, H. itu ya, Buchori Mahmud.

2137. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Siap, Yang Mulia.

2138. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh ... a ... begini ... di sini saja supaya kelihatan. Itu dokumennya taruh di meja, supaya enak caranya. Supaya enggak lama-lama.

Silakan, Saudara saya cek dulu. Tempat, tanggal lahir, Ternate, 3 Juli tahun 1964?

2139. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Benar, Yang Mulia.

2140. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Agama Islam. Tinggal di Jalan Jeruk, RT/RW 007/002, Ubu-Ubu, Ternate Selatan?

2141. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Benar, Yang Mulia.

2142. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Divisi Hukum yang diminta oleh Termohon, KPU, menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi.

2143. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Baik.

2144. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan, ada apa yang mau dijelaskan?

2145. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Baik, Yang Mulia. Proses tahapan rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 19 Juli Tahun 2014 yang dihadiri oleh KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan ketua-ketua panwas se-Provinsi Maluku Utara, kemudian Ketua dan Anggota KPU se-Kabupaten/Kota se-Maluku Utara, dan undangan yang lainnya.

Dalam proses rekapitulasi itu (...)

2146. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saksi hadir, ya?

2147. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Saksi dua pasangan calon semuanya hadir.

2148. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

2149. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Selanjutnya, dalam proses rekapitulasi itu diberi kesempatan kepada masing-masing kabupaten/kota untuk menyampaikan atau pun membacakan hasil DB yang sudah direkap di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya ada kejadian khusus yang terjadi pada Kabupaten Halmahera Timur.

2150. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Halmahera Timur, ya?

2151. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Ya. Pada saat rekapitulasi berjalan kemudian setelah dibacakan hasil rekapitulasi, lalu kemudian saksi pasangan calon, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan suara ulang di tiga TPS yang dilaksanakan di Halmahera Timur.

2152. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tiga TPS?

2153. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Ya.

2154. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Bisa Saudara sebut kelurahan atau desanya?

2155. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Yang terdiri dari dua TPS di Desa Swasangaji, kemudian TPS 1 dan TPS 2, dan TPS 1 di Desa Tewel di Kabupaten Halmahera Timur.

2156. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, silakan lanjutkan.

2157. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Kemudian, oleh dalam rapat rekapitulasi tersebut, kemudian terjadi perdebatan. Inti daripada keberatan daripada saksi pasangan

calon adalah pertama, khusus untuk TPS 1 dan TPS 2 di Desa Soa Sangaji itu memang dalam proses PSU seluruh pemilih yang ada, baik di TPS 1 dan TPS 2 itu dalam PSU pada tanggal 15 itu tidak ada pemilih yang hadir untuk memberikan suara ulang pada tanggal 15 itu. Sehingga keberatannya adalah meminta kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengembalikan suara semula seperti yang direkap pada tingkat kecamatan pada tanggal ... pada pemilu tanggal 9 sebelumnya.

Untuk itu, mencermati usulan atau pun keberatan dari Saksi Nomor Urut 1, lalu kita minta pandangan daripada Bawaslu Provinsi Maluku Utara, kemudian kami skorsing sidang selama 10 menit, selanjutnya pandangan daripada ... dibuka kembali kemudian pandangan dari Bawaslu adalah bahwa keputusan akhir tetap dikembalikan pada KPU untuk pengambilan apakah mau dikembalikan pada tanggal 9, suara pada tanggal 9, atau tetap menggunakan hasil PSU.

Oleh karena itu, KPU memutuskan bahwa tetap melaksanakan PSU karena berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur itu memang satu poinnya itu adalah membatalkan hasil pemilu pada tanggal 9 untuk di dua TPS itu.

Kemudian poin yang kedua adalah terkhusus kepada apa itu ... yang dimaksud dengan untuk Bawaslu sendiri sudah menyerahkan pada kita sehingga akhirnya pengesahan terhadap hasil suara untuk Kabupaten Halmahera Timur tetap dilaksanakan pada rapat Pleno itu juga.

2158. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Artinya kosong, dong?

2159. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Ya, untuk TPS 1 dan TPS 2 (...)

2160. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Karena tidak ada pemilih yang hadir?

2161. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Ya.

2162. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

2163. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Baik.

2164. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terus? Yang satu lagi bagaimana?

2165. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Yang satunya memang pemilih itu terdaftar itu di dalam DPT itu ada 241 ... maaf, 261, kemudian yang menggunakan hak pilih itu ada sebanyak 175 pemilih.

2166. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Artinya, hadir dan memilih?

2167. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Ya.

2168. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Terus?

2169. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Kemudian, itu tetap tidak dipersoalkan yang dipersoalkan oleh Pasangan Nomor Urut 1, akhirnya pada kesimpulannya kita berikan kesempatan untuk bisa ... apa namanya ... memberikan keberatan atau dalam bentuk tertulis di dalam form DC-2.

2170. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya.

2171. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Dan untuk hasil Berita Acara itu tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

2172. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, ya?

2173. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

2174. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Itu saja?

2175. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Ya, itu yang mungkin perkembangan yang kami sampaikan.

2176. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Dari meja Hakim? Silakan, Yang Mulia.

2177. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Mengklarifikasi kembali bahwa kemudian PSU di Kecamatan Maba TPS 1, 2, Desa Soa Sangaji itu tidak berlaku? Tidak jadi?

2178. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Proses tahapannya tetap berjalan pada tanggal 15 itu TPS dibuka oleh KPPS (...)

2179. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Tapi tidak ada yang hadir?

2180. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Ya.

2181. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Di sini Pemohon mengatakan bahwa faktanya Termohon tidak pernah memberikan informasi atau pun memberikan undangan kepada masyarakat, baik di TPS 1 maupun di TPS 2 Desa Soa Sangaji. Apakah betul sehingga pemilih tidak ada yang hadir?

2182. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Mungkin kalau untuk form undangan panggilan C-6 itu memang pada tanggal 15 itu memang pemilih belum menerima. Alasannya memang karena rekomendasi itu memang keluar pada tanggal 14.

2183. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Tanggal 14?

2184. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Ya, 14 Juli. Kemudian tindak lanjut daripada rekomendasi itu pada tanggal 15, sementara itu bandingannya untuk Desa Tewel di TPS 1 itu tetap berjalan seperti normal biasa.

Memang ada kendala pada saat menyampaikan untuk form panggilan untuk memilih itu kepada masyarakat memang di sana kan untuk kepala-kepala desa itu kan memang menjadi tokoh. Ada alasan dari kepala desa bahwa memang proses untuk pemungutan suara pada tanggal 9 sampai dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu kan tidak masalah untuk dua TPS itu. Mengapa KPU dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur harus melaksanakan pemungutan suara ulang.

Itulah yang menjadi alasan kuat bahwa memang pemilih memang ketika ada pokok yang memang saya tidak katakan dia tidak ... apa namanya itu ... menolak ya, tapi setidaknya-tidaknya menjadi panutan pada saat itu sehingga pemilih tidak hadir atau pun datang untuk memberikan suaranya dalam PSU itu.

2185. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Oke. Sebetulnya apa ... apa alasannya sehingga dimohonkan untuk PSU. Karena dalam perolehan suara sebetulnya kalau kita kembalikan kepada tanggal 9, maka kubu Nomor 1 yang lebih unggul daripada yang kedua. Yang mohon PSU siapa?

2186. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

PSU memang keluarnya rekomendasi dari Panwas Kabupaten Halmahera Timur Nomor 50, itu meminta kepada KPU Halmahera Timur untuk melaksanakan PSU di tiga TPS tadi. Dengan alasan yang pertama bahwa pada saat PSU di ... apa namanya ... pemungutan suara di tanggal 9, itu ada untuk di TPS 1 itu ada pemilih yang terdaftar di DPT ada sebanyak 31 orang yang tidak berada di lokasi pada saat itu. Lalu kemudian, dimasukkan dalam ... apa namanya itu ... hitungannya dia memilih pada saat itu.

Kemudian di TPS 2 itu ada 55 dan TPS 1 di Desa Tewel itu ada 25. Artinya berarti Panwas Kabupaten Halmahera Timur menyimpulkan bahwa ada pemilih lebih dari satu orang mencoblos lebih dari satu kali.

2187. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Lebih dari satu kali. Oke.

2188. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Sehingga itu dasarnya untuk dikeluarkan rekomendasi itu.

2189. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Jadi yang melakukan PSU hanya Desa Tewel saja?

2190. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Ya, yang ... yang partainya memang yang datang memilih hanya di Desa Tewel saja.

2191. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Oke, terima kasih.

2192. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terakhir dari saya untuk Saudara adalah Anda tadi bilang pemilihan itu tanggal 15?

2193. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Benar.

2194. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Apakah alasan tidak memilihnya analisis Anda itu karena "ditolak" oleh pimpinan-pimpinan desa, tokoh-tokoh desa? Lalu apakah KPU menjalankan kewajibannya memberitahukan atau paling tidak mengumumkan lewat radio, lewat speaker, lewat apa?

2195. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Jadi upaya yang sudah dilakukan adalah yang pertama memang untuk di tingkat-tingkat desa memang biasanya memang yang

didahulukan adalah berkomunikasi langsung dengan kepala desa dan aparaturnya.

2196. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sudah dilakukan?

2197. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Sudah dilakukan. Kemudian pada hari yang pemungutan suara juga sebelum pemungutan suara itu dimulai juga sudah dilakukan negosiasi, tetapi secara prinsip bahwa memang tidak juga menolak tapi bahwa mereka sudah melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 9, sehingga adalah tidak elok kalau dilaksanakan pemungutan suara ulang lagi.

2198. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, cukup?

2199. SAKSI DARI TERMOHON: BUCHORI MAHMUD

Cukup, Yang Mulia.

2200. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Silakan di situ saja, supaya berkasnya dapat ditaruh di meja supaya enak bacanya. Karena kalau sambil bawa mik, bawa berkas susah. Oke, saya cek dahulu, nama Saudara La Ode Abdul Natsir?

2201. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE ABD. NATSIR

Ya, Yang Mulia.

2202. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tempat tanggal lahir, Bolak 7 Januari 1973, Agama Islam, tinggal di Perdosa, Unhalu, Kampus Baru.

2203. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE ABD. NATSIR

Ya, Yang Mulia.

2204. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara ... perdos itu perumahan dosen maksudnya?

2205. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE ABD. NATSIR

Ya, Yang Mulia.

2206. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Baru dengar kali ini saya, Perdosa. Kok tidak perum dos gitu deh? Saudara adalah komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara?

2207. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE ABD. NATSIR

Ya, Yang Mulia.

2208. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oleh Termohon, Saudara diminta menjelaskan rekapitulasi di tingkat provinsi, silakan.

2209. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE ABD. NATSIR

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara itu berlangsung tanggal 18 Juli 2014 hari Jumat di Hotel Zahara, Kendari. Rapat rekapitulasi dihadiri oleh Bawaslu Provinsi dan jajarannya, panwas kabupaten/kota, kemudian dua saksi pasangan calon, baik itu Saksi Nomor Urut 1 maupun Nomor Urut 2. Dan kemudian, komisioner KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi secara lengkap.

Nah, dalam pelaksanaan rekapitulasi semuanya berjalan lancar, tertib, tidak ada keberatan-keberatan dari saksi maupun Bawaslu. Bahkan ketika selesai dibacakan misalnya satu kabupaten, kemudian kita minta tanggapan atau keberatan baik itu dari Bawaslu maupun saksi. Ya itu selalu yang kita dapatkan jempol.

Oke, lanjut, oke, lanjut seperti itu. Sehingga rekapitulasi sendiri berlangsung sangat lancar. Jam 10.00 kita mulai, kemudian jam 20.00 malam sudah sudah selesai. Sudah selesai semua penandatanganan, dan penyerahan Berita Acara, dan lampirannya, dan ditandatangani tanda terimanya oleh saksi pasangan calon dan Bawaslu. Saya kira itu.

Kemudian, hasil rekapitulasi sendiri pada saat itu, saksi pasangan calon mendapatkan perolehan suara 511.134 suara. Kemudian, Pasangan Calon Nomor Urut 2=622.217 suara.

Nah, itulah hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah ditetapkan.

2210. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu normal, ya?

2211. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE ABD. NATSIR

Normal.

2212. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kok ada permohonan ke sini? Saudara tentu ketika ada di sana, ada hal apa? Paling tidak, ada kejadian khusus apa yang Saudara bisa terangkan, yang menjadi jalan masuk diajukannya permohonan ini?

2213. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE ABD. NATSIR

Ya, kalau kami mencermati gugatan Pemohon, itu lebih pada sertifikat hasil atau administrasi hasil pemilunya terkait dengan adanya menurut dugaan Pemohon, adanya ketidaksinkronan antara pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan kemudian daftar pemilih.

Nah, tetapi setelah kita sandingkan, nah ada beberapa yang bisa kita temukan, paling tidak kami bisa menyimpulkan dua hal. Yang pertama, Pemohon dalam dalilnya itu menyinkronkan antara data yang seharusnya adalah data pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan, kemudian surat suara sah, dan tidak sah, itu harus klop. Tetapi yang digunakan, basis hitungannya adalah daftar pemilih, padahal tidak semua pemilih menggunakan haknya.

2214. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke.

2215. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE ABD. NATSIR

Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa ketidaksesuaian, itu kita akui, tetapi telah terkoreksi pada Pleno satu jenjang di atasnya, yaitu Pleno di PPS dan hasilnya juga sudah didapatkan, ya. Jadi, kami juga kemarin kaget sebenarnya.

2216. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, oke. Anda ingin bilang bahwa soal hasil perolehan suara ndak ada masalah mereka? Ndak memasalahkan juga, kan?

2217. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE ABD. NATSIR

Tidak ada, ya.

2218. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tapi lebih pada soal proses, dan lebih sempit lagi pada soal administrasi, cara mengadministrasikan, gitu?

2219. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE ABD. NATSIR

Bahkan kalau proses, Yang Mulia, ya sebenarnya tidak juga dipersoalkan. Karena (...)

2220. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oh, tidak.

2221. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE ABD. NATSIR

Dari semua proses itu, itu klir pada tingkat Pleno kabupaten/kota, kemudian Pleno tingkat provinsi (...)

2222. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Bukan (...)

2223. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE ABD. NATSIR

Itu juga (...)

2224. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Admini ... penuangannya ke dalam bentuk administrasi maksud saya.

2225. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE ABD. NATSIR

Ya, penuangannya, ya. Penuangannya dalam bentuk administrasi, tapi tadi sudah (...)

2226. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Itu pun tidak benar, gitu?

2227. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE ABD. NATSIR

Ya, Yang Mulia.

2228. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke. Cukup saya kira, ya?

2229. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE ABD. NATSIR

Ya, terima kasih.

2230. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ada dari meja Hakim? Kalau tidak ada, ini saya sudah diberi tahu Ketua. Terima kasih keterangan Anda. Dan ini karena sudah pukul 18.00 WIB, bagi yang puasa Syawal, bisa segera berbuka, begitu. Dan untuk salat Magrib, makan malam, di belakang banyak warung-warung, ya. Atau nasi kotak sama polisi juga bisa itu. Silakan, Ketua.

2231. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Karena Saksi Termohon ini masih banyak, masih ngantri lagi saksi Pihak Terkait. Jadi, kita harus lanjut malam.

Sidang akan kita buka kembali pada pukul 19.30 WIB. Sidang diskorsing sampai pukul 19.30 WIB.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 17.54 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 19.35 WIB

2232. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Skorsing sidang dicabut kembali.

KETUK PALU 1X

Kita melanjutkan pemeriksaan saksi dari Termohon Provinsi Banten, ya. Silakan, Profesor Arief.

2233. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saksi untuk Provinsi Banten. Saudara Agus Supriyatna, S.H., M.Si.

2234. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Hadir, Yang Mulia.

2235. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya persilakan untuk maju ke depan, supaya kelihatan. Saudara Agus, di sini alamatnya Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, betul?

2236. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Betul, Yang Mulia.

2237. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Saudara adalah Ketua KPU Provinsi Banten, betul?

2238. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Betul, Yang Mulia.

2239. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Saudara akan menerangkan apa? Yang tertera di sini Saudara akan menjelaskan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Banten?

2240. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Ya, Yang Mulia.

2241. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya persilakan.

2242. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa di KPU Provinsi Banten kita melaksanakan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 19 Juli 2014 di Hotel Ledian Serang, yang hadir pada saat itu adalah Saksi Nomor Urut 1 yaitu atas nama Ismail Junaini, S.Hi., dan Dadang Kuswandi, lalu Saksi dari Nomor Urut 2 yaitu Astirudin Purba dan Drajat Sumarsano, lalu yang hadir juga Bawaslu Provinsi Banten, Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, dan Muspida di tingkat Provinsi Banten.

Pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Banten, dimana KPU Provinsi Banten menyampaikan kepada kabupaten/kota untuk menyampaikan perolehan suara dan model DB-nya dibacakan di setiap kabupaten/kota. Lalu kemudian KPU Provinsi Banten menyampaikan kepada saksi baik itu Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 kita tanyakan, "Apakah ada keberatan berkaitan dengan data-data baik itu berkaitan dengan DPT dengan DPK, DPKTB, dan perolehan suara," kita tanyakan, "Apakah ada perbedaan data yang dimiliki oleh saksi dengan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten?" Pada saat itu saksi baik itu saksi untuk Nomor Urut 1 maupun saksi untuk Nomor Urut 2 tidak ada keberatan dan datanya sama, tidak ada perbedaan menurut saksi baik itu Nomor Urut 1 maupun Nomor Urut 2.

2243. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

2244. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Lalu kemudian, kami sampaikan kepada saksi, "Kalau memang ada keberatan, kalau ada perbedaan data tolong sampaikan di forum ini karena forum ini adalah untuk menyampaikan apabila perbedaan data-data itu, baik itu yang berkaitan dengan pemilih maupun berkaitan dengan perolehan suara?" Dan semua saksi menyatakan bahwa datanya cocok tidak ada perbedaan.

Lalu kemudian, kami menyampaikan juga model DC-2, berkaitan dengan apabila ada keberatan dan juga berkaitan dengan data-data

yang ... apa namanya ... perbedaan itu dan saksi baik itu Nomor Urut 1 maupun Nomor Urut 2 mengisi model DC-2 tidak ada keberatan alias nihil dan itu ditanda tangani oleh saksi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2.

2245. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi ... saya potong, intinya tidak ada keberatan dari para saksi?

2246. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.

2247. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian ada kejadian atau peristiwa-peristiwa yang spesifik khusus yang dipersoalkan bagi (...)

2248. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Tidak ada, Yang Mulia.

2249. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada. Kemudian kalau kita lihat di dalam permohonan Pemohon itu ada masalah di Kabupaten Tangerang khususnya Kecamatan Curug, Kelurahan Binong , itu bagaimana itu? Saudara tahu enggak?

2250. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Kita juga menghadirkan KPU Kabupaten Tangerang, memang itu di dalam permohonan Pemohon di Desa Binong, di Curug Sangereng, di Kecamatan (...)

2251. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kalau memang itu ada dihadirkan, ya? Nanti Pak Badrus Salam sendiri yang (...)

2252. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Pak Ramlan yang KPU Kabupaten Tangerang. Yang Pak Badrus Tangerang Selatan

2253. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang Tangerang? Oh, yang Tangerang Pak Ramlan, ya?

2254. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Ya, betul.

2255. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti Pak Ramlan sendiri. Untuk yang di tingkat Provinsi Banten, kalau begitu enggak ada masalah yang spesifik yang terjadi?

2256. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Tidak ada, Yang Mulia.

2257. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada keberatan (...)

2258. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Tidak ada keberatan.

2259. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik lisan maupun tertulis?

2260. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Tidak ada.

2261. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada. Jadi semuanya klir, tidak ada masalah, ya?

2262. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Ya, betul, Yang Mulia.

2263. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada lagi yang akan Anda sampaikan?

2264. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Nah, di dalam permohonan perbaikan Pemohon, disampaikan bahwa itu di Provinsi Banten itu jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yaitu di 8 kabupaten/kota, di 141 kecamatan, di 559 kelurahan atau desa, di 1.225 TPS terjadi pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.

Nah, KPU provinsi kemudian kita melakukan cross-check di dalam model DC itu ternyata tidak ada perbedaan. Umpanya di sini, jumlah surat pengguna ... jumlah seluruh pengguna hak pilih=5.651.467 orang itu sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu 5.651.467. Lalu kemudian, kita juga menelusuri terhadap yang dimohonkan. Umpanya, menurut versi Pemohon di Kabupaten Pandeglang, di Kecamatan Sumur, di Desa Kertajaya, di TPS 2 menurut Pemohon, "Pengguna hak pilih=360, surat suara yang dipergunakan=365." Setelah kita melakukan cross-check di TPS 2 tersebut itu, ternyata itu salah angka dari Pemohon. Yang betul adalah pengguna hak pilih 365 dan surat suara yang dipergunakan 365, jadi tidak ada perbedaan.

Lalu kemudian, kita juga meng-cross-check di Kabupaten Lebak, di Kecamatan Malimping, Desa Cipeundeuy di TPS 2 menurut versi data Pemohon, "Pengguna hak pilih=367, surat suara yang dipergunakan=267." Setelah kita cross-check di TPS tersebut di TPS 2 itu, yang betul adalah pengguna hak pilih=367, surat suara yang dipergunakan juga 367. Lalu juga, menurut Pemohon bahwa jumlah surat suara yang dipergunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah di ... dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu di 7 kabupaten/kota, di 32 kecamatan, di 67 kelurahan atau desa, dan di 98 TPS.

2265. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi begini, saya potong dulu ya.

2266. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Ya, Yang Mulia.

2267. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon itu mempersoalkan 1.047.310 pengguna hak pilih yang bermasalah, itu termasuk yang sudah diklarifikasi semua itu?

2268. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Betul, Yang Mulia.

2269. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian yang berikutnya, untuk yang spesifik secara khusus ya, nanti supaya bisa dijelaskan untuk di Kecamatan Serpong, Kelurahan Pondok Jagung ya, kemudian Kelurahan Paku Jaya, itu ada beberapa hal yang kecil-kecil di TPS yang tidak bisa ... tidak sesuai dengan formulir ... tidak bisa dibuktikan dengan C-7 nya ya, nanti itu dibuktikan.

Jadi untuk KPU provinsi, secara global untuk yang 1.047.310 semua sudah diklarifikasi dan di-check ... cross-check ulang, ternyata tidak bermasalah seperti yang Anda sebutkan tadi, ya?

2270. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Betul, Yang Mulia. Kita juga menghadirkan nanti dari KPU Kota Tangerang Selatan.

2271. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, saya kira untuk yang provinsi cukup, ya. Nanti yang secara spesifik untuk yang Tangerang Selatan dan Tangerang biar ketua KPU-nya, ya.

Jadi sekali lagi untuk rekapitulasi di tingkat provinsi sudah selesai tidak ada masalah, baik permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota kemudian pada waktu rekap, semuanya sudah selesai?

2272. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Betul, Yang Mulia.

2273. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Agus. Sekarang berikutnya (...)

2274. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Perlu saya menyampaikan juga (...)

2275. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tambahan? Ada tambahan apa yang lain yang (...)

2276. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Bahwa di Provinsi Banten, perolehan suaranya untuk Nomor Urut 1 Pasangan H. Prabowo Subianto-Ir. H. M. Hatta Rajasa=3.192.671 suara.

2277. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Nomor Urut 2?

2278. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla=2.398.631 suara.

2279. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi yang unggul adalah Pasangan Nomor 1, ya?

2280. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Betul, Yang Mulia.

2281. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Cukup? Ada yang lain lagi?

2282. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Cukup, Yang Mulia.

2283. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Sekarang berikutnya, Saudara Badrusalam.

2284. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Hadir, Yang Mulia.

2285. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saudara alamatnya di Kampung Babakan, RT 04, RW 02, Kelurahan Lengkong Gudang?

2286. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Betul, Yang Mulia.

2287. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Serpong, Kota Tangerang Selatan. Betul?

2288. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Betul, Yang Mulia.

2289. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Tadi yang sudah didalilkan Pemohon, bagaimana menurut Saudara? Apa betul yang didalilkan itu untuk Tangerang Selatan?

2290. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Baik, Yang Mulia. Saya akan menjelaskan bahwa mengenai TPS 29 di Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, memang Saksi Nomor Urut 1, atas nama Didan Wahyu Nendra ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan mempersoalkan TPS ini, dimana ada menurut saksi, 51 orang yang menggunakan DPKTB di TPS 29 tersebut.

2291. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Menggunakan KTP, ya?

2292. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Menggunakan KTP.

2293. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

2294. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Dan saksi ketika itu memohon kepada forum Rapat Pleno tingkat kecamatan untuk membuka kotak TPS tersebut membuktikan apakah betul ada DPKTB yang bukan (...)

2295. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak didukung ya?

2296. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Betul.

2297. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oleh (...)

2298. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Dan ternyata itu tidak benar karena data 51 yang ... 51 pemilih yang ada dalam TPS 29 itu warga setempat.

2299. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, KTP-nya menunjukkan bahwa domisilinya adalah domisili sesuai dengan Kelurahan Pondok Jagung?

2300. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Betul dan itu akhirnya saksi atas nama Wahyu Nendra mencabut atau menganulir keberatan yang ditulis oleh Saksi Nomor Urut 1 di tingkat Pleno PPS.

2301. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, sudah diselesaikan di tingkat PPS?

2302. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Sudah.

2303. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah enggak ada masalah?

2304. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Sudah tidak ada masalah, Yang Mulia.

2305. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti keberatan Saksi Pasangan Nomor 1 juga selesai ya?

2306. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Selesai.

2307. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Apa lagi?

2308. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Untuk yang TPS 28 yang tadi (...)

2309. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Menyangkut 148 orang itu?

2310. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Betul.

2311. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Gimana?

2312. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Saksi Nomor Urut 1 atas nama Wahyu Nendra meminta kepada forum Rapat Pleno tingkat kecamatan juga membuka kotak dan kemudian ditemukan dari 141 orang yang menggunakan DPKTB ada 9 orang pemilih, Yang Mulia, yang memang bukan berdomisili di TPS tersebut.

2313. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dari 148?

2314. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Dari 148 ada 9 orang yang bukan KTP setempat dan ada 1 orang yang menggunakan A-5 tapi tidak ada tanda tangan PPS asal.

2315. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, begitu.

2316. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Ya dan kemudian pada forum itu Saksi Nomor 1 memohon kepada panwascam yang hadir untuk merekomendasikan dilaksanakannya PSU dan pada hari kemudiannya panwaslu ... panwascam, mohon maaf, panwascam Kecamatan Serpong Utara merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Serpong Utara dengan nomor rekomendasi, Nomor 01/Panwascam/VII/2014 itu agar melaksanakan PSU di TPS 28 tersebut.

2317. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Atas dasar rekomendasi itu terus gimana?

2318. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Terus kemudian sesuai dengan PKPU mengenai rekapitulasi, PPK melaporkan kepada kami di KPU Kota Tangerang Selatan dan kami langsung melakukan Rapat Pleno mengeluarkan surat keputusan mengenai dilaksanakannya PSU dan pada tanggal 14 (...)

2319. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

14 Juli, ya?

2320. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Pada tanggal 14 Juli itu ... mohon maaf, Yang Mulia, pada tanggal 16 Juli, mohon maaf. Pada tanggal 16 Juli dilaksanakan PSU di TPS 28. Sesungguhnya yang dipersoalkan ini sudah ditindaklanjuti oleh PPK kami dengan melaksanakan PSU pada tanggal 16.

2321. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, sudah ada PSU?

2322. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Sudah, betul, Yang Mulia.

2323. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pada waktu PSU ada perubahan yang signifikan?

2324. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Hasil PSU perlu kami jelaskan bahwa dari DPT di TPS 28 itu sebanyak 6 ... 655.

2325. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

665?

2326. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

655 betul.

2327. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

2328. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

DPKTB-nya itu yang menggunakan awalnya 148 itu (...)

2329. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berkurang?

2330. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Berkurang. Untuk DPT-nya yang menggunakan dari awalnya ... sebentar, Yang Mulia. Dari DPT awalnya 458 menjadi 355 berkurang 103 orang.

2331. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, partisipasi yang terdaftar di DPT berkurang ya?

2332. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Berkurang.

2333. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

2334. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Begitu pun di ... di DPKTB.

2335. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang DPKTB yang semula 148 (...)

2336. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Menjadi hanya 25 orang, Yang Mulia.

2337. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

25 orang.

2338. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Betul.

2339. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang 9 orang yang tadinya bukan penduduk asli di situ yang alamatnya sudah enggak ada lagi?

2340. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Sudah tidak ada lagi.

2341. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus hasil yang terakhir untuk (...)

2342. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Hasil yang terakhir untuk ... awalnya Pasangan Nomor Urut 1=205 menjadi 106.

2343. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus yang Pasangan Nomor 2?

2344. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Nomor Urut 2 awalnya 408 menjadi 286.

2345. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

286.

2346. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Jadi, pemilih yang hadir awalnya 613 sebelum PSU dan setelah PSU hanya 392.

2347. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang saya lanjutkan pertanyaan saya. setelah PSU semua saksi sudah enggak ada masalah, tanda tangan?

2348. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Sudah tidak ada masalah.

2349. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik Pasangan Saksi Nomor 1 maupun Nomor 2 sudah tidak ada masalah?

2350. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Tidak ada masalah, Yang Mulia.

2351. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti untuk permasalahan di TPS 28 sudah klir ya?

2352. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Sudah klir, Yang Mulia.

2353. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ada lagi yang akan Anda jelaskan?

2354. SAKSI DARI TERMOHON: BADRUSALAM

Cukup, Yang Mulia.

2355. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup ya. Baik, kalau begitu silakan duduk. Berikutnya Pak Ramelan.

2356. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Yang Mulia.

2357. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Ramelan, silakan Anda ... saya cek dulu, alamatnya di Sultan Adam Komplek Perum Bulakindo, betul?

2358. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Salah itu, Ketua.

2359. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di gimana ini, saya bukan ketua.

2360. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Yang Mulia (...)

2361. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti saya kira kudeta nanti.

2362. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Jalan PLP Curug, Desa Curug Wetan.

2363. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah ini alamatnya salah, ya?

2364. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Salah, Pak Ketua.

2365. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tolong anu ... disebutkan yang betul dulu, alamatnya?

2366. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Jalan ... Jalan PLP Curug, Nomor 58.

2367. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PLP Curug, nomor?

2368. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

58.

2369. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

58.

2370. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

RT 001, RW 004.

2371. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh yang ini ya? Betul. Ini matanya sudah cukup. Jadi alamatnya Ramelan itu yang saya sebutkan yang Kalimantan Selatan malah itu, ya. Kacau kalau sudah jam segini. Kuasa Pemohon saja sudah pada ngantuk semua.

Baik, saya persilakan, Saudara Ramelan.

2372. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Baik, Yang Mulia, saya ingin menjelaskan tentang proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 pada hari Rabu.

2373. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2374. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Perlu saya sampaikan bahwa dalam proses rekapitulasi tingkat KPU kabupaten, sesungguhnya tidak ada persoalan yang dipersoalkan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor 1 atau Pasangan Nomor 2, tapi memang ada kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 1 Pak Rispanel Aria yang saat itu hadir.

2375. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2376. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Dia mempertanyakan tentang tindak lanjut persoalan yang terjadi di TPS 51, seperti tadi Yang Mulia sampaikan dan juga ada yang di Curug Sangereng.

2377. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2378. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Nah pada saat itu lalu kami meminta PPK yang hadir pada saat itu untuk menjelaskan tentang TPS 51 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, yang diduga ada 192 (...)

2379. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

192.

2380. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Data pemilih yang diduga ... DPKTB yang diduga tidak (suara tidak terdengar jelas) data apapun.

2381. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Gimana ini penjelasannya?

2382. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Jadi gini, saat itu PPK menjelaskan dan juga ada panwascam juga ikut hadir saat itu bahwa dugaan munculnya pemilih yang dianggap tidak jelas itu karena saksi saat itu melihat ... jadi gini, Yang Mulia, saya akan bercerita tentang rekap di kecamatannya dulu.

2383. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

2384. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Jadi sebenarnya di TPS 51 itu ketika proses rekap pemungutan suara tidak ada keberatan dari saksi manapun, begitu juga ketika proses rekap di desa. Lalu angka 192 itu muncul ketika angka itu ditulis oleh Saksi Pasangan Nomor 1 setelah Pleno rekap di tingkat kecamatan.

2385. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2386. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Jadi saat itu terhadap dugaan adanya pemilih DPKTB yang menggunakan KTP luar, Saksi Pasangan Nomor Urut 1 lalu meminta dibuka kotak di TPS 51, yang kemudian oleh PPK-nya ditindaklanjuti membuka kotak. Lalu saksi hanya melihat C-7, AT khusus segala macam, dia tidak berkomentar apa-apa. Lalu kemudian karena mereka kebetulan saat itu ... di akhir ya pembacaannya, di pemeriksaan kotaknya, lalu saksi kemudian menulis DA-2.

2387. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2388. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Nah karena forum Pleno sudah ditutup saat itu, lalu itu diserahkan ke KPU. Nah, memang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi Pasangan Nomor 1 di KPU, kembali lagi ke awal bahwa saat itu kita meminta PPK dibantu oleh panwascam menjelaskan bahwa dugaan itu muncul karena ada NIK (Nomor Identitas Kependudukan) yang berkode luar daerah, yang diduga itu pemilih luar daerah, lalu itu dijelaskan bahwa tidak melulu atau tidak serta-merta bahwa kode NIK yang luar daerah itu

bukan penduduk setempat karena dengan sistem kependudukan nasional, masyarakat yang pindah ke situ NIK-nya tetap, walaupun NIK awalnya adalah kode daerah.

2389. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, begitu.

2390. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Jadi itu. Itu satu. Dan alhamdulillah waktu itu, saksi juga menerima penjelasan itu.

2391. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi yang masalah NIK luar daerah itu sebetulnya karena NIK itu tidak berubah, yang sebetulnya tadinya penduduk lain tempat, kemudian sudah pindah ke situ masih menggunakan NIK yang lama?

2392. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Ya dan diduga itu pemilih dari DPKTB dari daerah lain.

2393. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kemudian yang paspor dan KK? Yang menyangkut itu ... itu kan menyangkut 192 itu, gimana?

2394. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Saya tidak mendapat penjelasan tentang itu, Yang Mulia. Jadi saat itu PPK hanya menjelaskan tentang kode NIK daerah saja, gitu.

2395. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi di TPS 51 itu menurut Pemohon ada indikasi 192 yang memilih menggunakan DPKTB yang bermasalah karena tidak didukung oleh form C-7, jadi tidak ada di situ, disinyalir NIK-nya NIK luar daerah, paspornya juga, kemudian KK-nya juga tidak didukung oleh KK di situ, itu gimana?

2396. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Tidak benar, Yang Mulia.

2397. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada rekomendasi panwas di situ?

2398. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Tidak ada sama sekali.

2399. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada?

2400. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Tidak ada sama sekali.

2401. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada ya?

2402. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Betul.

2403. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi untuk TPS 51 yang 192 itu sebetulnya enggak ada masalah?

2404. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Enggak ada masalah dan bisa dijelaskan oleh (...)

2405. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hanya yang kasusnya yang itu tadi?

2406. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Ya.

2407. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang di PPK sudah diklirkan di tingkat PPK?

2408. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Di tingkat KPU selesainya.

2409. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh sudah selesainya di tingkat KPU ya?

2410. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Betul, Yang Mulia.

2411. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang lain?

2412. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Yang lain tentang (...)

2413. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk yang di TPS Curug Sangerang itu?

2414. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua. Dalam dalil Pemohon disebutkan terjadi pengerahan massa dan sekitar 726 pengguna DPKTB.

2415. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2416. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Yang menggunakan KTP luar daerah.

2417. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu kan menyangkut TPS 16, 17, 18, dan sebagainya, betul?

2418. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Ya di situ disebutkan ada TPS 16, 17, 18.

2419. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sampai dengan TPS 25?

2420. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Ya, perlu saya jelaskan di sini bahwa sesungguhnya di TPS ... Curug Sangereng, jumlah TPS hanya berjumlah 22, bukan 25.

2421. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi yang TPS 25 itu salah, ya?

2422. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Tidak ada TPS 25.

2423. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh.

2424. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Dan perlu saya sampaikan bahwa atas dugaan pengelem ... dugaan pengguna KTP dari luar daerah itu, Saksi Nomor 1 telah meminta dibukakan kotak ketika Pleno di desa, yang kemudian memang langsung dibuka kotak-kotak tersebut dan kemudian ... dan dari ... pertama saya sebutkan juga dari TPS-TPS yang didalilkan Pemohon jumlah DPK-nya itu ... DPKTB-nya itu bukan 726 tapi dari total itu hanya 423. Dan setelah dibuka kotak di tingkat desa, memang kemudian ada sembilan ... 21 pemilih yang diduga menggunakan KTP luar daerah, yang kemudian oleh Saksi Pasangan Nomor 1 itu dilaporkan ke panwascam.

2425. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Panwascam.

2426. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Lalu kemudian ketika Rapat Pleno di tingkat Kecamatan Kelapa Dua, Saksi Pasangan Nomor 1 juga kemudian menanyakan kembali, "Gimana tentang keberatan mereka di Desa Curug Sangereng."

Namun PPK karena melihat itu sudah dilaporkan ke panwascam dan ditindaklanjuti oleh ke panwaslu, PPK lalu tidak mengambil tindakan apa-apa, sambil menunggu rekomendasi panwas. Tapi ketika saat Pleno

di tingkat kecamatan, rekomendasi itu tidak muncul. Makanya kemudian biar tidak overlapping gitu, PPK tidak melakukan ... menindaklanjuti apa ... keberatan saksi. Dan kemudian memang saksi di PPK Kelapa Dua itu meminta PSU di DA-2 nya itu.

2427. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang 21 orang itu di TPS mana?

2428. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Di TPS (...)

2429. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang 21 (...)

2430. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Di TPS 19 itu ada 7 pemilih, TPS 21=9 pemilih, dan di TPS 22 ada 5 pemilih.

2431. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS ... jadi yang 21 pemilih tidak warga setempat sesuai dengan KTP-nya adalah TPS 19, TPS 21, dan TPS 22?

2432. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Ya, dan itu hanya berjumlah 21, tidak berjumlah 726, seperti yang didalilkan Pemohon.

2433. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, hanya 21?

2434. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Baik.

2435. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi akhirnya rekomendasinya gimana untuk TPS-TPS yang ada orang di luar kok ikut memilih di situ?

2436. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Nah, sama ... kemudian ketika saat rekapitulasi di tingkat KPU kabupaten, Saksi Pasangan Nomor Urut 1 Paris (suara tidak terdengar jelas) memang pertanyakan hanya TPS 51 di Curug Binong itu dan Curug Sangereng. Kami jelaskan bahwa sampai saat itu ... saat tersebut ... saat kami Pleno, kami tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari panwaslu. Namun kemudian kita meminta panwaslu karena hadir saat itu, menjelaskan tentang proses laporan mereka.

Nah, dalam kesempatan itu panwaslu menjelaskan bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 1 di tingkat PPS Curug Sangereng, mereka setelah melakukan kajian dan pemanggilan saksi-saksi, menurut mereka dalam forum itu menjelaskan tidak cukup bukti bahwa itu diduga dari pemilih lain. Dan bahkan pada saat itu kalau memang diperlukan bukti-bukti pendukung, Saksi Pasangan Nomor 1 menawarkan kita buka kotak saat itu juga. Karena memang kami di KPU kabupaten juga berprinsip bagaimana hal-hal yang tidak beres di kecamatan, di desa, atau TPS bisa selesai di situ. tapi kemudian setelah mendapat penjelasan dari PPK, dari panwaslu, dan KPU kabupaten, Saksi Nomor Urut 1 (...)

2437. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Akhirnya menerima?

2438. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Menerima. Terlebih dahulu dia minta izin berkoordinasi dengan partai koalisi yang hadir kebetulan di luar gitu, nonton. Karena kita memang menyediakan giant layar itu di luar. Berapa saat kemudian mereka masuk lagi dan menyatakan bahwa penjelasan yang disampaikan oleh PPK Kelapa Dua, PPK Curug, dan KPU kabupaten serta panwaslu dianggap cukup dan mereka menerimanya.

2439. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bisa diterima, ya. Akhirnya rekapitulasinya juga hasilnya ditandatangani (...)

2440. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Ditandatangani semua (...)

2441. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada keberatan lagi, ya?

2442. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Ya.

2443. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi yang akan disampaikan Pak Ramelan?

2444. SAKSI DARI TERMOHON: RAMELAN

Cukup, Yang Mulia.

2445. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, baik. Kemudian berikutnya Pak Samahu Muharram. Kalimantan Selatan sekarang kita.

Baik tadi alamatnya sudah saya sebutkan, betul Pak Samahu?

2446. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Betul, Yang Mulia.

2447. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Alamatnya Sultan Adam, ya?

2448. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Siap, Yang Mulia.

2449. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Silakan, Anda akan menjelaskan rekapitulasi di tingkat Kalimantan Selatan. Bagaimana?

2450. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Siap, Yang Mulia.

2451. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

2452. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Penting kami sampaikan bahwa di Kalimantan Selatan, kami di provinsi itu melakukan rekapitulasi dan perhitungan suara itu di hari Jumat, tanggal 18 Juli 2014, mulai jam 09.00 WITA sampai jam ... pukul 15.00 WITA. Dan pada saat itu semua atau kedua pasangan saksi, kedua pasangan itu semuanya hadir. Kemudian yang hadir juga adalah Bawaslu provinsi. Kemudian semua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

Kemudian juga hadir semua unsur Muspida, termasuk beberapa pimpinan parpol koalisi juga hadir di sana. Kemudian juga kapolda, pak danrem semuanya hadir.

Nah, pada saat kami rekapitulasi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan itu sama sekali tidak ada keberatan daripada saksi kedua pasangan, mulai dari tingkat KPPS, kemudian PPS, kemudian PPK, sampai di tingkat KPU kabupaten, bahkan di tingkat provinsi (...)

2453. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, waktu rekapitulasi itu kan per kabupaten?

2454. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Ya, per kabupaten.

2455. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada komplain? Tidak ada (...)

2456. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Tidak ada komplain, tidak ada kejadian khusus (...)

2457. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kejadian khusus yang perlu dimasalahkan waktu itu enggak ada, ya?

2458. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Tidak ada sama sekali, Yang Mulia.

2459. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Akhirnya, semua tanda tangan, Saksi Nomor 1 dan Nomor 2 juga tanda tangan?

2460. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Semuanya tanda tangan, bahkan mengajukan jempol. Jadi tidak ada masalah untuk Kalimantan Selatan, makanya ketika sampai di sini, kami juga kaget.

2461. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mengajukan jempol itu untuk Pak Samahu berarti, ya?

2462. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Semuanya, kerja kawan-kawan di tingkat semua tingkatan penyelenggara.

2463. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, begitu. Pak Samahu hebat ini seluruh anak buahnya, gitu ya. Enggak ada (...)

2464. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Siap, Yang Mulia.

2465. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, Pak Samahu baca enggak permohonan Pemohon ini? Ada beberapa hal yang dipermasalahkan di sini?

2466. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Ya, siap, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan bahwa memang ada lampiran keberatan daripada Pemohon, itu ada lampiran P-1, itu sesungguhnya adalah ada kekeliruan dalam konteks membaca data karena dimana data pemilih itu sesungguhnya itu dijadikan sebagai data PHP, sehingga itu mana bisa sinkron dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Jadi saya kira sama tadi dengan Sulteng, itu juga salah ... apa ... sebelumnya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara tadi itu adalah data pemilih oleh Pemohon itu dijadikan sebagai PHP (Pengguna Hak Pilih).

Pengguna Hak Pilih (PHP). Ya, kemudian dan ini bisa ... ada kami lampirkan semua contoh (...)

2467. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu istilah khusus Kalimantan Selatan, jangan dibawa-bawa sampai sini. Saya juga enggak tahu jadinya.

2468. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Ya, jadi kami juga melampirkan, Yang Mulia. ... apa ... lampiran yang disampaikan oleh Pemohon di semua TPS, itu sudah kami kumpulkan, kemudian P-2, itu P-2 juga saya kira apa yang disampaikan oleh Pemohon, itu juga keliru dalam konteks ... apa ... dalil yang disampaikan. Karena kenapa? Karena di mana data yang ... data ... apa namanya ... surat suara yang sah, itu saja dimasukkan sebagai pengguna hak pilih, sehingga jadinya tidak sinkron karena suara yang tidak sah, itu tidak dimasukkan sebagai pengguna hak pilih.

2469. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk DPKTB-nya di Kalimantan Selatan bagaimana itu?

2470. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

DPKTB di Kalimantan Selatan itu memang ada berjumlah 50.640. Yang paling banyak itu di Banjarmasin dan kemudian di Kotabaru.

Nah, kenapa ini sampai terjadi? Karena kebanyakan dari mereka itu adalah adanya ... misalnya di Kotabaru ada nelayan, kemudian pada saat ... apa ... bulan puasa ... karena bulan puasa kemarin pencoblosan, itu kebetulan pada naik ke darat semuanya, sehingga itu kemudian mempergunakan hak pilihnya, sehingga itu kemudian membuat jumlah pemilih DPKTB itu bertambah.

2471. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi didukung oleh semuanya terrekam dengan baik, ya?

2472. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Semuanya tercover dengan baik di data.

2473. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada data pendukung bahwa dia memang domilisi di situ, KTP-nya begitu, itu semuanya?

2474. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Siap, Yang Mulia. Tidak ada keberatan.

2475. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada keberatan, ya. Baik, kalau begitu, ada lagi yang akan disampaikan?

2476. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Ya, perlu kami sampaikan, seperti apa yang disampaikan kemarin oleh saksi Pemohon mengenai kasus Tanah Bumbu yang dikatakan ada sembako yang dilakukan oleh salah satu tim sukses, saya kira ini persoalan ini sudah diselesaikan di tingkat panwas, bahkan kasus ini dibawa di ranah sentra Gakkumdu yang kemudian bersangkutan kemarin juga dipanggil, tapi tidak pernah datang pada saat kasus disidangkan di sentra Gakkumdu, sehingga kemudian keluar SP3. Jadi, kasus ini, saya kira sudah dianggap selesai di tingkat Panwas Kabupaten Tanah Bumbu.

2477. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, yang masalah pembagian sembako itu akhirnya di SP3 enggak ada masalah, ya?

2478. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

SP3 karena kemudian setelah kawan-kawan melakukan kajian, itu tidak terbukti ... apa ... (...)

2479. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berkaitan dengan (...)

2480. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Alat bukti formil dan alat bukti materiil yang tidak ... tidak lengkap, tidak cukup untuk dikatakan sebagai tindak pidana.

2481. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tindak pidana. Baik, ada lagi?

2482. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Saya kira cukup, Yang Mulia.

2483. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup ya?

2484. SAKSI DARI TERMOHON: SAMAHU MUHARRAM

Ya.

2485. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Samahu. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Tengah, Pak Daan Rismon. Silakan. Sudah berdiri, Pak Daan? Belum kelihatan soalnya tadi.

2486. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Ya, Yang Mulia.

2487. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, alamat Pak Daan, Jalan Panglima Batur, Nomor 20, Buntok, Kalimantan Tengah?

2488. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Betul, Yang Mulia.

2489. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Daan adalah Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah?

2490. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Betul, Yang Mulia.

2491. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bidang apa?

2492. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Divisi Teknis Penyelenggara.

2493. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Teknis Penyelenggaraan. Baik, silakan, Pak Daan akan menjelaskan mengenai bagaimana rekapitulasi di Kalimantan Tengah, juga tanggapan Pak Daan mengenai kesaksian dari saksi Pemohon kemarin?

2494. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

2495. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

2496. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Saya akan ceritakan proses rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah bahwa di KPU Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan rekapitulasi pada tanggal 19 Juli di Hotel Aquarius. Dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi ... 2 orang Bawaslu Provinsi, unsur forum komunikasi daerah, kemudian saksi ... 2 orang saksi, yaitu atas nama Heru Hidayat dari Paslon 1 dan saksi dari Paslon 2 atas nama Awang Ganda Wilinjar.

Bahwa proses dilaksanakan dari jam 08.00, berakhir jam 16.00. Bahwa dari proses itu memang ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi Pasangan Nomor Urut 1 itu keberatannya terkait masalah, satu, garis besarnya adalah distribusi surat suara yang kurang dari 2% di Kabupaten Barito Utara dari 14 kabupaten/kota ... kabupaten di Kalimantan Tengah itu, hanya satu yang dianggap kurang dari 2%.

2497. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tidak ada tambahan 2% itu?

2498. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Ada, tapi kurang.

2499. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kurang.

2500. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Ada, tapi kurang.

2501. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2502. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Kemudian, yang kedua adalah mempersoalkan masalah kekurangan penyerahan by name DPT, dari 14 kabupaten itu kurang diserahkan dari Kabupaten Barito Selatan dan Kotawaringin Timur.

2503. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

2504. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Dalam penjelasan kami kepada Saksi dari Pasangan Nomor Urut 1 itu bahwa betul terjadi kekurangan 2,5% per kabupaten surat suara yang didistribusikan ke Kabupaten Barito Utara, tetapi itu hanya 75 lembar. Bahwa di situ ada 351 TPS, jadi hanya pada kurang-lebih 73 TPS saja yang kurang, itu yang kami jelaskan.

Kemudian, terkait dengan kurangnya daftar pemilih tetap yang kami sampaikan untuk Kabupaten Barito Selatan dan Kotawaringin Timur itu karena disampaikan pada penetapan DPK pada tanggal 2 Juli, kemudian kami sampaikan kekurangannya kepada saksi pasangan ... saksi ... kepada tim kampanye, Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 itu bahwa memang secara teknis ada keterlambatan, tetapi kami sampaikan kembali kekurangannya. Dan itu sudah dipersoalkan pada rekap nasional, tetapi kami tampilkan buktinya berupa tanda terima dari tim kampanyenya. Dan itu sudah juga kami sampaikan.

Kemudian, pada saat rekap tingkat nasional itu ... mohon maaf, pada saat rekap tingkat provinsi itu, tidak ada satu pun rekomendasi Bawaslu atas hal-hal yang menjadi keberatan tersebut.

2505. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Keberatan dari saksi pasangan calon (...)

2506. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Sehingga, kami menganggap karena tidak ada rekomendasi, artinya permasalahan sudah selesai.

2507. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang saya mau tanya yang spesifik. Yang spesifik itu, yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah apakah Saudara bisa menjelaskan masalah adanya surat keterangan domisili yang cukup masif di Desa Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kotawaringin Barat? Seolah-olah itu ada indikator bahwa di situ ada mobilisasi massa dengan diberikan surat keterangan domisili yang surat keterangan domisilinya itu tidak legal, gimana itu? Ini banyak yang dimasalahkan.

2508. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Baik, Yang Mulia, nanti ada dari KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menjelaskan secara spesifik masalah itu.

2509. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, KPU, ya. Pak Awaluddin ya, nanti, ya?

2510. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Betul, Yang Mulia.

2511. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, untuk Kalimantan Tengah sudah cukup, ya? Ada tambahan lagi?

2512. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Saya kira cukup.

2513. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya, baik.

2514. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Perlu kami jelaskan (...)

2515. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada tambahan?

2516. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Ada tambahan, Yang Mulia, sedikit.

2517. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

2518. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Terkait dengan ... dalam permohonan itu, ada 7 dari halaman 153 sampai 157 itu, ada 7 poin yang menjadi keberatan. Poin 1 dan 6 nanti dijawab oleh KPU Kotawaringin Barat.

2519. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu tadi yang saya tanyakan, ya?

2520. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Dan poin 7 itu perlu kami jelaskan sedikit, Yang Mulia.

2521. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2522. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Bahwa ... sebagai contoh saja, Yang Mulia, sebagai contoh, sama seperti tadi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara tadi bahwa Pemohon hanya salah dalam membaca data saja.

2523. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pembacaan data, ya?

2524. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Ya. Misalnya seperti ini, kami ambilkan contohnya di TPS 4 Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Di dalam dalil Pemohon itu menyebutkan jumlah seluruh pengguna hak pilih itu 192, jumlah surat suara yang digunakan 197, jumlah surat suara sah dan tidak sah=192.

Sesungguhnya, kalau kita membaca data itu, sebenarnya sama, Yang Mulia. Jumlah seluruh pengguna hak pilih itu 197, kemudian jumlah surat suara yang digunakan=197 jumlah surat suara sah, jumlah suara sah dan tidak sah=197. Nah, itu salah satu contohnya, Yang Mulia.

Selanjutnya, yang lainnya kami sampaikan dalam keterangan Termohon melengkapi dari keterangan Termohon keseluruhan.

2525. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Daan Rismon.

2526. SAKSI DARI TERMOHON: DAAN RISMON

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

2527. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Pak Awaluddin, S.E., silakan maju ke depan. Ini Pak Awaluddin alamatnya di Jalan A. Yani, RT 18, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, ya, Kotawaringin Barat.

2528. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Betul, Yang Mulia.

2529. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pak Awaluddin sebagai apa?

2530. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Sebagai Anggota KPU Kabupaten (...)

2531. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk bidang apa? Divisi apa ini?

2532. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Divisi Teknis.

2533. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Divisi?

2534. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Teknis.

2535. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Teknis, baik.

2536. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Betul, Yang Mulia.

2537. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini akan menjelaskan yang spesifik tadi saja, yang berhubungan dengan adanya praduga mengenai mobilisasi pemilih yang berkenaan dengan diterbitkannya, banyak diterbitkannya surat keterangan domisili. Bagaimana ini?

2538. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Baik, Yang Mulia. Tentang diterbitkannya surat keterangan domisili, itu ada stempel pemerintahan desa, ada yang menandatangani oleh perangkat desa. Kami sebagai penyelenggara di tingkat bawah KPPS selama ada surat keterangan tersebut yang dikeluarkan oleh instansi resmi, mereka menerima karena anggapan mereka tidak ingin menghilangkan hak pilih seseorang. Dan warga yang ada keterangan domisilinya itu, sudah lama bermukim di desa tersebut.

2539. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berapa orang pemilih itu yang bisa didata, Pak Awaluddin?

2540. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Itu menurut model DA ada 517.

2541. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

517. Satu kecamatan ini?

2542. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Satu kecamatan, Yang Mulia.

2543. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, satu PPK. PPK mana itu?

2544. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

PPK Pangkalan Lada, Yang Mulia.

2545. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pangkalan Lada?

2546. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Lada.

2547. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, itu yang dianu ya ... berarti di Desa Pandu Sanjaya itu, ya?

2548. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Di Desa Pandu Sanjaya, Yang Mulia.

2549. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, dari 517 itu memang semuanya menggunakan surat keterangan domisili itu tadi?

2550. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Menggunakan, Yang Mulia.

2551. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi diketahui betul bahwa mereka memang sudah lama berdomisili di Pangkalan Lada situ, di Pandu Sanjaya?

2552. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Memang sudah lama, Yang Mulia. Karena mereka adalah karyawan perusahaan swasta yang sudah satu tahun lebih (...)

2553. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dan ini terrekam baik pada waktu dia menggunakan hak pilihnya?

2554. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Terrekam baik karena waktu penghitungan di TPS tidak ada protes dari masing-masing saksi dan begitu juga rekapitulasi tingkat PPS tidak ada yang komplain. Masing-masing saksi menandatangani, begitu juga untuk tingkat PPK.

2555. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, saya tanyakan contoh-contoh yang menandatangani surat domisili itu siapa saja? Bukan kepala desa, ada yang lain-lain yang di situ ditemukan bagaimana?

2556. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Di situ ada yang kades, ada kaur umum.

2557. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada kades tanda tangan, ada yang tanda tangan kaur umum, ada lagi? Sekdes, begitu?

2558. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Sekdes yang setahu saya, yang saya lihat, ada yang kades, ada yang kaur pemerintahan.

2559. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebanyak 517, ya?

2560. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Betul, Yang Mulia.

2561. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kemudian, ada komplain atau ada yang dimasalahkan bahwa itu surat keterangan palsu, dan sebagainya, ada enggak diproses secara hukum?

2562. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Tidak ada. Tidak ada, Yang Mulia.

2563. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, itu surat domisilinya itu tetap dianggap legal sampai hari ini, ya?

2564. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Sampai hari ini dan sampai rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada yang memperlmasalahkan tentang surat domisili ini.

2565. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, itu tetap legal, ya? Yang tanda tangan kepala desa, yang tanda tangan kaur, itu semuanya sampai hari ini tidak ada permasalahan hukum bahwa itu tidak legal? Enggak ada, ya?

2566. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Ya, Yang Mulia, tidak ada permasalahan.

2567. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau menurut peraturannya, mestinya yang tanda tangan siapa? Enggak tahu, ya?

2568. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Kurang tahu, Yang Mulia.

2569. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kurang tahu, ya. Ya, baiklah, ada lagi yang akan disampaikan, Pak Awaluddin?

2570. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Tidak ada, Yang Mulia, cukup, yang lain-lainnya sama yang dijawab Bapak Daan tadi.

2571. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya. Bapak Daan tadi, ya? Jadi, intinya yang spesifik adalah 517, yang menggunakan surat keterangan domisili itu dia karyawan perusahaan swasta di situ.

2572. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Perusahaan swasta.

2573. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi memang diketahui bahwa yang 517 itu karyawan di situ yang sudah bertempat tinggal lama di situ, ya?

2574. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Sudah lama, Yang Mulia.

2575. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dan tidak ada proses hukum sampai hari ini mengenai surat keterangan domisili palsu, ya?

2576. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Tidak ada, Yang Mulia. Dan saya pun baru tahu sekarang.

2577. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan, Yang Mulia.

2578. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Saudara Awaluddin, ya?

2579. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Ya, Yang Mulia.

2580. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini di Pemohon menyebutkan Saksi Pemohon bahwa ada surat keterangan domisili yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2014, Nomor 17/DS/PS/3/2015 yang berarti dibuat sebelum ditetapkannya DPT pilpres. Apa betul dari sepengetahuan Saudara?

2581. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Memang ada yang dibuat, cuma yang tanggal 5 Maret saya tidak melihat, tapi yang tanggal ... bulan Juni ada, Yang Mulia.

2582. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, yang kalau di A, B, sampai H itu 29 Juni, 25 Juni, 10 Juni, tapi yang keterangan domisili Nomor 17 ini 5 Maret. Ini dibuat sebelum ditetapkannya DPT pilpres, apa betul?

2583. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Begini, Yang Mulia, kemungkinan warga itu yang membuat domisili itu untuk keperluan-keperluan lain. Pas kebetulan ada pilpres, mereka menggunakan surat keterangan domisili itu.

2584. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi apa mungkin juga bisa dipakai untuk pileg, ya? Karena itu tanggal-tanggalnya sebelumnya?

2585. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Saya kurang tahu, Yang Mulia, kalau digunakan untuk pileg.

2586. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, cukup, Yang Mulia?

2587. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Cukup.

2588. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada lagi, Pak Awaluddin?

2589. SAKSI DARI TERMOHON: AWALUDDIN

Cukup, Yang Mulia.

2590. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya. Terima kasih, Pak Awaluddin, atas keterangannya.
19, sekarang Nomor 20, Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Misnah,
baik, M. Attas. Ibu Misnah alamatnya di Lasuloro, Nomor 1, Blok 4,
Nomor 33, Kelurahan Manggala, betul?

2591. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Maaf, Yang Mulia.

2592. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em.

2593. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Kecamatan, kelurahan sama, tapi telah berpindah dari Lasuloro
tersebut.

2594. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Gimana, gimana?

2595. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Sekarang (...)

2596. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Agak keras sedikit!

2597. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Berpindah rumah.

2598. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, sudah pindah rumah?

2599. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya, ke alamat baru.

2600. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Atau rumahnya banyak, gitu ya?

2601. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Tidak.

2602. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik, sudah pindah rumah. Sekarang alamat yang terbaru yang dipakai yang di mana?

2603. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Mahkota Mas D-2, Nomor 9.

2604. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sudah terrekam, ya. Ibu Misnah Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan?

2605. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Betul, Yang Mulia.

2606. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebagai divisi atau bidang apa, Ibu?

2607. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.

2608. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Divisi Teknis Penyelenggaraan. Apa yang akan dijelaskan oleh Ibu? Silakan.

2609. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya.

2610. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ibu diminta menjelaskan proses rekap dan diminta untuk menjelaskan masalah yang berhubungan dengan DPKTB di Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan, Ibu.

2611. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ada lima poin yang akan saya sampaikan, baik yang ada pada permohonan Pemohon, maupun keterangan dari Saksi Pemohon yang disampaikan kemarin oleh dua orang saksi.

Pertama adalah rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Sulawesi Selatan diselenggarakan pada tanggal 18 sampai ... hingga 19 Juli, dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, beserta Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Tiga orang dari ... tiga anggota dari Bawaslu provinsi, serta tiga orang anggota dari panwas kabupaten/kota. Kemudian, kedua saksi pasangan calon.

Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa secara umum, proses Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Sulawesi Selatan, di semua kabupaten/kota di Sulsel sebanyak 24 KPU Kabupaten/Kota telah berjalan dengan lancar.

Kami tidak mendapatkan laporan kejadian khusus mulai dari TPS, kemudian ... hingga ke rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten/Kota, kecuali pada satu KPU Kabupaten/Kota, yaitu KPU Kabupaten Pangkep.

Di KPU (...)

2612. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di mana, Ibu? Pangkep?

2613. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

2614. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Pangkajene. Baik, apa yang ada masalahkan di situ?

2615. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya, di KPU Pangkep, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mau menandatangani sertifikat penghitungan ... hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten pada model DB dikarenakan ada PPK dari kecamatan kepa ... kepulauan di Liukang Tupabbiring yang kelupaan me ... menyegel sampul di dalam kotak. Sampul penya ... pe ... rekap ... hasil rekapitulasi kecamatan model DA. Tetapi, dimasukkan di dalam kotak suara yang tergeblok dan disegel.

2616. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em.

2617. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Akan tetapi, bahwa ... panwas kabupaten/kota merekomendasikan untuk tetap melanjutkan Pleno rekapitulasi.

2618. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2619. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Dengan catatan tidak ada perbedaan angka-angka yang tertera pada rekap (...)

2620. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Angkanya tidak berubah, ya?

2621. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya, sertifikat di DA.

2622. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

2623. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan rekomendasi Bawaslu. Sebelum masuk pada rekomendasi Bawaslu, saya ingin menyampaikan bahwa pada rekapitulasi tingkat provinsi, pembacaan

hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota secara bergiliran berjalan lancar.

Namun, pada hari kedua menjelang akhir rekapitulasi ketika KPU Kabupaten Luwu Utara adalah kabupaten penampil terakhir yang membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suaranya (...)

2624. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, setelah 23 kabupaten (...)

2625. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya.

2626. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang terakhir Luwu (...)

2627. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya.

2628. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu ada masalah?

2629. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Yang terakhir ada masalah yang dimunculkan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (...)

2630. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2631. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Itu pun bukan saksi yang kemarin bersaksi, tetapi ada saksi yang belakangan masuk, mantan penyelenggara pemilu yang melakukan ... menyampaikan protes karena terjadi selisih pencatatan antara daftar pemilih pada DPKTB dengan pengguna DPKTB. Nah, selisihnya adalah 10.

Nah, hasil diskusi pada rapat Pleno rekapitulasi antara kami dari KPU, kemudian Bawaslu Provinsi, lalu saksi pasangan calon kedua saksi ... kedua saksi pasangan calon, kemudian diberikan rekomendasi oleh

Bawaslu Provinsi untuk melakukan perbaikan pencatatan data pemilih kategori DPKTB.

Nah, saat itu, ada 12 KPU Kabupaten/Kota yang mesti memperbaiki catatan data pemilihnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19/2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan pemilih pada formulir AKPPWP adalah pengguna DPKTB, itu dilakukan setelah pemilih disertai surat suara, sehingga (...)

2632. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, gitu.

2633. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya. Pencatatan 12 KPU Kabupaten/Kota yang melebihi dari pengguna DPKTB-nya walaupun ada Berita Acara yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota dibawa pada rekap ... rapat Pleno rekapitulasi provinsi, itu sudah ada, dan jelas terrekam alamatnya dan namanya mengapa kemudian tidak hadir.

2634. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Setelah dilakukan itu, selisih yang 10 itu (...)

2635. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Kami melakukan perbaikan, Yang Mulia.

2636. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah diperbaiki. Akhirnya selisih 10 enggak ada masalah, ya?

2637. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Tidak ada masalah.

2638. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu akhirnya yang menggunakan DPKTB=85.000 berapa itu seluruh (...)

2639. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

196, Yang Mulia.

2640. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

85.196, betul?

2641. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya.

2642. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian yang paling banyak penggunaan DPKTB di Kota Makassar dan di Kabupaten Gowa, betul?

2643. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya, betul, Yang Mulia.

2644. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang Kota Makassar=40.869 itu?

2645. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya.

2646. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian yang di Gowa=11.037?

2647. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya, betul, Yang Mulia.

2648. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul, ya? Semuanya (...)

2649. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya. Boleh saya (...)

2650. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebelum, saya anu ... semua yang menggunakan DPKTB, akhirnya bisa diklarifikasi ada data pendukungnya? Atau bagaimana? Karena dipersoalkan ini.

2651. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Memang ada keterbatasan kami untuk menyampaikan pada saat rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi. Keterbatasan kami disebabkan oleh persoalan teknis dokumen-dokumen tersebut masih berada di dalam kotak suara.

2652. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kotak.

2653. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Nah, adapun keinginan kami sudah memang betul yang disampaikan oleh saksi bahwa pada saatnya nanti kami akan memberikan catatan-catatan DPKTB tersebut, dokumen-dokumennya, dan kami juga akan menyampaikan ... ya, ketika nanti pada setelah selesai, setelah semuanya aman dan kami sudah bisa mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut dengan aman.

Nah, selanjutnya. Di soal kemarin, ada pembukaan yang ketiga adalah pembukaan kotak suara di KPU Provinsi, di ... apalagi namanya ... dipersoalkan oleh saksi. Kami harus menyampaikan bahwa ya mungkin saja ada yang bertanya mengapa ada pembukaan kotak suara yang dilakukan di KPU Provinsi? Kebijakan (...)

2654. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal berapa itu kotak itu dibuka?

2655. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Menjelang kami berangkat ke sini, Yang Mulia.

2656. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal berapa, ya? Sebelum ada penetapan kita berati itu, ya?

2657. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya, sebelum, Yang Mulia.

2658. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebelum ada penetapan Mahkamah Konstitusi?

2659. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Sebelum ada ... ya.

2660. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berapa kotak suara yang dibuka?

2661. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Saya tidak ingat persis, yang jelas mengapa kotak-kotak suara itu ada di KPU Provinsi? Karena kami memang menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk membawa dokumen-dokumen mulai dari TPS, PPS, PPK, dan Kabupaten/Kota dalam kotak tersegel disiapkan ketika ada atau diperlukan adu dokumen pada rekapitulasi tingkat provinsi karena rekap ini tidak punya ... tidak ada waktu yang panjang, sebagaimana pemilihan legislatif, sehingga kami mengambil kebijakan tersebut.

2662. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Membawa kotak seluruhnya ke KPU Provinsi, ya?

2663. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya.

2664. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

2665. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Kemudian tujuan yang kedua adalah menyiapkan dari awal pembuktian dokumen untuk kepentingan PHPU sekiranya Provinsi Sulawesi Selatan dijadikan sebagai locus dalam PHPU (...)

2666. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sengketa ini?

2667. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya. Kami belajar dari pengalaman pemilihan legislatif yang lalu. Nah, tetapi pembukaan kotak tersebut dilakukan pada saat akan memilah dokumen yang harus dibawa ke sini. Karena kami mengetahui, hanya satu yang dipersoalkan oleh Pemohon, hanya persoalan DPKTB, sehingga yang tadinya semua dokumen-dokumen dibawa ke KPU Provinsi, maka dilakukan pemilahan untuk menghindari kelebihan pembayaran kargo ketika kami membawanya ke sini, Jadi, kami mengeluarkan C-1, C-2, C-7, AK, PPWP, dan ya, data-data pemilih di setiap TPS yang ada DPKTB-nya.

2668. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang tidak diperlukan di sini, ditinggal di sana?

2669. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya, Yang Mulia.

2670. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian di dalam ... masukkan lagi di dalam kotak?

2671. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Dimasukkan kembali ke dalam kotak (...)

2672. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dan disegel lagi?

2673. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Kami berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi. Jadi, ketika kami melakukan pembukaan kotak, ada perwakilan dari Bawaslu Provinsi. Kemudian, disaksikan pula oleh banyak aparat yang saat itu bertugas melakukan pengamanan di KPU Provinsi.

2674. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk saksi enggak diundang, ya?

2675. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ada yang dihubungi oleh pihak sekretariat, tetapi tidak ada yang datang. Ya, tapi memang saya tidak mengetahui persis bagaimana proses menghubunginya tersebut. Menurut penyampaian, dari pihak sekretariat KPU Provinsi, mereka dihubungi tetapi tidak datang.

2676. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pembukaan kotak dipimpin siapa itu? Komisioner?

2677. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya, saya hadir. Kemudian, oleh komisioner KPU kabupaten/kota, ketika Komisioner KPU Provinsi tidak ada.

2678. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi Bawaslu juga ada ya di situ, ya?

2679. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ada perwakilan dari Bawaslu.

2680. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Apa lagi yang akan disampaikan?

2681. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Yang selanjutnya harus saya sampaikan adalah kehadiran Ketua Bawaslu yang disampaikan tadi ... kemarin oleh saksi Pemohon.

2682. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Pak Iqbal itu, ya?

2683. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Bukan, Yang Mulia.

2684. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukan.

2685. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Pak Muhammad ... Ketua Bawaslu RI.

2686. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Bawaslu RI, Pak Muhammad.

2687. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya, Yang Mulia.

2688. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2689. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Sebetulnya tidak ada yang terencana ketika kami memberikan kesempatan untuk berbicara pada forum untuk Ketua Bawaslu RI. Kami hanya disampaikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi, sebelumnya tidak tahu-menahu kehadirannya bahwa Ketua Bawaslu RI ini saat ini sedang berada di tempat ... kebetulan kami melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi di sebuah hotel dan Ketua Bawaslu juga menginap di hotel yang sama.

Disampaikan bahwa Ketua Bawaslu RI ada dan kamilah yang berinisiatif untuk menyiapkan ... memberikan kesempatan. Pikiran kami adalah ... ini adalah Ketua Bawaslu RI, penghargaan yang kami berikan untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang mungkin saja ada filosofi-filosofi yang harus menjadi semangat kami dalam melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Tidak ada yang menggiring kepada sebuah ... sesuatu yang tidak normatif, semuanya disampaikan dengan ... yang normatif-normatif saja.

Intinya adalah jika ada persoalan yang ditemukan pada rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini, diselesaikan di tempat ini dan tidak membawa persoalan ke rekapitulasi nasional. Saya kira, tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden ini.

Untun poin satu, dua, tiga, empat akan kami tunjukkan notulensi rapat, rekaman video, dan rekaman suara. Akan kami masukkan, Yang Mulia.

2690. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, yang (...)

2691. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Selanjutnya, saya akan menyampaikan persoalan yang dimunculkan oleh Saksi TPS 21 Makassar.

2692. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

2693. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Pertama adalah penyumpahan KPPS yang tidak dilakukan.

2694. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2695. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Memang tidak dilakukan penyumpahan KPPS, saya telah menghubungi Anggota KPU Kota Makassar dan telah berbicara melalui telepon dengan Ketua KPPS Saudara Rahim. Yang bersangkutan mengakui bahwa tidak ada penyumpahan yang dilakukan dikarenakan tidak ada naskah sumpah di dalam kotak suara.

Menurut saksi kemarin, terjadi perdebatan. Memang terjadi perdebatan karena ketika disertai formulir C-2 untuk keberatan, yang bersangkutan hanya menuliskan tidak ada penyumpahan. Namun, Ketua KPPS menginginkan ada penambahan kalimat di belakangnya, "Tidak ada penyumpahan karena tidak ada naskah sumpah di dalam kotak suara." Itu kemudian selesai. Dibuatkan Berita Acara.

2696. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dibuatkan Berita Acaranya?

2697. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya.

2698. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dan itu hanya ditemukan di TPS itu tadi ya, 51 itu ya?

2699. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

TPS 21.

2700. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

21, tidak ada (...)

2701. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea.

2702. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, untuk yang TPS lain-lain, enggak ada masalah?

2703. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Tidak ada, Yang Mulia. Kemudian, saya tetap harus menjelaskan persoalan kedua yang dimunculkan oleh Saudara Saksi TPS 21 Kota Makassar yang menyatakan bahwa ada pemilih yang menggunakan KTP dan memilih pada pukul 09.00.

Setelah saya menanyakan ketua KPPS, memang betul yang terjadi itu ada pemilih yang menggunakan KTP hadir ... masuk memilih dikarenakan pada pukul 09.00 lewat, sekitar 09.10 menit menurut ketua KPPS-nya, "Pemilih DPT itu sudah sepi sekali."

2704. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah selesai?

2705. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Semen ... belum selesai, Yang Mulia.

2706. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi sudah sepi?

2707. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Sepi sekali. Sementara, pemilih DPKTB itu menumpuk dan sudah ada sedikit kegaduhan karena pemilih-pemilih tersebut mengancam akan pulang. Dengan pertimbangan melayani hak konstitusional dari pemilih tersebut, maka diakomodir. Dan ketika saya menanyakan kepada ketua KPPS, "Apakah tidak ada keberatan?"

Saya tidak menambah dan tidak mengurangi, ketua KPPS-nya menyatakan bahwa setelah kami melakukan rembukan, tidak ada keberatan. Kami berikan penjelasan-penjelasan kepada saksi, bisa menerima.

Nah, saksi yang hadir pada TPS tersebut hanya satu ... satu saksi, hanya Saksi Pasangan Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Nomor Urut 2 tidak hadir.

Nah, setelah saya memperhatikan C-1 yang dikirimkan ... apa ... yang ada di Jakarta, yang kami siapkan sebagai alat bukti dan melihat pada C-1 upload, Saksi Pasangan Nomor Urut 1 bertanda tangan pada sertifikat penghitungan suara C-1.

2708. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi, akhirnya saksi itu pun tanda tangan, ya?

2709. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya, Yang Mulia.

2710. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, apa yang dikemukakan oleh Ketua KPPS 21, itu diskresi yang sifatnya situasional pada waktu itu, ya?

2711. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Betul, Yang Mulia.

2712. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik. Tapi kemudian, setelah itu enggak ada lagi yang ... DPT yang nyoblos lagi ada, enggak? Di sela-sela yang menggunakan DPKTB dilakukan proses pada waktu ... pada pukul 09.00 WITA itu, kemudian gimana?

2713. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Kami hanya men ... kami mengetahui informasi ini setelah disampaikan oleh saksi kemarin.

2714. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, gitu.

2715. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Tidak ada laporan-laporan lain yang kami ketahui.

2716. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi? Cukup?

2717. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Tidak ada lagi, Yang Mulia. Kami hanya menyatakan bahwa kami sangat berkeberatan. Saya mewakili penyelenggara pemilu, KPU, dan jajarannya se-Sulawesi Selatan. Kami merasa keberatan jika kami dituduh melakukan kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistemis. Bisa dibuktikan dengan penghitungan serta rekapitulasi hasil pemilu yang kami telah munculkan kepada publik. DPKTB sebanyak 85.196, kami tidak mengetahui siapa yang diuntungkan di antara kedua pasangan calon tersebut.

2718. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ya. Cukup ya, Ibu (...)

2719. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Cukup, Yang Mulia.

2720. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Misnah. Terima kasih. Berikutnya, Bu ... ya, ini Bu Misnah ini malam saja masih semangat ini. Luar biasa orang Makassar ini, ya. Kuasa Termohon saja sudah loyo, Bu Misnah ... padahal tadi saya amati, Bu Misnah juga tadi pagi sudah hadir, ya? Luar biasa Srikandi Indonesia ini.

Baik. Sekarang yang terakhir, Bu Nuzul Fitri. Dipersilakan, Bu. Anggota KPU Kabupaten Gowa, bidang apa, Ibu?

2721. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Divisi Teknik Penyelenggaraan.

2722. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Divisi teknik. Alamatnya Abdul Rasyid, Lurang ... apa ini? DG ini, apa ini DG?

2723. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Daeng, itu singkatan.

2724. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Daeng. Oh, daeng. Kok masih galak, ya? "Daeng," gitu, sampai kaget ini. Ada Hakim yang ngantuk, jadi tersentak kembali. Paccinongang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa.

Baik. Di sini Ibu Nuzul diminta untuk menjelaskan masalah rekapitulasi di Gowa. Kemudian, menjelaskan yang berhubungan dengan DPKTB. Kemudian, juga menjelaskan masalah tidak ada rekomendasi dari panwaslu terhadap proses penyelenggaraan di Kabupaten Gowa. Silakan, Ibu.

2725. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Ya. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Juli 2014, KPU Kabupaten Gowa telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden, dihadiri oleh kedua saksi pasangan calon, dan juga Panwaslu Kabupaten Gowa. Dan pada saat proses rekapitulasi, dibacakan per kecamatan. Ada 18 kecamatan di Kabupaten Gowa.

Dan setiap selesai pembacaan satu kecamatan, kami menanyakan kepada Saksi Pasangan Calon 1 dan 2, "Apakah ada tanggapan, ataupun protes, atau keberatan terkait dengan hasil perolehan suara, atau pun pencatatan data pemilih?"

Tidak ada keberatan sampai selesai rekap. Dan (...)

2726. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

2727. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Berakhir rekap, tidak ada juga rekomendasi dari panwaslu yang dikeluarkan.

2728. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk perolehan suara yang leading, yang unggul, pasangan nomor berapa, Ibu?

2729. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Pasangan Calon Nomor 2.

2730. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 2, baik. Enggak usah anu ... angkanya, nanti kita lihat sendiri nanti.

Kemudian yang kedua, apa yang akan disampaikan?

2731. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Kami ingin membantah tentang dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa di Kabupaten Gowa terdapat 11.037 pemilih siluman.

2732. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti makhluk halus yang memilih, memangnya?

2733. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Saya tidak tahu, apakah tidak bisa membedakan goa dengan Gowa.

2734. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh.

2735. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

KPU Kabupaten Gowa, setelah mendapatkan surat dari Mahkah tentang dalil Pemohon, kami mencoba untuk menelaah kembali, menelusuri seluruh data yang ada dari tiap tingkat jenjang penghitungan rekapitulasi, ada mencocokkan 11.037 DPKTB tersebut adalah penduduk

masyarakat di Wilayah Gowa yang berdomisili di wilayah Gowa tidak ada yang disebut pemilih siluman.

2736. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2737. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Hal ini sudah kami masukkan ke dalam alat bukti.

2738. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Semuanya didukung oleh (...)

2739. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

C-7 (...)

2740. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada, ya?

2741. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Atau AKP.

2742. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu penduduk tidak ada luar daerah, ya?

2743. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Tidak ada.

2744. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sesuai dengan alamat (...)

2745. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Domisili.

2746. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Domisili, ya? Baik, terus apa lagi, Ibu?

2747. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Saya pikir itu.

2748. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh. Itu saja, jadi yang penting adalah ibu menjelaskan makhluk halus tidak ada yang mencoblos, begitu, ya?

2749. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Ya.

2750. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, jadi siluman itu tadi, ya? Kalau makhluk halus ikut pemilu, kacau republik ini. Ya, silakan Ibu, ya? Kalau begitu sudah selesai, tapi betul, Ibu, data itu menggunakan DPKTB 11.037, betul, ya? Betul. Baik, terima kasih.

Sekarang semuanya sudah selesai, saya kembalikan ke Pak Ketua, silakan, Yang Mulia.

2751. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arief. Termohon, ada pertanyaan pada saksi?

2752. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ada, Majelis.

2753. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

2754. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Untuk saksi Agus Supriyatna dari KPU Provinsi Banten, tadi disebutkan bahwa di Provinsi Banten, Nomor 1 unggul dengan jumlah

suara yang sangat besar, kami ingin tahu apakah DPKTB di Provinsi Banten juga tinggi? Bisa disebutkan berapa angkanya?

2755. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Untuk di Provinsi Banten DPKTB-nya itu 205.848 pemilih.

2756. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Jadi, lebih dari 200.000, ya? Boleh tahu persentasenya berapa terhadap DPT?

2757. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Persentase ada 12 orang per-TPS.

2758. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Itu rata-rata. Kalau persentasenya bisa disebutkan?

2759. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

2,8.

2760. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

2,8. Baik, terima kasih. Berikutnya untuk Ramlan. Di Tangerang, siapa yang unggul? Apakah Pasangan Nomor 1 atau Nomor 2?

2761. SAKSI DARI TERMOHON: RAMLAN

Nomor 1.

2762. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Nomor 1. Apakah di situ ada DPKTB?

2763. SAKSI DARI TERMOHON: RAMLAN

Ada.

2764. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Berapa jumlahnya?

2765. SAKSI DARI TERMOHON: RAMLAN

69.582 pemilih DPKTB.

2766. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

69.582. Berarti cukup tinggi. Berapa persentasenya?

2767. SAKSI DARI TERMOHON: RAMLAN

Sekitar 3 ... sekitar 3,1%.

2768. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Sekitar 3,1%. Selanjutnya, tadi disebutkan ada keberatan terhadap DPKTB pada tingkat PPS yang langsung dilakukan pembukaan kotak suara?

2769. SAKSI DARI TERMOHON: RAMLAN

Betul.

2770. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Apakah itu berlaku untuk semua? Kalau keberatan terhadap DPKTB di tingkat PPS itu ternyata langsung dibuka kotak suara, itu berlaku juga di tempat lain?

2771. SAKSI DARI TERMOHON: RAMLAN

Ya.

2772. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, Terima kasih. Berikutnya, kepada Saksi Misnah, untuk Sulawesi Selatan.

2773. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya.

2774. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Apakah di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Jeneponto misalnya, ada suara untuk Pasangan Nomor 1 yang nilainya sampai 100% di beberapa TPS, dan Nomor 2 mendapatkan nilai 0?

2775. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ada.

2776. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ada.

2777. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Dan itu sempat dipertanyakan oleh saksi Pasangan Nomor Urut 2 pada saat rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi. Dan pada saat itu kami meminta kepada KPU Jeneponto untuk membawa C-1 Plano, C-1 hologram, C-7 DPT, pada forum rekap tersebut dan memang benar bahwa di TPS ... 2 TPS di Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, ada 2 TPS dimana perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 itu 100%. Termasuk untuk KPU ... Kabupaten Jeneponto adalah ... secara keseluruhan Pasangan Nomor Urut 1 adalah pemenang di kabupaten tersebut dengan selisih perolehan suara kurang lebih 700 suara.

2778. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih. Cukup, Majelis.

2779. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pihak Terkait?

2780. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Yang Mulia, satu, Yang Mulia.

2781. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

2782. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Untuk Nias Selatan, Nias Selatan, ya? Sudah, ya? Jadi, apakah Saudara dalam 1 hari menerima rekomendasi dari Panwas sebanyak 27 itu, sebelumnya pernah dilakukan klarifikasi, ya? Atau diminta informasi atau diberitahukan rekomendasi itu karena temuan atau karena pengaduan?

2783. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tadi tidak ada waktu dijelaskan tadi itu, tidak ada komunikasi, tidak ada apa-apa, tiba-tiba keluar pada hari itu.

2784. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Kemudian (...)

2785. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah jelas tadi.

2786. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Kemudian, apakah yang disampaikan terhadap rekomendasi seperti itu dengan serta-merta wajib Saudara melakukannya atau Saudara masih punya hak untuk menanyakan atau minta penjelasan atas rekomendasi tersebut?

2787. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tadi juga sudah terjawab. Tadi dia mengirim surat dulu, menurut dia itu adalah bagian dari pelaksanaan.

2788. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Bisa kami jelaskan ini (...)

2789. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tadi panjang sekali urusan ini. Jadi jangan diulang-ulang lagi, gitu lho.

2790. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Baik, Yang Mulia. Baik. Apakah Saudara pernah tahu atau mendengar bahwa penyelenggara pemilu di sana itu mengubah perolehan suara, sehingga jumlah suara pasangan calon menjadi 100% sampai 200%? Ini klarifikasi terhadap dalil daripada Pemohon.

2791. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Tidak ada.

2792. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Tidak ada. Kemudian, dari 27 rekomendasi tersebut, sebenarnya rekomendasi itu untuk pemungutan suara ulang atau untuk penghitungan suara ulang? Klarifikasi juga karena dalil Pemohon adalah pemungutan suara ulang, halaman 64.

2793. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Kami jelaskan, perhitungan suara ulang.

2794. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Kemudian (...)

2795. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tadi juga sudah.

2796. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Ya. Kemudian untuk Kabupaten Tangerang. Terima kasih, Yang Mulia. Ini mengklarifikasi, tadi dijelaskan bahwa pemenangnya atau yang unggul adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1.

2797. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Betul.

2798. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Dalil Pemohon adalah apakah di Banten atau Tangerang yaitu Tangerang Selatan itu ada mobilisasi massa? Juga di Kecamatan Kelapa

Dua, Kelurahan Curug? Misalnya mobilisasi massa untuk memilih salah satu calon, apakah oleh penyelenggara dari tingkat TPS, PPK, atau mungkin dari Babinsa atau polisi atau keamanan lainnya, ada enggak? Atau pernah dengar?

2799. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Tidak ada, tidak ada. Jadi perlu saya jelaskan, di Curug Sangereng itu sebenarnya begini, bagi pemilih DPKTB itu sebelum memilih sempat di-cross-check dulu itu di Desa Curug Sangereng. Nah, kemudian oleh petugas PPS itu diantarkan ke TPS-TPS terdekat, itulah kemudian yang dilihat seperti dimobilisasi. Jadi, tidak ada mobilisasi.

2800. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Dalil Pemohon tidak benar menurut Saudara, ya. Kemudian, untuk di Kelurahan Curug juga sama?

2801. SAKSI DARI TERMOHON: SUMANGELI MENDROFA

Sama, betul. Tidak ada.

2802. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Baik. Sekarang, untuk Ibu Misnah dari Provinsi Sulawesi Selatan.

2803. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya.

2804. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Saudara Saksi, di sini klarifikasi dari dalil Pemohon itu, apakah benar atau Saksi mengetahui bahwa KPU provinsi itu telah sengaja memenangkan Pasangan Nomor 2?

2805. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Kami tidak melakukan itu, tadi saya sudah membantah. Jumlah (...)

2806. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Jadi, tidak ada niat dari penyelenggara ya, untuk memenangkan salah satu pasangan calon, enggak ada?

2807. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Secara formal, informal kami tidak pernah (...)

2808. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TEGUH SAMUDERA

Faktanya seperti itu, ya? Baik.

2809. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

DPKTB juga hanya 1,9% dari jumlah keseluruhan untuk pemilih.

2810. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Cukup dari kami, Yang Mulia. Terima kasih.

2811. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup ya, Pihak Terkait. Pemohon, ada atau cukup?

2812. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Ada, Yang Mulia.

2813. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada?

2814. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Dari belakang.

2815. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

2816. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Saya minta Bu Misnah, ya. Bu Misnah lagi yang suaranya lantang tadi. Berdiri lagi, Bu.

2817. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya.

2818. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Bu, Ibu tadi katakan bahwa pembukaan kotak suara tanpa saksi ya, itu dilakukan sebelum tanggal 8?

2819. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya.

2820. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Berapa banyak TPS yang enggak pakai saksi itu?

2821. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Dokumen-dokumen tersebut sudah dipadatkan oleh KPU kabupaten kota. Karena (...)

2822. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Maksudnya dipadatkan?

2823. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Karena tidak mungkin membawa semua kotak suara dari TPS-TPS.

2824. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Bukan, bukan. Bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu, saya cuma tanya angka, Ibu kan hafal itu angka-angka tadi, ya. Berapa jumlah TPS di wilayah kerja Saudara yang dibuka kotak suaranya sebelum tanggal 8 tanpa dihadiri saksi?

2825. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Akan saya masukkan pada jawaban tertulis. Saya harus melakukan pengecekan.

2826. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Ya, terima kasih. Kemudian, tadi Saudara mengatakan bahwa ada pemilih DPKTB yang diperkenankan memilih pada pagi hari setelah pukul

09.00 atau pukul 09.10 menit ya, seperti dikatakan Yang Mulia tadi, diskresi gitu. Itu berapa TPS sebetulnya yang ada di wilayah Saudara?

2827. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Sampai saat ini, saya hanya mengetahui satu TPS setelah disampaikan kemarin oleh saksi TPS 21 Tamalanrea Indah.

2828. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Baik. Ya Ibu, cukup deh.

2829. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Terima kasih.

2830. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Satu lagi, Yang Mulia.

2831. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

2832. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Saya senang ibu-ibu lagi ini. Ibu Nuzul, ya? Kalau malam ini suara wanita kan lebih menggelegar.

2833. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi pilihnya Sulsel semua, dua-duanya.

2834. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Bu Nuzul, tadi Ibu mengatakan DPKTB ada 11.037, ya?

2835. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Ya.

2836. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Itu dari DPKTB yang ada itu yang ditemukan ada pelanggaran berapa banyak, Bu?

2837. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Tidak ada.

2838. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Yakin Ibu? Semua enggak ada pelanggaran?

2839. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Yakin. Kami tidak menerima laporan pelanggaran, baik dari penyelenggara ad hoc di bawah kami ataupun dari panwas kecamatan ataupun panwas kabupaten.

2840. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Ibu sudah buka juga kotak suara di sana?

2841. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Sudah.

2842. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Setelah dibuka, ada enggak yang melanggar?

2843. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Tidak ada.

2844. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Sampai sekarang laporannya enggak ada?

2845. SAKSI DARI TERMOHON: NUZUL FITRI

Tidak ada laporannya.

2846. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Terima kasih.

2847. KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN

Yang Mulia.

2848. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup, ya.

2849. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO

Itu saja, Yang Mulia.

2850. KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN

Tambahan. Yang Mulia.

2851. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Masih ada?

2852. KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN

Ya. Kembali ke Ibu Misnah. Tadi, Ibu katakan waktu pembukaan kotak suara, ada upaya menghubungi saksi, tapi Ibu sendiri tidak tahu bagaimana menghubunginya?

2853. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya karena (...)

2854. KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN

Nanti dulu, nanti dulu.

2855. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Oke.

2856. KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN

Jangan dipotong dulu, dong. Saya belum bertanya, sudah dijawab. Pertanyaan saya apakah ada protap yang ibu terapkan selama ini dalam konteks memanggil orang ... apa namanya ... saksi, berhubungan dengan pihak pasangan calon. Protapnya seperti apa sih,

cara menghubungi ... apa ... bagaimana menghubungi orang ,memanggil dan lain sebagainya?

2857. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya. Tentu saja ada, tetapi tentu saja ada yang sifatnya sangat formal ada yang sifatnya situasional. Kami mungkin agak berbeda pandangan dengan Pemohon yang menyatakan bahwa kotak-kotak suara itu harus dijaga sampai ... tidak boleh dibuka nanti setelah ada perintah (...)

2858. KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN

Sori, sori, bukan itu pertanyaannya.

2859. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Sebentar. Oke. Saya akan sampai ke situ, Pak.

2860. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Protap saja dulu.

2861. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Oke.

2862. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, apa yang biasa dilakukan oleh KPU dalam pemberitahuan pemanggilan saksi (...)

2863. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya. Secara formal kami memang harus menyurat, tetapi ada situasi-situasi yang sangat situasional (...)

2864. KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN

Cukup (...)

2865. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Pada saat dilakukan pembukaan kotak suara di KPU provinsi, waktu sudah sangat mendesak, kami sudah harus berangkat ke Jakarta.

2866. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, itulah kondisinya.

2867. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Jadi, dihubungi melalui telepon oleh pihak sekretariat.

2868. KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN

Cukup.

2869. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya.

2870. KUASA HUKUM PEMOHON: FACHMI H. BACHMID

Ada tambahan, Majelis.

2871. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

2872. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI H. BACHMID

Saya mau bertanya kepada Saudara Agus Supriyatna. Ya, tadi Saudara Agus Supriyatna menjelaskan terkait dalil Pemohon yang 1.047.310 pengguna hak pilih yang bermasalah, tadi Saudara Saksi menjelaskan sudah melakukan cross-check dan menyatakan tidak bermasalah. Pertanyaan saya, bagaimana tiba-tiba Saudara itu melakukan cross-check? Apakah cross-check ini didasarkan adanya rekomendasi panwas atukah inisiatif sendiri, atukah bagaimana dan kapan? Mohon penjelasan.

2873. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Ya. KPU Provinsi Banten setelah menerima perbaikan permohonan, lalu kemudian kita menginstruksikan kepada KPU kabupaten/kota untuk memberikan jawaban dan kronologis, dan mengecek data-data yang disampaikan oleh Pemohon. Ternyata memang itu tidak betul. Umpamanya di dalam (...)

2874. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI H. BACHMID

Bisa dijelaskan tanggalnya?

2875. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Kita menerima permohonan perbaikan itu tanggal 6 Agustus ... malam Agustus. Lalu kemudian, kita menyampaikan kepada KPU kabupaten/kota untuk mengecek permohonan-permohonan yang disampaikan oleh Pemohon itu oleh KPU kabupaten/kota dan kita juga sudah menyampaikan jawaban secara tertulis dan juga alat buktinya (...)

2876. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI H. BACHMID

Pertanyaan saya, Saudara melakukan cross-check itu tanggal 7, tanggal 6, tanggal 8, atau tanggal berapa?

2877. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Tanggal 9, setelah ... setelah kita menerima kita mempelajari, lalu kemudian setelah tanggal 8 kita mengecek itu. Oleh KPU kabupaten/kota, bukan oleh KPU provinsi.

2878. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI H. BACHMID

Saudara Saksi, apakah Saudara terkait dengan persoalan pembukaan ini ya karena cross-check itu pasti membuka kotak suara. KPU pusat sebelum tanggal 8 telah mengeluarkan surat edaran. Apakah surat edaran yang dilaksanakan yang dikeluarkan oleh KPU, Saudara juga laksanakan? Dalam artian juga membuka kotak suara sebelum tanggal 8?

2879. SAKSI DARI TERMOHON: AGUS SUPRIYATNA

Ya, sesuai dengan permohonan Pemohon bahwa untuk permohonan sebelum tanggal 8 itu ada di Kabupaten Tangerang, lalu kemudian di Tangerang Selatan di Kabupaten Tangerang ... 7 TPS di Kabupaten Tangerang, lalu di Tangerang Selatan 2 TPS.

Lalu pada ... apa namanya ... malam takbiran, itu KPU Kabupaten Tangerang membuka kotak surat suara dihadiri oleh Saksi Nomor Urut 1, Saksi Nomor Urut 2, Panwaslu Kabupaten Tangerang, pihak kepolisian itu hadir di situ membuka kotak yang 7 TPS itu, dihadiri dan ada Berita Acaranya, pembukaan kotak suara yang apa ... tujuh TPS itu dipermasalahkan.

Ada tanda tangan Saksi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2. Lalu juga di Tangerang Selatan dihadiri oleh Saksi Nomor Urut 1, saksi Nomor Urut 2, kepolisian, dan juga panwaslu, ada di Berita Acaranya dan mereka menandatangani Berita Acara pembukaan kotak itu.

2880. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI H. BACHMID

Ya berarti ada pembukaan kotak suara sebelum tanggal 8.

2881. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya.

2882. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHMI H. BACHMID

Dan ada pembukaan kotak suara (...)

2883. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya tinggal disimpulkan saja, memang begitu. Ya, cukup ya? Masih ada juga? Ya.

2884. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Masih ada, Yang Mulia. Ini kepada Ibu Misnah kembali, saya ingin penegasan lagi supaya lebih jelas. Tadi Ibu katakan membuka kotak suara sebelum tanggal 8 untuk memenuhi adanya permohonan di MK terhadap apa yang kami sampaikan. Apa benar begitu, Bu?

2885. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya?

2886. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Ibu membuka kotak suara (...)

2887. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tadi ya, tadi, sebelum (...)

2888. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Ya, sebelum. Artinya, isi yang ada di dalam kotak suara, Ibu gunakan sebagai alat bukti untuk dalam permohonan di MK, apa benar begitu, Bu?

2889. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Betul.

2890. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Untuk diajukan alat bukti sebagai sekarang ini?

2891. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya.

2892. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Ya. Saya mau tanya, sesudah kotak suara dibuka, isi yang sudah dibuka itu apakah lengkap semua isinya atau ada sebagian dokumen yang tidak lengkap?

2893. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Lengkap.

2894. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Lengkap semuanya?

2895. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Ya.

2896. KUASA HUKUM PEMOHON: ADE IRFAN PULUNGAN

Oke, terima kasih.

2897. SAKSI DARI TERMOHON: MISNAH M. ATTAS

Itu pun juga kami harus melakukan pengecekan ke KPU kabupaten/kota.

2898. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup, cukup. Ya, cukuplah ya. Terima kasih. Sudah pukul 21.00 WIB tidak mungkin kita lanjutkan, masih ada 25 saksi dari Pihak Terkait, dan masih ada sisa saksi dari Pemohon 5. Pengalaman hari ini 21 saksi saja sampai malam. Jadi, sampai besok kelihatannya kita hanya bisa menyelesaikan 25 saksi dari Pihak Terkait dan tambahan 5 saksi yang belum dari Pemohon, ya.

2899. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Majelis Hakim?

2900. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebentar-sebentar, apakah Pemohon akan mengajukan ahli?

2901. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Ya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan.

2902. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berapa orang?

2903. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Lima orang, Yang Mulia.

2904. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Termohon?

2905. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tiga orang, Majelis.

2906. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pihak Terkait?

2907. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Tiga orang, Yang Mulia.

2908. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tiga orang, tiga orang, lima orang, 11 orang, panjang berarti itu. Adu ahli nanti hari Jumat. Kita dengarkan saja.

Jadi tidak ada penambahan saksi, kita nanti tinggal dengar ahli hari Jumat, kemudian besok kita selesaikan yang tersisa ini Pihak Terkait dan Pemohon.

2909. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari Termohon, Majelis.

2910. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

2911. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terkait dengan lima orang saksi dari Pemohon, kami boleh tahu dari mana? Supaya kami bisa menyiapkan untuk menanggapi (...)

2912. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah ada. Yang belum ... yang belum kemarin kan, yang belum disumpah kemarin, kan.

2913. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Yang Mulia?

2914. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah ada?

2915. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Yang kami hadirkan ini adalah saksi-saksi yang belum sempat disumpah kemarin.

2916. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, betul. Ada, ada di daftar di situ?

2917. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Jadi ini bukan saksi yang ... yang sudah apa ... yang baru sekali, bukan.

2918. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

2919. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia.

2920. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kemarin itu karena terlambat datang sehingga tidak sempat disumpah dan akhirnya tidak sempat diperiksa, ya. Baik, kita ... dengan demikian sidang hari ini selesai dan sidang kita besok dimulai pukul 09.30 WIB, ya.

2921. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SIRRA PRAYUNA

Jam 10.00 WIB, Yang Mulia.

2922. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan besok, Kamis 14 Agustus 2014, pukul 09.30 WIB untuk mendengarkan saksi dari Pihak Terkait dan Pemohon.

Sidang malam ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 21.10 WIB

Jakarta, 13 Agustus 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

